

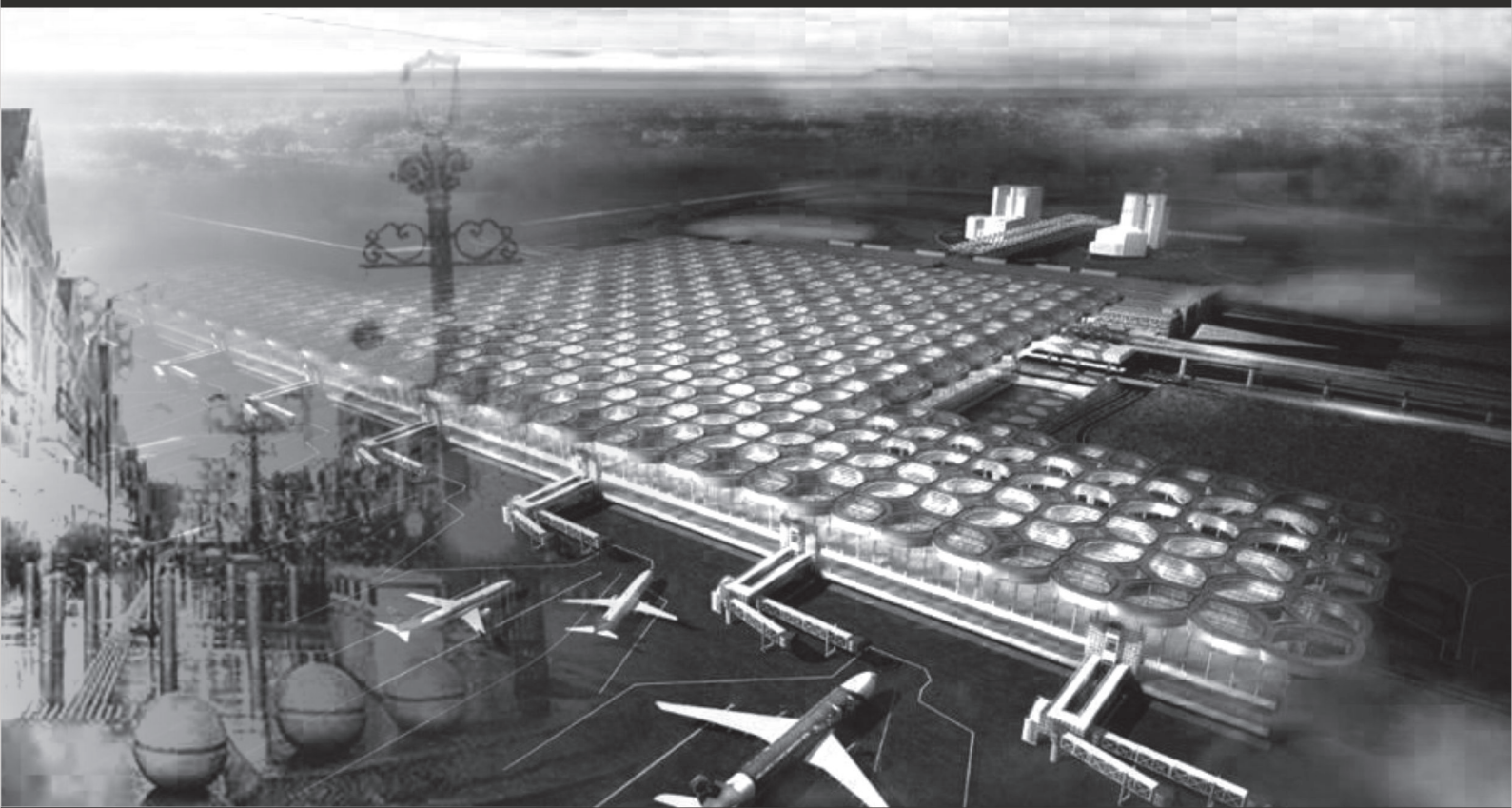


LAPORAN AKHIR

ANALISIS ICOR SEKTORAL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

2013-2017



KERJA SAMA
BADAN PUSAT STATISTIK
BALAI STATISTIK DAERAH BAPPEDA DIY
2018

KATA PENGANTAR

Dalam perencanaan pembangunan wilayah, pada umumnya pemerintah telah menentukan target pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai selama periode tertentu. Salah satu faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah investasi. Perkembangan suatu sektor ekonomi tidak dapat dipisahkan dengan nilai investasi yang ditanamkan pada sektor tersebut. Investasi akan meningkatkan kapasitas produksi dan pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi.

Penyusunan publikasi Analisis *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) Sektoral Daerah Istimewa Yogyakarta 2013-2017 bertujuan untuk menyediakan informasi dalam rangka mengevaluasi tingkat efisiensi penggunaan barang modal dalam proses produksi pada masing-masing sektor ekonomi. Berdasarkan angka ICOR menurut lapangan usaha, maka dapat diestimasi kebutuhan investasi untuk mencapai target pertumbuhan tertentu. Publikasi ini dapat terwujud berkat kerjasama antara Badan Pusat Statistik dengan BAPPEDA Daerah Istimewa Yogyakarta.

Saran dan kritik perbaikan sangat diharapkan untuk penyempurnaan publikasi sejenis pada masa yang akan datang. Kepada semua pihak yang turut berperan dalam penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih.

Bantul, Mei 2018
Badan Pusat Statistik
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala,

Johanes De Britto Priyono

KATA SAMBUTAN

Kami menyambut baik diterbitkannya Publikasi “Analisis ICOR Sektoral Daerah Istimewa Yogyakarta 2013-2017”, sebagai hasil kerja sama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Daerah Istimewa Yogyakarta dengan BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Publikasi ini merupakan lanjutan dari publikasi yang sama tahun-tahun sebelumnya.

Dalam publikasi ini, diuraikan distribusi investasi menurut sektor, dan juga dianalisis efisiensi investasi dalam menumbuhkan perekonomian daerah dan penyerapan tenaga kerja. Yang lebih menarik dari publikasi ini adalah terdapat analisis kebutuhan dan pilihan investasi untuk suatu target pertumbuhan yang diinginkan. Kajian seperti ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pendukung bagi pemerintah dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Kami berharap publikasi ini juga dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para pihak terkait. Kami berkomitmen bahwa dengan mendapat masukan dari para pakar dari akademisi dan instansi teknis, publikasi ini akan lebih baik dalam format, substansi, maupun penyajiannya di masa mendatang.

Pada kesempatan ini, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta beserta jajarannya atas segala usaha yang telah dilakukan untuk menyelesaikan publikasi ini. Mudah-mudahan kerjasama antara BAPPEDA Daerah Istimewa Yogyakarta dengan BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta akan semakin erat dan dapat memberikan sumbangan kepada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yogyakarta, Mei 2018

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala,

Tavip Agus Rayanto

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN.....	2
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Dasar Pelaksanaan	6
1.3. Ruang Lingkup	7
1.4. Maksud dan Tujuan	8
1.5. Sasaran dan Keluaran	9
1.6 Pembiayaan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1. Pengertian ICOR	11
2.2. Pengertian Investasi	16
2.2.1. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).....	17
2.2.2. Perubahan Inventori	21
2.3. Pengertian Output	22
2.4. Pengertian Nilai Tambah Bruto	23
2.5. Penelitian Terdahulu	24
BAB III METODOLOGI.....	28
3.1. Sumber Data.....	28
3.2. Estimasi PMTB Lapangan Usaha	28
3.3. Penghitungan Pertambahan Output Lapangan Usaha	29

3.4. Metode Penghitungan ICOR	29
3.4.1. Metode Standar	30
3.4.2. Metode Akumulasi	31
3.4.3. <i>Time Lag</i> Investasi.....	32
3.4.4. Koefisien ICOR Negatif	33
3.4.5. Koefisien ICOR yang Besar dan Positif	33
3.4.6. Asumsi Dasar	33
3.5. Indeks Perkembangan Agregat PDRB.....	35
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1. Pertumbuhan Ekonomi.....	37
4.2. Perkembangan Nilai Investasi.....	43
4.3. Struktur Investasi.....	44
4.4. Angka ICOR D.I. Yogyakarta	49
4.4.1. ICOR Total	49
4.4.2. ICOR menurut Lapangan Usaha	53
4.5. Kebutuhan dan Pilihan Investasi	67
4.6. Hubungan ICOR, GDI, GDS, Laju Pertumbuhan Ekonomi, dan Inflasi	77
 BAB V PENUTUPAN	84
5.1. Kesimpulan	84
5.2. Rekomendasi	86
 DAFTAR PUSTAKA	89
 LAMPIRAN	92

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 4.1.	Pertumbuhan Ekonomi D.I. Yogyakarta menurut Lapangan Usaha, 2013-2017 (persen).....	39
Tabel 4.2.	Pertumbuhan Ekonomi D.I. Yogyakarta menurut Pengeluaran, 2013-2017 (persen).....	42
Tabel 4.3.	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi-provinsi di Pulau Jawa, 2013-2017 (persen).....	43
Tabel 4.4.	Perkembangan Nilai Investasi D.I. Yogyakarta, 2013-2017 (Juta rupiah).....	44
Tabel 4.5.	Nilai Investasi D.I. Yogyakarta menurut Kabupaten/Kota atas Dasar Harga Berlaku, 2013-2017 (Juta Rupiah).....	48
Tabel 4.6.	Nilai Investasi D.I. Yogyakarta menurut Kabupaten/Kota atas Dasar Harga Konstan 2010, 2013-2017 (Juta Rupiah)	48
Tabel 4.7.	ICOR Kabupaten/Kota se-D.I. Yogyakarta dengan Pendekatan Investasi = PMTB + Perubahan Inventori, 2013-2017	50
Tabel 4.8.	ICOR Kabupaten/Kota se-D.I. Yogyakarta dengan Pendekatan Investasi = PMTB, 2013-2017	51
Tabel 4.9.	ICOR Provinsi-provinsi di Pulau Jawa (Investasi = PMTB + Δ Inventori), 2013-2017	52
Tabel 4.10.	ICOR Provinsi di Pulau Jawa (Investasi = PMTB), 2013-2017	53
Tabel 4.11.	ICOR Lapangan Usaha Tahunan Metode Standar Lag 0 dengan Pendekatan Investasi = PMTB + Perubahan Inventori, 2013-2017	54
Tabel 4.12.	ICOR Lapangan Usaha Tahunan Metode Standar Lag 0 dengan Pendekatan Investasi = PMTB, 2013-2017	56
Tabel 4.13.	ICOR Lapangan Usaha Metode Akumulasi, Lag 0 Dengan Pendekatan Investasi = PMTB dengan dan tanpa Perubahan Inventori, 2013-2017	59

Tabel 4.14.	ICOR Lapangan Usaha Metode Standar, Lag 0 Dengan Pendekatan Investasi = PMTB dengan dan tanpa Perubahan Inventori, 2013-2017	61
Tabel 4.15.	ICOR Lapangan Usaha Metode Standar Lag 0, Lag 1, dan Lag 2, dengan Pendekatan Investasi = PMTB + Perubahan Inventori, 2013-2017	63
Tabel 4.16.	ICOR Lapangan Usaha Metode Standar Lag 0, Lag 1, dan Lag 2, dengan Pendekatan Investasi = PMTB, 2013-2017	64
Tabel 4.17.	ICOR Lapangan Usaha Metode Standar dan Akumulasi, Indeks Perkembangan PDRB, dan laju Pertumbuhan Ekonomi, 2013-2017	66
Tabel 4.18.	Kebutuhan Investasi dan Target Pertumbuhan Ekonomi D.I. Yogyakarta, 2018-2022	68
Tabel 4.19.	Kebutuhan Investasi dan Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kulonprogo, 2018-2022	69
Tabel 4.20.	Kebutuhan Investasi dan Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul, 2018-2022	69
Tabel 4.21.	Kebutuhan Investasi dan Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gunungkidul, 2018-2022	70
Tabel 4.22.	Kebutuhan Investasi dan Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sleman, 2018-2022	71
Tabel 4.23.	Kebutuhan Investasi dan Target Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta, 2018-2022	72
Tabel 4.24.	Distribusi Penyerapan Tenaga Kerja D.I. Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha, 2013 dan 2017	74
Tabel 4.25.	Jumlah Usaha/Perusahaan dan Tenaga Kerja menurut Kategori di D.I. Yogyakarta, 2016	76
Tabel 4.26.	Sebaran Perusahaan/Usaha non-Pertanian di Provinsi D.I. Yogyakarta menurut Skala Usaha, 2016	76
Tabel 4.27.	Perkembangan ICOR, GDI, GDS, LPE, dan Inflasi di D.I. Yogyakarta, 2013-2017	80

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan PMTB D.I. Yogyakarta, 2013-2017 (persen)	37
Gambar 4.2. Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi D.I. Yogyakarta menurut Lapangan Usaha, 2013-2017 (persen)	38
Gambar 4.3. Rata-rata Distribusi PDRB D.I. Yogyakarta menurut Pengeluaran, 2013-2017 (persen)	40
Gambar 4.4. Proporsi PMTB Terhadap Total Investasi D.I. Yogyakarta, 2013-2017 (persen)	45
Gambar 4.5. Struktur Investasi D.I. Yogyakarta menurut Lapangan Usaha, 2013-2017	46
Gambar 4.6. Struktur Investasi D.I. Yogyakarta menurut Kelompok Industri, 2013-2017	47
Gambar 4.7. Perkembangan ICOR dan Laju Pertumbuhan Ekonomi D.I. Yogyakarta, 2013-2017	49
Gambar 4.8. Distribusi Usaha/Perusahaan Non-Pertanian di D.I. Yogyakarta menurut Kabupaten/Kota, 2016 (persen) .	77
Gambar 4.9. Kesenjangan Investasi dan Tabungan	78
Gambar 4.10. Perkembangan GDI dan GDS D.I. Yogyakarta, 2010-2017	81



BAB I

PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Pelaksanaan
- 1.3. Ruang Lingkup
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sasaran dan Keluaran
- 1.6. Pembiayaan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang terencana menuju keadaan masyarakat ke arah kehidupan yang lebih baik daripada kondisi sebelumnya. Dalam perencanaan pembangunan ekonomi suatu wilayah, biasanya pemerintah telah menentukan target pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tujuan dari kebijakan ekonomi makro. Perekonomian yang tumbuh akan mampu memberikan kesejahteraan ekonomi bagi penduduk di wilayah yang bersangkutan. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat diukur dengan menggunakan indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Untuk mencapai target laju pertumbuhan ekonomi tertentu diperlukan jumlah investasi yang sesuai. Investasi merupakan salah satu sumber pertumbuhan, karena peningkatan investasi akan meningkatkan kapasitas produksi. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan kemampuannya untuk menyediakan lebih banyak input yang diperlukan dalam proses produksi. Oleh karena itu tingkat pertumbuhan ekonomi dan investasi merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Semakin besar investasi yang ditanamkan untuk menunjang kegiatan ekonomi, semakin besar pula tingkat pertumbuhan yang akan dicapai. Sebaliknya, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi yang dicapai maka pendapatan yang dapat ditabung dan diinvestasikan juga akan meningkat (Todaro, 2003).

Dalam model pertumbuhan Harrod-Domar dinyatakan bahwa output merupakan fungsi dari stok kapital dan tenaga kerja pada tingkat teknologi tertentu (Hess and Ross, 1997). Stok kapital sendiri merupakan determinan penting yang berpengaruh terhadap pembentukan output perekonomian suatu wilayah. Investasi akan meningkatkan stok kapital, sedangkan depreasiasi atau

penyusutan akan mengurangi stok kapital (Mankiw, 2007). Kenaikan stok kapital akan mampu meningkatkan kapasitas suatu wilayah dalam proses penciptaan output perekonomian. Sutomo (2015) menyatakan bahwa *investment is the engine of economic growth*, dengan pengertian bahwa faktor produksi yang berperan dalam menghasilkan output adalah investasi fisik (*ceteris paribus*). Dengan demikian investasi diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Beberapa agenda pemerintah daerah terkait dengan investasi yang dirumuskan secara jelas dan komprehensif dapat mendorong pertumbuhan investasi di wilayah tersebut. Agenda-agenda dimaksud, antara lain: (i) merumuskan kebijakan investasi; (ii) memperbaiki peraturan dan regulasi; dan (iii) memperbaiki dukungan dan pelayanan birokrasi (*one-roof system* atau *one-stop shop*); (iv) mengembangkan promosi daerah; (v) mengembangkan kemitraan (*partnership*); (vi) mengembangkan *regional management*; (vii) mengembangkan *business networking*; dan (viii) mempertajam strategi belanja publik (Salim, 2010).

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi investasi suatu daerah antara lain sebagai berikut:

1. **Tingkat bunga**; menentukan jenis-jenis investasi yang akan memberikan keuntungan kepada para pemilik modal (investor) pada investor hanya akan menanamkan modalnya apabila tingkat pengembalian modal dari modal yang ditanamkan (*return of investment*), yaitu berupa persentase keuntungan netto (belum dikurangi dengan tingkat bunga yang dibayar) yang diterima lebih besar dari tingkat bunga. Seorang investor mempunyai dua pilihan di dalam menggunakan modal yang dimilikinya yaitu dengan meminjamkan atau membungakan uang tersebut (deposito), dan menggunakannya untuk investasi.
2. **Tingkat keuntungan investasi yang diramalkan**; mengenai keuntungan di masa depan akan memberikan gambaran pada investor mengenai jenis usaha yang prospektif dan dapat dilaksanakan dimasa depan dan besarnya

investasi yang harus dilakukan untuk memenuhi tambahan barang-barang modal yang diperlukan.

3. **Tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya.** Dengan bertambahnya pendapatan nasional maka tingkat pendapatan masyarakat akan meningkat, daya beli masyarakat juga meningkat, total agregat *demand* meningkat yang pada akhirnya akan mendorong tumbuhnya investasi lain (*induced investment*).
4. **Keuntungan yang diperoleh perusahaan;** akan mendorong para investor untuk menyediakan sebahagian dari keuntungan yang diperoleh untuk investasi-investasi baru.
5. **Situasi politik suatu negara;** akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi investor terutama pada investor asing, untuk menanamkan modalnya. Mengingat bahwa investasi memerlukan jangka waktu yang relatif lama untuk memperoleh kembali modal yang ditanam dan memperoleh keuntungan sehingga stabilitas politik jangka panjang akan sangat diharapkan oleh para investor.
6. **Kemajuan teknologi;** dengan adanya temuan-temuan teknologi baru (inovasi), maka akan semakin banyak kegiatan pembaharuan yang akan dilakukan oleh investor, sehingga semakin tinggi tingkat efisiensi dari investasi yang dilakukan.
7. **Kemudahan-kemudahan yang diberikan pemerintah;** tersedianya berbagai sarana dan prasarana awal, seperti jalan raya, listrik dan sistim komunikasi akan mendorong para investor untuk menanamkan modalnya di suatu daerah. Disamping itu adanya bentuk insentif yang diberikan pemerintah seperti keringanan-keringanan di dalam perpajakan (*tax holiday*) yaitu suatu keringanan di dalam pembebanan pajak yang diberikan kepada suatu perusahaan yang mau menanamkan modalnya.
8. **Kualitas sumber daya manusia;** Manusia yang berkualitas memiliki daya tarik investasi cukup penting sebab teknologi yang digunakan bagi pengusaha sangat modern sehingga menuntut ketrampilan yang lebih dari tenaga kerja.

9. **Kualitas sumber daya alam dan energi;** adanya sumber daya alam yang melimpah di suatu daerah akan mengundang investor untuk masuk ke daerah tersebut karena keunggulan komparatifnya. Selain itu, ketersediaan energi yang cukup memadai akan merupakan insentif bagi investor untuk menanamkan modalnya. Kecukupan energi baik energi listrik maupun bahan bakar lainnya merupakan syarat utama karena hampir semua proses produksi mensyaratkan kebutuhan energi yang cukup.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kegiatan perencanaan pembangunan yang terkait dengan investasi adalah *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR). Nilai ICOR menunjukkan jumlah investasi baru yang dibutuhkan untuk menaikkan/menambah satu unit output dalam perekonomian suatu wilayah. Besaran ICOR diperoleh dari perbandingan tambahan kapital dengan tambahan output. ICOR tersebut digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dari suatu investasi. Jika koefisien ICOR bernilai negatif atau bernilai relatif besar akan dapat menunjukkan bahwa terjadi *inefficiency* dalam investasi. Kondisi investasi yang efisien akan terjadi pada koefisien ICOR yang nilainya relatif kecil. Namun demikian, untuk menilai tingkat efisiensi suatu investasi juga mempertimbangkan karakteristik perekonomian suatu wilayah apakah bersifat *capital intensive* atau *labor intensive*.

Semakin tinggi nilai ICOR memberikan indikasi kemungkinan terjadinya inefisiensi dalam penggunaan investasi. ICOR yang rendah menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan modal. Efisiensi terjadi akibat adanya perbaikan teknologi, sehingga semakin rendah ICOR maka penggunaan modal semakin efisien dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Arsyad, 1988). Widodo (1990) menyatakan bahwa, produktivitas investasi dapat dikatakan baik apabila nilai ICOR berada pada kisaran 3 - 4.

Investasi merupakan salah satu pilar pertumbuhan ekonomi. Informasi mengenai potensi investasi dan iklim investasi daerah sangat diperlukan investor sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk investasi. Untuk melihat keterkaitan antara investasi dan pertumbuhan ekonomi dapat

menggunakan indikator ICOR. Nilai ICOR dapat merefleksikan besarnya produktivitas kapital yang akan berpengaruh terhadap pencapaian pertumbuhan ekonomi. Kajian mengenai ICOR menjadi sangat penting dan menarik untuk mendorong peningkatan investasi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Kajian tersebut diharapkan dapat mengetahui penyebab tingginya angka ICOR, sehingga dapat dirumuskan rekomendasi bahan kebijakan yang tepat dalam rangka mendorong investasi yang akhirnya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata.

1.2. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pmbangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018;
10. Peraturan Kepala BPS Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
12. Peraturan Gubernur Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Standar Belanja;
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BAPPEDA DIY Nomor:/DPA/2017.

1.3. Ruang Lingkup

1.3.1. Lingkup Materi

Lingkup kegiatan Analisis ICOR Sektoral D.I. Yogyakarta 2013-2017 meliputi:

1. ICOR sektoral D.I. Yogyakarta dan ICOR agregat kabupaten/kota.
2. Tahun data aktual 2013-2017 dan data proyeksi 2018-2022.

1.3.2. Lingkup Wilayah

Penyusunan ICOR Sektoral mencakup seluruh wilayah DIY.

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Maksud dari pekerjaan Analisis ICOR Sektoral D.I. Yogyakarta 2013-2017 adalah untuk menyediakan kajian kebutuhan dan alokasi investasi menurut wilayah maupun menurut sektor sehingga bermanfaat sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan D.I. Yogyakarta.

1.4.2. Tujuan

Tujuan pekerjaan Analisis ICOR Sektoral D.I. Yogyakarta 2013-2017, antara lain untuk:

- a. Menghitung tingkat investasi fisik tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- b. Menyediakan angka ICOR sektoral tingkat provinsi dan ICOR agregat kabupaten/kota;
- c. Menyediakan hasil analisis deskriptif ICOR sektoral tingkat provinsi dan ICOR agregat kabupaten/kota;
- d. Memperkirakan kebutuhan tambahan investasi baru berdasarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- e. Menyediakan rekomendasi sebagai bahan kebijakan dan perencanaan bidang investasi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

1.5. Sasaran dan Keluaran

1.5.1. Sasaran

Tersusunnya dokumen Analisis ICOR Sektor D.I. Yogyakarta 2013-2017.

1.5.2. Keluaran

Dokumen hasil Analisis ICOR Sektor D.I. Yogyakarta 2013-2017 yang mencakup:

- a. Perhitungan tingkat investasi fisik tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- b. Angka ICOR sektoral tingkat provinsi dan ICOR agregat kabupaten/kota;
- c. Hasil analisis ICOR sektoral tingkat provinsi dan ICOR agregat kabupaten/kota;
- d. Perkiraan kebutuhan tambahan investasi baru berdasarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- e. Rekomendasi sebagai bahan kebijakan bidang investasi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

1.6. Pembiayaan

Sumber dana pelaksanaan pekerjaan Analisis ICOR Sektor D.I. Yogyakarta 2013-2017 dibebankan pada APBD D.I. Yogyakarta Tahun Anggaran 2018 (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah D.I. Yogyakarta).



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian ICOR

2.2. Pengertian Investasi

2.3. Pengertian Output

2.4. Pengertian Nilai Tambah

2.5. Penelitian Terdahulu

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian ICOR

Dalam rangka mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi tertentu, sangat diperlukan adanya perkiraan kebutuhan investasi dengan benar. Model Harold-Domar mengaitkan adanya pengaruh tambahan stok kapital terhadap output yang dikenal dengan ICOR. Perhitungan ICOR dibutuhkan dalam menentukan seberapa besar kebutuhan investasi pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tumbuh dan dengan ICOR dapat dilihat seberapa efisien investasi yang ditanamkan pada priode tertentu.

Incremental Capital Output Ratio (ICOR) memiliki peranan yang penting dalam teori ekonomi. ICOR atau rasio kenaikan output akibat kenaikan kapital adalah indikator ekonomi makro yang sering digunakan untuk menilai kinerja investasi di suatu negara. Kegunaan lainnya adalah untuk menghitung besarnya investasi yang dibutuhkan agar perekonomian tumbuh dengan laju yang sudah ditetapkan.

ICOR merupakan suatu besaran yang menunjukkan besarnya tambahan kapital yang dibutuhkan untuk menaikkan/menambah satu unit output dalam perekonomian suatu wilayah. Nilai ICOR diperoleh dari perbandingan antara besarnya tambahan kapital dengan tambahan output. Karena unit kapital bentuknya berbeda-beda dan beraneka ragam sementara unit output relatif tidak berbeda, maka untuk memudahkan penghitungan keduanya dinilai dalam bentuk uang (nominal). ICOR dapat merefleksikan besarnya produktifitas kapital yang pada akhirnya menyangkut besarnya pertumbuhan ekonomi yang bisa dicapai. Tambahan kapital diperoleh dari investasi.

Hubungan ICOR dengan pertumbuhan ekonomi dikembangkan pertama kali oleh **R.F. Harrod** dan **Evsey Domar**. Profesor Evsey Domar, seorang ekonom Amerika Serikat mengembangkan suatu koefisien yang diturunkan dari

suatu rumus tentang pertumbuhan ekonomi. Domar mengemukakan teorinya tersebut pertama kali pada tahun 1947 dalam *American Economic Review*, sedangkan Harrod telah mengemukakannya pada tahun 1939 dalam *Economic Journal*. Teori ini sebenarnya dikembangkan oleh kedua ekonom secara sendiri-sendiri, tetapi karena inti teori tersebut sama, maka sekarang dikenal sebagai teori Harrod-Domar (Arsyad, 1988). Koefisien itu mengaitkan penambahan kapasitas terpasang (*capital*) dengan pertumbuhan ekonomi (output).

Teori Harrod-Domar mempunyai beberapa asumsi sebagai berikut:

- Perekonomian dalam pengerjaan penuh (*full employment*) dan barang-barang modal dalam masyarakat digunakan secara penuh.
- Perekonomian terdiri dari dua sektor, yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Ini berarti dalam analisis dianggap tidak terdapat sektor pemerintah dan sektor luar negeri.
- Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional. Ini berarti fungsi tabungan dimulai dari titik nol.
- Kecenderungan masyarakat untuk menabung (*marginal propensity to save* = MPS) besarnya tetap. Demikian juga rasio antara modal – output (*capital output ratio* = COR) dan rasio pertumbuhan modal-output (*incremental capital output ratio* = ICOR) adalah tetap (Arsyad, 1988).

Dalam model pertumbuhan Harrod-Domar mencakup persamaan sebagai berikut (Hess and Ross, 1997):

$$H1) \quad K = vY \quad \dots\dots\dots (2.1)$$

$$H2) \quad L = uY \quad \dots\dots\dots (2.2)$$

$$H3) \quad I = S \quad \dots\dots\dots (2.3)$$

$$H4) \quad S = sY \quad \dots\dots\dots (2.4)$$

$$H5) \quad \Delta L/L = n \quad \dots\dots\dots (2.5)$$

Berdasarkan persamaan (2.1) dan (2.2) dapat dirumuskan persamaan fungsi produksi sebagai berikut:

$$Y = A \min (K/v, L/u) \dots\dots\dots (2.6)$$

keterangan:

Y	=	Output	S	=	Jumlah tabungan
A	=	Teknologi	v	=	Rasio kapital terhadap output
K	=	Stok kapital	u	=	Rasio tenaga kerja terhadap output
L	=	Jumlah tenaga kerja	s	=	Tingkat tabungan
I	=	Investasi	n	=	Tingkat pertumbuhan tenaga kerja alami

Dengan asumsi $A = 1$, maka untuk memperoleh perubahan output sebesar ΔY diperlukan perubahan input sebagai berikut:

$$H1') \Delta K = v\Delta Y \dots\dots\dots (2.7)$$

$$H2') \Delta L = u\Delta Y \dots\dots\dots (2.8)$$

Dengan membagi persamaan (2.7) dengan (2.1) dan persamaan (2.8) dengan (2.2) akan diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$\Delta K/K = v\Delta Y/vY = \Delta Y/Y \dots\dots\dots (2.9)$$

$$\Delta L/L = u\Delta Y/uY = \Delta Y/Y \dots\dots\dots (2.10)$$

keterangan:

$\Delta Y/Y$ = laju pertumbuhan output

$\Delta K/K$ = laju pertumbuhan kapital

$\Delta L/L$ = laju pertumbuhan tenaga kerja

Dalam perekonomian sederhana tanpa campur tangan pemerintah dan perdagangan luar negeri, pada kondisi keseimbangan pasar barang maka $I = S$.

Tabungan diperoleh dari output yang tidak dikonsumsi. Dengan demikian, Investasi adalah bagian output yang tidak dikonsumsi.

Dari persamaan (2.3), (2.4), dan (2.7) dapat diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$\Delta K = I = S = sY \dots\dots\dots (2.11)$$

$$v\Delta Y = \Delta K = I = S = sY \dots\dots\dots (2.12)$$

$$v\Delta Y = sY \dots\dots\dots (2.13)$$

$$v\Delta Y/vY = sY/vY \dots\dots\dots (2.14)$$

$$\Delta Y/Y = s/v \dots\dots\dots (2.15)$$

Teori Harrod-Domar tersebut mempunyai kelemahan, yaitu:

- Anggapan bahwa MPS dan ICOR konstan adalah anggapan yang terlalu kaku mengingat dalam jangka panjang mungkin sekali kedua variabel tersebut berubah.
- Teori Harrod-Domar beranggapan proporsi penggunaan tenaga kerja dan modal tetap. Anggapan ini tidak dapat dipertahankan mengingat pada kenyataannya hubungan antara tenaga kerja dan modal tidak selalu dalam proporsi yang tetap.
- Model Harrod-Domar mengabaikan perubahan-perubahan harga pada umumnya. Padahal perubahan harga selalu terjadi di setiap waktu dan sebaliknya dapat mengendalikan situasi ekonomi yang tidak stabil.
- Asumsi bahwa suku bunga tidak berubah adalah tidak relevan dengan analisis yang bersangkutan. Suku bunga dapat berubah dan pada akhirnya akan mempengaruhi investasi.

Pada dasarnya teori tentang ICOR dilandasi oleh dua macam konsep yaitu:

- Rasio Modal – Output** atau *Capital Output Ratio (COR)* atau sering disebut sebagai *Average Capital Output Ratio (ACOR)*, yaitu

perbandingan antara modal yang digunakan dengan output yang dihasilkan pada suatu periode tertentu. ICOR atau ACOR ini bersifat statis karena hanya menunjukkan besaran yang menggambarkan perbandingan modal dan output.

- (ii) **Rasio Modal – Output Marginal** atau *Incremental Capital Output Ratio (ICOR)*, yaitu suatu besaran yang menunjukkan besarnya tambahan modal (investasi) baru yang dibutuhkan untuk menaikkan/menambah satu unit output baik secara fisik maupun secara nilai (uang). Konsep ICOR ini lebih bersifat **dinamis** karena menunjukkan perubahan /penambahan output sebagai akibat langsung dari penambahan modal.

Dari pengertian pada butir (ii), maka ICOR bisa diformulasikan sebagai berikut:

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} \dots\dots\dots (2.16)$$

keterangan:

ΔK = investasi, atau penambahan barang modal baru/kapasitas terpasang

ΔY = pertambahan output

Contoh:

Diketahui bahwa koefisien ICOR di suatu daerah sebesar 5. Artinya untuk meningkatkan output satu unit diperlukan investasi sebesar 5 unit. Jika output di daerah itu pada tahun sebelumnya sebesar Rp. 4 miliar, maka agar output pada tahun yang akan datang tumbuh 10 persen, atau bertambah sebesar Rp. 0,4 miliar, dibutuhkan investasi sebesar: 5 x Rp. 0,4 miliar = Rp. 2 miliar.

Dalam perkembangannya, data yang digunakan untuk menghitung ICOR bukan lagi hanya penambahan barang modal baru atau perubahan stok modal, melainkan Investasi (I) yang ditanam baik oleh swasta maupun pemerintah sehingga rumusan ICOR dimodifikasi menjadi:

$$ICOR = \frac{I}{\Delta Y} \dots\dots\dots (2.17)$$

keterangan:

I = Investasi

ΔY = perubahan output

Peningkatan output tidak hanya disebabkan oleh investasi, tetapi juga oleh faktor-faktor lain di luar investasi seperti: pemakaian tenaga kerja, penerapan teknologi, dan kemampuan kewiraswastaan. Dengan demikian, untuk melihat peranan investasi terhadap output berdasarkan konsep ICOR, maka peranan faktor-faktor selain investasi diasumsikan konstan (*ceteris paribus*).

2.2. Pengertian Investasi

Investasi sangat diperlukan dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah. Untuk menghasilkan output, selain membutuhkan bahan baku dan tenaga kerja juga diperlukan barang modal yang digunakan dalam proses produksi. Dengan investasi diharapkan dapat menambah stok kapital dan pada gilirannya akan meningkatkan kapasitas produksi. Dengan demikian, output dan pendapatan masyarakat akan meningkat. Dalam jangka panjang akumulasi investasi dapat mendorong perkembangan berbagai aktivitas ekonomi sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah/negara.

Pemahaman kondisi tersebut memberikan pengertian pentingnya informasi investasi. Berdasarkan *System of National Accounts* (SNA), besarnya investasi yang direalisasikan di suatu wilayah/negara pada suatu tahun tertentu adalah sama dengan jumlah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ditambah perubahan inventori/stok. SNA adalah buku panduan yang diterbitkan oleh *United Nations* (PBB) mengenai penyusunan neraca nasional. PMTB menggambarkan investasi fisik domestik yang telah direalisasikan pada suatu tahun tertentu dalam bentuk berbagai jenis barang kapital, seperti: bangunan,

mesin-mesin, alat-alat transportasi, dan barang modal lainnya; sedangkan inventori/stok meliputi output setengah jadi, atau input yang belum digunakan, termasuk juga barang jadi yang belum dijual. Inventori/stok termasuk dalam modal kerja yang merupakan bagian investasi yang direncanakan. Perubahan inventori merupakan selisih antara stok akhir dengan stok awal pada suatu periode tertentu.

Investasi dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu: fisik, finansial, dan sumber daya manusia (SDM). Investasi yang berwujud fisik dapat berupa: jalan, jembatan, gedung, kantor, mesin-mesin, mobil dan sebagainya. Investasi finansial dapat berupa: pembelian surat berharga, pembayaran premi asuransi, penyertaan modal dan investasi keuangan lainnya. Sedangkan investasi SDM dapat berupa pendidikan dan pelatihan. Dalam kajian ini, lebih ditekankan pada investasi fisik.

Konsep investasi yang digunakan dalam penghitungan ICOR mengacu pada konsep ekonomi nasional. Pengertian investasi adalah pembentukan barang modal tetap (*fixed capital formation*) yang terdiri dari: tanah, gedung/konstruksi, mesin dan perlengkapannya, kendaraan, dan barang modal lainnya. Sementara itu, nilai pembentukan modal mencakup:

- a. Pembelian barang baru dan barang bekas dari luar negeri,
- b. Pembuatan/perbaikan besar yang dilakukan pihak lain,
- c. Pembuatan/perbaikan besar yang dilakukan sendiri,
- d. Penjualan barang modal bekas.

Total nilai investasi diperoleh dari penjumlahan seluruh pembelian barang modal baru/bekas, pembuatan/perbaikan besar yang dilakukan oleh pihak lain dan sendiri dikurangi penjualan barang modal bekas.

2.2.1. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang

modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

Secara lebih rinci PMTB terdiri dari:

- a. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin dan perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidayakan (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagainya;
- b. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
- c. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya (seperti overhaul mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

PMTB dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. PMTB menurut jenis barang modal

PMTB menurut jenis barang modal dapat dibedakan atas:

- 1) Pembentukan modal berupa bangunan, yaitu: bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, dan bangunan lainnya seperti: jalan raya, instalasi listrik, jaringan komunikasi, bendungan, pelabuhan, dan sebagainya.
- 2) Pembentukan modal berupa mesin, seperti: mesin pertanian, mesin pertambangan, mesin industri, dan alat perabot serta perlengkapan untuk kantor, hotel, dan restoran.
- 3) Pembentukan modal berupa alat angkutan seperti: mobil, bus, truk, kapal laut, pesawat, sepeda motor, dan sebagainya.
- 4) [Keterangan: yang dimaksud dalam PMTB adalah barang-barang modal yang digunakan untuk keperluan pabrik, kantor maupun usaha rumah tangga, tetapi tidak termasuk yang digunakan untuk konsumsi (*durable goods*)].
- 5) Barang modal lainnya seperti: perluasan hutan; pengembangan/perluasan lahan; penanaman kembali hutan; ternak untuk pembiakan, pemerahan susu atau sebagai alat angkutan; perluasan areal pertambangan; dan sebagainya.

b. PMTB menurut Lapangan Usaha

Klasifikasi PMTB menurut lapangan usaha adalah sebagai berikut:

- 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
- 2) Pertambangan dan penggalian
- 3) Industri pengolahan
- 4) Pengadaan Listrik dan Gas
- 5) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
- 6) Konstruksi
- 7) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
- 8) Transportasi dan Pergudangan
- 9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

- 10) Informasi dan Komunikasi
- 11) Jasa Keuangan dan Asuransi
- 12) Real Estate
- 13) Jasa Perusahaan
- 14) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib
- 15) Jasa Pendidikan
- 16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
- 17) Jasa lainnya

c. PMTB menurut Institusi

PMTB menurut institusi dibedakan atas tiga kelompok berikut:

- 1) Pemerintah. Yang dimaksud dengan pemerintah disini adalah pemerintah yang menyelenggarakan *general administration*, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pengeluaran PMTB oleh pemerintah misalnya untuk membangun gedung kantor, pembelian mesin-mesin, komputer untuk menyelenggarakan tugas pemerintah sebagai *administration*, termasuk juga bila pemerintah mengeluarkan biaya untuk kepentingan masyarakat yang bersifat infrastruktur, seperti: jalan raya, pembangunan irigasi, dan sebagainya.
- 2) Korporasi/Perusahaan Swasta termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dalam kategori ini hanya pengeluaran investasi yang benar-benar dikuasai BUMN/BUMD, tetapi tidak termasuk pengeluaran biaya oleh pemerintah pada butir a. di atas. Kegiatan yang dicakup perusahaan meliputi sektor finansial dan nonfinansial.
- 3) Rumah tangga dan Lembaga Swasta Nirlaba. Kegiatan membangun rumah baru atau memperbaiki rumah milik sendiri secara besar-besaran dianggap sebagai bagian dari pembentukan modal. Hal ini sesuai dengan keharusan meng-imputasi sewa rumah penduduk (rumah tangga) baik milik sendiri maupun rumah dinas.

2.2.2. Perubahan Inventori

Dalam PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna pertambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sebagai berikut:

- 1) Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- 2) Berbagai jenis bahan baku dan penolong (*material and supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- 3) Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama

seperti pada waktu dibeli;

- 4) Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
- 5) Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- 6) Ternak untuk tujuan dipotong;
- 7) Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
- 8) Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

2.3. Pengertian Output

Output diartikan sebagai seluruh nilai produk barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh berbagai sektor produksi. Dengan kata lain, output merupakan "keluaran" atau hasil yang diperoleh dari pendayagunaan seluruh faktor produksi baik berbentuk barang atau jasa seperti: tanah, tenaga kerja, modal dan kewiraswastaan. Dari segi ekonomi nasional, output merupakan nilai dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi domestik dalam suatu periode tertentu.

Dari segi perusahaan, output mencakup nilai barang (komoditi) jadi yang dihasilkan selama suatu periode tertentu ditambah nilai perubahan inventori/stok barang (komoditi) yang masih dalam proses. Output yang dimaksud adalah:

- a. Barang-barang yang dihasilkan.
- b. Tenaga listrik yang dijual.
- c. Selisih nilai stok setengah jadi.

Output ini dihitung atas dasar harga produsen, yaitu harga yang diterima oleh produsen pada tingkat transaksi pertama. Karena masih mengandung nilai penyusutan barang modal, output ini masih bersifat bruto. Untuk mendapatkan output neto atas harga pasar, output bruto atas harga pasar harus dikurangi dengan penyusutan barang modal.

Dalam pengertian ICOR, output adalah tambahan produk dari hasil kegiatan ekonomi dalam suatu periode atau nilai-nilai yang merupakan hasil pendayagunaan faktor-faktor produksi. Output ini merupakan seluruh nilai tambah atas dasar biaya faktor produksi yang dihasilkan dari seluruh kegiatan usaha. Seluruh output yang dihasilkan dinilai atas dasar harga produsen. Output juga merupakan nilai perolehan produsen atas kegiatan ekonomi produksinya.

2.4. Pengertian Nilai Tambah Bruto

Konsep Nilai Tambah Bruto berkaitan erat dengan konsep penghitungan output. Nilai Tambah Bruto (NTB) adalah nilai seluruh balas jasa faktor produksi yang meliputi upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tidak langsung (neto). Dengan kata lain, nilai tambah adalah suatu tambahan nilai pada nilai input antara yang digunakan dalam proses menghasilkan barang/jasa. Nilai input antara tersebut bertambah karena input antara tersebut telah mengalami proses produksi yang mengubahnya menjadi barang yang nilainya lebih tinggi. Sedangkan input antara mencakup nilai seluruh komoditi yang habis atau dianggap habis dalam suatu proses produksi, seperti: bahan baku, bahan bakar, pemakaian listrik, dan sebagainya. Barang yang digunakan sebagai alat dalam suatu proses produksi dan umurnya kurang dari setahun dan habis dipakai dimasukkan sebagai input antara (bukan barang modal).

Penghitungan nilai tambah bruto atas dasar harga pasar dari suatu unit produksi adalah output bruto atas dasar harga produsen dikurangi input antara atas dasar harga pasar. Karena keterbatasan data penyusutan barang modal dan

pajak tak langsung, maka pendekatan nilai tambah bruto inilah yang dipakai untuk penghitungan ICOR ini.

2.5. Penelitian Terdahulu

Kajian tentang ICOR telah dilakukan beberapa kali. Badan Pusat Statistik telah melakukan penghitungan ICOR Sektor Industri Pengolahan pada tahun 1983, 1993, dan 1994 dengan menggunakan hasil survei tahunan Industri Besar dan Sedang. Hasil penghitungan tahun 1983 dan 1993 tidak dipublikasikan, sementara hasil penghitungan tahun 1994 telah dipublikasikan. Penghitungan ICOR tahun 1983 menggunakan series data tahun 1975-1981; kemudian pada tahun 1993 menggunakan series data tahun 1985-1990; dan pada penghitungan tahun 1994 menggunakan series data tahun 1980-1990. Ketiga penghitungan ICOR tersebut dilakukan untuk klasifikasi jenis barang 2 dan 3 digit ISIC.

Sebelum tahun 1985, Survei Tahunan Industri Besar dan Sedang mengalami lewat cacah sehingga terjadi "*under coverage*" untuk jumlah perusahaan. Dalam mengatasi hal tersebut, BPS telah melakukan *backcasting* terhadap jumlah perusahaan agar cakupannya lebih lengkap. Pada penghitungan ICOR kedua (periode 1985-1990) telah digunakan nilai output sektor industri yang di-*backcast* sesuai dengan jumlah perusahaannya. Namun nilai investasi yang digunakan belum disesuaikan dengan cakupan yang lebih lengkap, sehingga nilai ICOR yang diperoleh relatif sangat rendah yang berkisar antara 1 sampai 2. Sebaliknya, pada penghitungan ICOR ketiga (periode 1980-1990) telah dilakukan *backcasting* terhadap nilai output dan investasi sehingga cakupan datanya sama, hal ini berpengaruh pada besaran ICOR yang dihasilkan relatif lebih baik.

Agar diperoleh satu nilai ICOR yang dapat mewakili suatu periode waktu untuk masing-masing klasifikasi industri digunakan penghitungan dengan rata-rata sederhana. Rumus yang digunakan pada penghitungan ICOR pertama dan kedua sebanyak 12 rumus standar. Sedangkan pada penghitungan ICOR sektor

industri yang ketiga digunakan sebanyak 15 rumus standar yang juga digunakan pada penghitungan ICOR dalam publikasi ini. Sebagai pembanding, pada penghitungan ICOR ketiga dilakukan pula penghitungan berdasarkan akumulasi investasi dengan *lag* 0 yang pada dasarnya menerapkan prinsip rata-rata tertimbang. Selain itu pada penghitungan ICOR ketiga ini juga dilakukan penghitungan ICOR yang memperhitungkan selisih stok bahan baku, barang jadi, dan barang setengah jadi.

Pada penghitungan ICOR yang pertama dan kedua digunakan nilai output dan nilai investasi sektor industri pengolahan sebagai data dasar. Namun pada penghitungan ICOR ketiga digunakan nilai tambah sebagai proksi dari variabel output, dan *gross fixed capital formation* (pembentukan modal tetap bruto) sebagai proksi dari variabel investasi. Penggunaan variabel nilai tambah bruto sebagai proksi dari output dilakukan untuk menghindari *double counting*, karena output suatu kegiatan bisa merupakan input dari kegiatan lainnya. Nilai tambah yang digunakan dalam penghitungan ini adalah seluruh nilai output yang telah dikurangi dengan seluruh input/biaya antara. Selanjutnya, komponen nilai tambah yang bukan merupakan hasil pendayagunaan barang modal dikeluarkan dari seluruh nilai tambah.

Data sektor industri pengolahan skala besar dan sedang yang digunakan dalam penghitungan ICOR ini merupakan data menurut harga berlaku sehingga masih terpengaruh oleh inflasi. Oleh karena itu, untuk mendapatkan data/nilai menurut harga konstan digunakan suatu indeks sebagai deflator.

Pada penghitungan ICOR pertama digunakan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) sebagai deflator untuk nilai output pada masing-masing kode industri. Sementara deflator untuk nilai investasi pada penghitungan ICOR pertama adalah IHPB barang-barang modal yang dihitung berdasarkan data yang dikumpulkan melalui Survei Khusus Barang Modal.

Pada penghitungan ICOR kedua dan ketiga, deflator yang digunakan untuk nilai output masih sama dengan penghitungan ICOR pertama, yaitu dengan menggunakan IHPB untuk masing-masing kode ISIC industri. Sedangkan

deflator untuk investasi adalah rata-rata tertimbang IHPB dari kode ISIC 382 (industri mesin bukan mesin listrik), 383 (industri mesin listrik dan perlengkapannya), 384 (industri alat angkutan), dan 390 (industri lainnya) dengan penimbang output dari masing-masing kode di atas.

Penghitungan ICOR di D.I. Yogyakarta telah dilakukan sepuluh kali oleh BPS, yaitu pada tahun 2003, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, dan 2017 bekerja sama dengan Bappeda D.I. Yogyakarta. Pada tahun 2003 penghitungan ICOR mencakup rentang waktu 1998-2002, pada tahun 2009 mencakup rentang waktu 2004-2008, dan seterusnya hingga tahun 2017 mencakup rentang waktu 2012-2016. Metode yang digunakan dalam penghitungan ICOR adalah metode standar dan metode akumulasi. Variabel investasi direpresentasikan dalam Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Perhitungan ICOR dilakukan dengan pendekatan investasi sama dengan PMTB dan memasukkan perubahan inventori, serta tanpa memperhitungkan perubahan inventori.

Penyusunan ICOR sektoral tahun 2003-2015 mengacu pada klasifikasi PDRB yang terdiri dari 9 sektor ekonomi. Penyusunan ICOR D.I. Yogyakarta tahun 2003 menggunakan data PDRB dengan tahun dasar 1993, ICOR sektoral tahun 2009-2015 menggunakan data PDRB dengan tahun dasar 2000, dan sisanya menggunakan data PDRB tahun dasar 2010 dengan klasifikasi 17 kategori lapangan usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum sektor ekonomi DIY yang mempunyai nilai ICOR relatif rendah adalah sektor pertanian; sektor pertambangan dan penggalian; serta sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Sedangkan sektor yang memiliki nilai ICOR tinggi adalah sektor listrik, gas, dan air bersih dan sektor pengangkutan dan komunikasi. Hasil kajian ICOR sektoral tahun 2017 menunjukkan bahwa lapangan usaha pertanian, jasa keuangan dan asuransi, serta pertambangan dan penggalian mempunyai nilai ICOR yang relatif rendah. Sedangkan lapangan usaha pengadaan listrik dan gas serta lapangan usaha transportasi dan pergudangan mempunyai ICOR yang relatif tinggi. Kondisi ini hampir sama dengan hasil kajian ICOR pada tahun 2016.

A decorative scroll graphic with a light gray background and a black outline. The scroll is partially unrolled, with the top and bottom edges showing a darker gray shadow. The text is centered within the unrolled portion.

BAB III

METODOLOGI

3.1. Sumber Data

**3.2. Estimasi PMTB menurut
Lapangan Usaha**

**3.3. Penghitungan Pertambahan
Output menurut Lapangan Usaha**

3.4. Metodologi Penghitungan ICOR

3.5. Indeks Perkembangan

BAB III

METODOLOGI

3.1. Sumber Data

Dalam penyusunan ICOR sektoral D.I. Yogyakarta 2013-2017, data yang digunakan bersumber dari hasil sensus dan survei-survei yang dilakukan oleh BPS. Data tersebut antara lain: Sensus Ekonomi 2016, Survei Tahunan Industri Besar/Sedang, Survei Tahunan Perusahaan Air Minum, Survei Tahunan Konstruksi, Survei Khusus Pendapatan Regional, Survei Khusus Tabungan dan Investasi Rumah Tangga, Survei Angkatan Kerja Nasional, serta survei lainnya yang relevan. Selain itu, digunakan juga data dari penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik menurut lapangan usaha (*by industry*) maupun menurut pengeluaran (*by expenditure*). Penyusunan ICOR sektoral D.I. Yogyakarta 2013-2017 menggunakan data PDRB dengan tahun dasar 2010. Pemanfaatan hasil sensus dan survei ini dilakukan karena penghitungan ICOR memerlukan sumber dan cakupan data yang cukup luas. Sebagai referensi, digunakan juga sumber data sekunder yang diperoleh dari Bappeda Bidang Investasi/Badan Kerja sama dan Penanaman Modal Daerah (BKPMMD) berupa data investasi PMA/PMDN yang disetujui maupun realisasi, dan Bank Indonesia Yogyakarta berupa data kredit investasi.

3.2. Estimasi PMTB menurut Lapangan Usaha

PMTB dihitung atas dasar harga konstan 2010 karena pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan. Penghitungan PMTB menurut lapangan usaha menggunakan metode alokasi. Sebagai alokator adalah nilai penyusutan masing-masing sektor yang diperoleh pada penghitungan PDRB atas dasar harga konstan, sedangkan total investasi dihitung dari jumlah PDRB yang digunakan untuk pembentukan modal tetap bruto dan perubahan inventori.

Nilai penyusutan digunakan sebagai alokator berdasarkan pada pemikiran bahwa penyusutan barang modal tetap yang terjadi pada tahun tertentu akan dipakai untuk investasi pada tahun itu juga. Ini berarti bahwa investasi mempunyai hubungan linier dengan nilai penyusutan sehingga lapangan usaha yang mempunyai nilai penyusutan besar akan memiliki investasi yang besar pula.

3.3. Penghitungan Pertambahan Output menurut Lapangan Usaha

Penghitungan pertambahan output (ΔY) didekati dengan pertambahan nilai tambah bruto (ΔNTB) menurut lapangan usaha. Sebagai contoh, peningkatan output pertanian tahun 2017 didekati dengan pengurangan nilai tambah pertanian pada tahun 2017 atas dasar harga konstan dengan nilai tambah pertanian pada tahun 2016 atas dasar harga konstan. Dengan perlakuan yang sama, pertambahan output menurut lapangan usaha dihitung sebagai pertambahan NTB menurut lapangan usaha.

Pendekatan di atas dilakukan karena data NTB tersedia dengan *time series* yang cukup panjang diturunkan dari penghitungan PDRB menurut lapangan usaha. Selain itu, untuk beberapa lapangan usaha yang outputnya berupa jasa, maka penghitungan nilai tambah akan lebih mudah dan lebih tepat.

3.4. Metode Penghitungan ICOR

Ada dua metode penghitungan ICOR yang digunakan, yaitu metode standar dan metode akumulasi investasi. Untuk tujuan keterbandingan, investasi didekati dengan dua cara, yaitu identik dengan PMTB dengan dan tanpa memperhitungkan Perubahan Inventori. Penghitungan ICOR periode 2013-2017 dibatasi hanya dengan menggunakan metode standar lag 0, lag 1, dan lag 2, sedangkan untuk metode akumulasi hanya lag 0 saja.

3.4.1. Metode Standar

Secara matematis rumus yang digunakan untuk menghitung ICOR adalah:

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} \dots\dots\dots (3.1)$$

keterangan :

ΔK = penambahan kapital/barang modal baru/kapasitas terpasang

ΔY = penambahan output

Dalam praktek, data yang diperoleh bukan penambahan barang modal baru atau penambahan kapasitas terpasang, melainkan besarnya realisasi nilai investasi yang ditanam baik oleh Pemerintah maupun Swasta. Sehingga dengan mengasumsikan $\Delta K = I$ (investasi), maka rumus (3.1) dapat dimodifikasi menjadi:

$$ICOR = \frac{I}{\Delta Y} \dots\dots\dots (3.2)$$

Rumus (3.2) ini disebut dengan **Gross ICOR**, yaitu suatu rasio yang menunjukkan besarnya tambahan unit kapital yang diperlukan untuk memperoleh tambahan satu unit output pada suatu periode tertentu. Dalam penerapannya rumus *Gross ICOR* ini lebih sering dipakai karena data yang digunakan tersedia relatif lebih lengkap.

Dalam beberapa hal untuk kasus-kasus tertentu, investasi yang ditanamkan pada suatu tahun akan langsung menghasilkan tambahan output pada tahun itu juga, sehingga rumus (3.2) di atas dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$ICOR = \frac{I_t}{(Y_t - Y_{t-1})} \dots\dots\dots (3.3)$$

keterangan :

I = investasi pada tahun ke-t

Y_t = output pada tahun ke-t

Y_{t-1} = output pada tahun t-1

Rumus (3.3) di atas dapat diartikan bahwa investasi yang ditanamkan pada tahun ke- t akan menimbulkan output pada tahun t itu juga.

Pada metode standar, langkah penghitungan dilakukan terlebih dahulu dengan mencari ICOR pada masing-masing tahun untuk periode waktu t_1 sampai t_n , sehingga akan didapatkan nilai ICOR sebanyak n buah. ICOR yang dianggap dapat mewakili untuk periode waktu tersebut (t_1 s.d t_n) diperoleh dengan jalan membagi antara jumlah nilai ICOR selama periode waktu t_1 s.d t_n dengan jumlah tahun (n), atau dengan mencari rata-rata nilai ICOR selama periode t_1 sampai dengan t_n .

Prinsip dari penghitungan ICOR metode standar ini adalah rata-rata sederhana dan penulisannya secara matematis sebagai berikut:

$$ICOR = \frac{1}{n} \sum \frac{I_t}{(Y_t - Y_{t-1})} \dots\dots\dots (3.4)$$

Kelemahan dari penggunaan rata-rata sederhana ini adalah jika terjadi suatu koefisien ICOR yang ekstrim pada tahun-tahun tertentu, maka koefisien ini berpengaruh pada nilai rata-rata koefisien ICOR dalam periode waktu penghitungan. Namun demikian, penggunaan metode standar ini mempunyai daya tarik lain yaitu mampu mencerminkan *inefficiency* yang sering terjadi dalam praktek.

3.4.2. Metode Akumulasi

Pendekatan penghitungan ICOR dengan metode akumulasi berdasarkan suatu anggapan bahwa timbulnya kenaikan output selama periode waktu referensi (t_1 s.d. t_n) disebabkan karena adanya akumulasi investasi pada periode yang sama.

Perumusan ICOR dengan metode ini adalah rasio antara akumulasi investasi terhadap akumulasi peningkatan output selama periode waktu t_1 sampai t_n yang secara matematis dituliskan sebagai berikut:

$$ICOR = \frac{\sum I_t}{\sum (Y_t - Y_{t-1})} \dots\dots\dots (3.5)$$

Kelebihan dari metode akumulasi adalah, dalam penerapannya metode ini terkandung prinsip rata-rata tertimbang. Dengan digunakannya rata-rata tertimbang, maka koefisien ICOR ekstrim yang terjadi pada tahun-tahun tertentu bisa dihindari. Tetapi, metode akumulasi ini tidak memperhitungkan kapasitas terpasang yang berlebih dan tidak dimanfaatkan secara penuh. Dengan kata lain, metode akumulasi relatif kurang mampu mencerminkan *inefficiency*, yang memang terjadi dalam praktek.

3.4.3. *Time lag* Investasi

Biasanya investasi yang ditanam pada tahun tertentu tidak secara langsung memberikan hasil tambahan output pada tahun itu juga, tetapi memerlukan waktu beberapa tahun lagi. Rentang waktu yang diperlukan agar penanaman investasi dapat menghasilkan tambahan output disebut *time lag (lag)*.

Jika investasi yang ditanam pada tahun ke- t baru menimbulkan kenaikan output setelah s tahun, maka rumus (4) di atas (ICOR metode standar) dengan adanya faktor *time lag* dapat dimodifikasi menjadi:

$$ICOR = \frac{1}{n} \sum \frac{I_t}{(Y_{t+s} - Y_{t+s-1})} \dots\dots\dots (3.6)$$

keterangan :

time lag = 0, 1, 2, 3, 4, dst

s = Lama waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh hasil/output terhitung sejak penanaman investasi.

3.4.4. Koefisien ICOR Negatif

Koefisien ICOR negatif dapat terjadi jika output pada suatu waktu tertentu lebih kecil dari pada tahun sebelumnya. Penurunan output terjadi jika ada sebagian barang modal dijual, rusak atau tidak diaktifkan karena alasan tertentu. Walaupun mungkin ada penambahan barang modal baru, tetapi barang modal baru tersebut sementara belum memproduksi atau telah memproduksi tetapi output yang dihasilkan relatif sangat kecil dibandingkan dengan output tahun sebelumnya. Sehingga selisih output antara tahun ditanamkannya investasi dengan tahun sebelumnya bernilai negatif. Pada gilirannya koefisien ICOR menjadi negatif. Dengan demikian, penanaman barang modal baru belum menghasilkan output secara optimal, atau bisa dikatakan investasi yang ditanamkan belum/tidak efisien pada saat itu. Tetapi jika ada penambahan/penggantian barang modal, maka tidak bisa dikatakan bahwa telah terjadi *inefficiency*. Namun demikian secara makro keadaan yang disebutkan terakhir ini jarang terjadi.

3.4.5. Koefisien ICOR yang Besar dan Positif

Koefisien ICOR yang relatif besar terjadi jika nilai investasi yang ditanamkan pada tahun tertentu relatif besar, sedangkan output yang dihasilkan lebih besar tetapi hampir sama dengan output pada tahun sebelumnya, atau tambahan output yang dihasilkan relatif kecil. Koefisien ICOR yang besar juga bisa terjadi pada lapangan usaha yang bersifat *capital intensive*.

3.4.6. Asumsi Dasar

Walaupun pertambahan output sebenarnya bukan hanya disebabkan oleh investasi, tetapi juga oleh faktor-faktor lain di luar investasi, dalam penghitungan ICOR ini digunakan asumsi bahwa tidak ada faktor lain yang mempengaruhi output selain investasi, dengan kata lain faktor-faktor lain di luar investasi dianggap

konstan (*ceteris paribus*). Jadi perubahan/kenaikan output hanya disebabkan oleh adanya perubahan kapital/investasi.

Output dari suatu kegiatan ekonomi merupakan input antara untuk kegiatan ekonomi lainnya, sehingga jika digunakan konsep output dalam penghitungan ICOR dirasakan kurang tepat karena akan terjadi penghitungan ganda (*double counting*), yaitu output dari suatu perusahaan akan dihitung kembali sebagai input perusahaan lainnya. Untuk menghindari hal tersebut, maka dalam penghitungan ICOR digunakan **konsep Nilai Tambah**.

Konsep Nilai Tambah (*Value Added*) yang digunakan dalam penghitungan ICOR ini selanjutnya dinamakan dengan istilah **ICVAR (*Incremental Capital Value Added Ratio*)**. Meskipun demikian, ukuran ICVAR ini juga digunakan untuk memprediksi suatu rasio investasi terhadap output menurut lapangan usaha, dan bukannya terhadap nilai tambah semata.

ICOR yang disajikan telah memperhitungkan perubahan inventori (selisih stok) baik bahan baku, barang setengah jadi, maupun barang jadi. Dalam pendekatan mikro, umumnya perusahaan diasumsikan tidak melakukan penimbunan atau akumulasi stok barang untuk kelancaran produksi. Dalam pendekatan makro, perusahaan dianggap telah membuat keputusan akumulasi stok dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi yang akan datang. Misalnya, dalam hal ada kecenderungan bahan baku akan melonjak, perusahaan dapat mengambil keputusan melakukan akumulasi stok bahan baku dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi mendatang. Penghitungan ICOR di sini, menggunakan pendekatan makro, dengan menganggap perubahan inventori/stok sebagai bagian dari pembentukan modal (investasi).

Beberapa asumsi lainnya yang dipakai dalam penyusunan ICOR ini adalah:

1. Perubahan output semata-mata hanya disebabkan oleh perubahan kapital/adanya investasi.
2. Faktor-faktor lain di luar investasi, seperti pemakaian tenaga kerja, penerapan teknologi dan kemampuan wiraswasta diasumsikan konstan.

Dengan asumsi-asumsi di atas angka ICOR mempunyai keterbatasan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tidak mampu menjelaskan penyebab pertumbuhan ekonomi, apakah dipengaruhi oleh pertumbuhan faktor produksi atau tingkat produktivitasnya.
2. Tidak mampu menjelaskan besaran peranan faktor di luar perubahan kapital dalam penciptaan pertumbuhan ekonomi.
3. Proses penghitungan ICOR yang optimal sebaiknya menggunakan periode referensi yang panjang misalnya 10 tahun ke atas, karena pembentukan modal bersifat akumulatif. Dalam kajian ini hanya dibatasi selama periode 2013-2017.

3.5. Indeks Perkembangan Agregat PDRB

Indeks Perkembangan Agregat PDRB menunjukkan tingkat perkembangan agregat PDRB dari tahun ke tahun dibandingkan dengan tahun dasarnya. Indeks ini diperoleh dengan membagi nilai PDRB menurut lapangan usaha pada masing-masing tahun dengan nilai pada tahun dasar, dikalikan 100. Indeks perkembangan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$IP = \frac{PDRB_{it}}{PDRB_{i0}} \times 100\% \dots\dots\dots (3.7)$$

keterangan :

IP = Indeks Perkembangan

i = lapangan usaha 1, ..., n

t = tahun t

0 = tahun dasar

A decorative scroll frame with a light gray background and a black border. The frame has rounded corners and a small gray tab on the left side.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

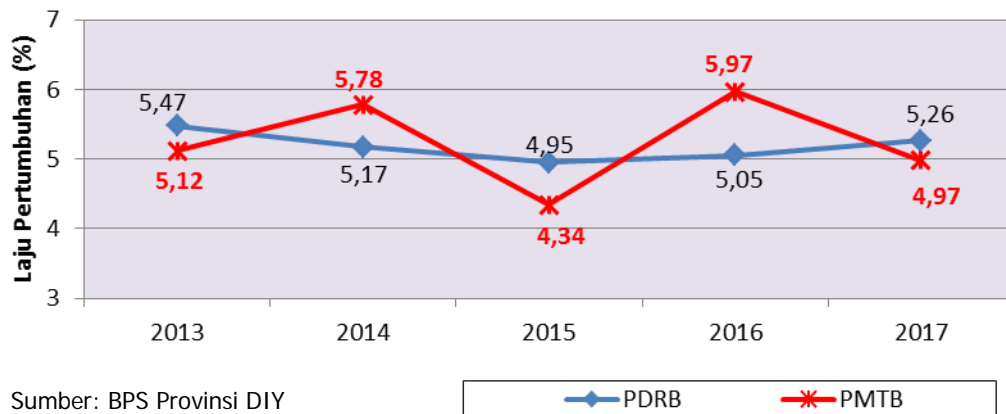
- 4.1. Pertumbuhan Ekonomi
- 4.2. Perkembangan Investasi
- 4.3. Struktur Investasi
- 4.4. Angka ICOR D.I. Yogyakarta
- 4.5. Kebutuhan dan Pilihan Investasi
- 4.6. Hubungan ICOR, GDI, GDS, LPE
dan Inflasi

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian wilayah secara riil. Secara sederhana, laju pertumbuhan ekonomi adalah pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu (biasanya satu tahun).

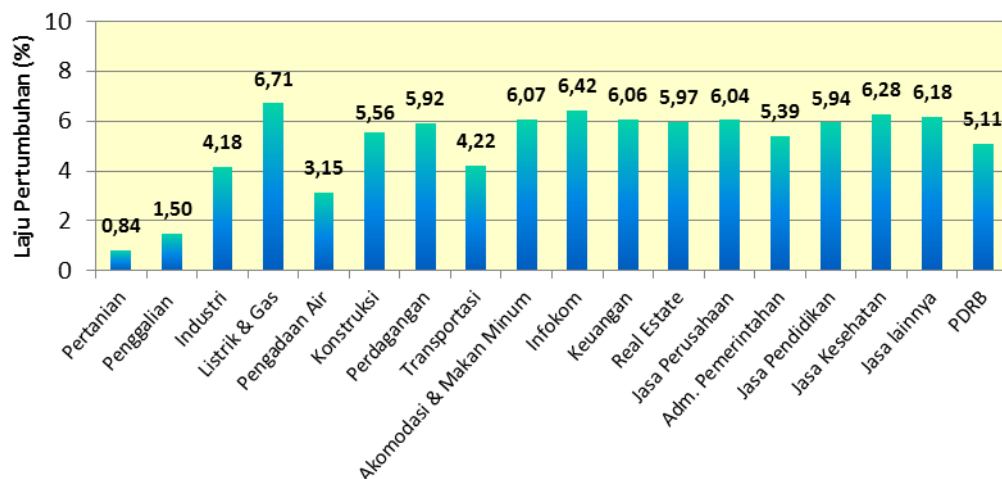


Gambar 4.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan PMTB D.I. Yogyakarta, 2013-2017 (persen)

Laju pertumbuhan ekonomi D.I. Yogyakarta sempat mengalami perlambatan selama periode 2013-2015, namun kembali mengalami akselerasi pada periode 2016-2017 ditunjukkan dengan peningkatan besaran pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2013 laju pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,47 persen, kemudian melambat hingga menjadi 4,95 persen pada tahun 2015. Memasuki tahun 2016 pertumbuhan ekonomi mengalami akselerasi menjadi 5,05 persen dan kembali meningkat menjadi 5,26 persen pada tahun 2017. Peningkatan pertumbuhan ekonomi D.I. Yogyakarta pada tahun 2017 disebabkan oleh perkembangan semua kategori lapangan usaha terutama pesatnya aktivitas

pada lapangan usaha konstruksi yang mencapai 6,94 persen dan aktivitas akomodasi dan makan minum sebesar 6,21 persen.

Sementara itu pertumbuhan investasi fisik yang merupakan penggerak pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi selama periode 2013-2017. Gambaran mengenai pertumbuhan investasi fisik dilihat dari pertumbuhan komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang tercatat tumbuh di atas 5 persen selama periode tersebut kecuali pada tahun 2015 dan 2017 yang hanya tumbuh di atas 4 persen. Tercatat pertumbuhan investasi terendah pada tahun 2015 yaitu sebesar 4,34 persen dan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2016 sebesar 5,97 persen. Pada tahun 2017 pertumbuhan investasi melambat menjadi 4,97 persen (Gambar 4.1).



Sumber: BPS Provinsi DIY

Gambar 4.2. Rata-rata Laju Pertumbuhan Ekonomi D.I. Yogyakarta menurut Lapangan Usaha, 2013-2017 (persen)

Selama lima tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan ekonomi D.I. Yogyakarta mencapai 5,11 persen. Semua kategori lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang positif. Lapangan usaha dengan laju pertumbuhan rata-rata di atas 6 persen per tahun adalah listrik dan gas yang tumbuh sebesar 6,71 persen; disusul oleh informasi dan komunikasi sebesar 6,42 persen; jasa kesehatan sebesar 6,28 persen; kegiatan jasa lainnya sebesar 6,18 persen;

akomodasi dan makan/minum sebesar 6,07 persen; jasa keuangan sebesar 6,06 persen; dan jasa perusahaan sebesar 6,04 persen. Selain listrik dan gas, kategori lainnya termasuk dalam kelompok lapangan usaha tersier. Sementara itu lapangan usaha dengan rata-rata laju pertumbuhan di bawah 3 persen adalah pertanian dan penggalian yang masing-masing tumbuh sebesar 0,84 persen dan 1,50 persen per tahun. Kedua kategori tersebut termasuk dalam lapangan usaha primer (Gambar 4.2).

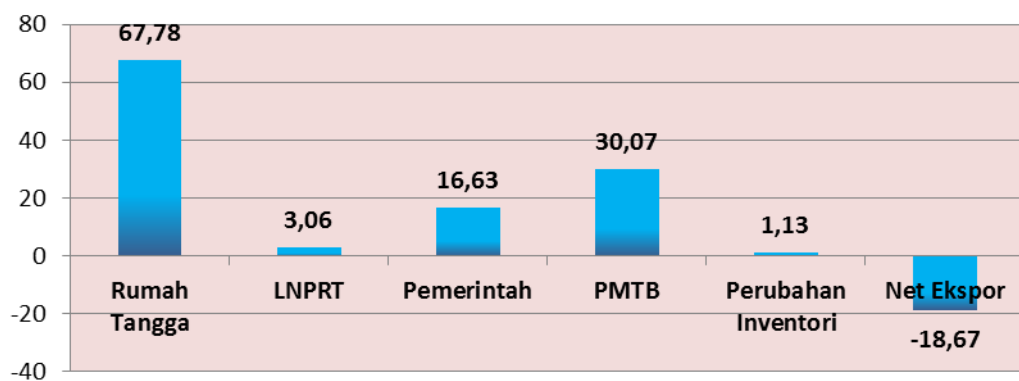
Tabel 4.1. Pertumbuhan Ekonomi D.I. Yogyakarta menurut Lapangan Usaha, 2013-2017 (persen)

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,26	-2,10	2,11	1,46	1,94
a. Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian	2,33	-2,99	1,94	1,50	1,74
b. Kehutanan dan Penebangan Kayu	0,54	3,53	2,83	1,17	2,88
c. Perikanan	4,87	6,50	4,21	1,40	4,25
2. Pertambangan dan Penggalian	3,92	2,11	0,13	0,42	3,39
3. Industri Pengolahan	6,87	3,82	2,13	5,07	5,74
4. Pengadaan Listrik dan Gas	6,08	6,83	2,19	14,26	3,96
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,95	3,91	2,90	2,36	3,46
6. Konstruksi	4,94	5,65	4,24	5,42	6,94
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,26	5,69	6,19	6,09	5,72
8. Transportasi dan Pergudangan	6,10	3,80	3,73	4,61	4,74
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,13	6,79	5,77	5,51	6,21
a. Penyediaan Akomodasi	8,51	4,93	7,17	8,16	11,13
b. Penyediaan Makan Minum	6,82	7,21	5,46	4,91	5,06
10. Informasi dan Komunikasi	6,22	6,13	5,11	8,32	6,14
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	11,50	8,27	8,27	4,98	2,80
a. Jasa Perantara Keuangan	14,89	9,92	8,97	4,63	1,77
b. Lainnya	3,38	3,90	6,30	6,00	5,73
12. Real Estate	4,01	7,77	6,05	5,14	4,94
13. Jasa Perusahaan	3,27	7,61	7,31	3,43	5,86
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	4,94	5,90	5,57	5,57	4,51
15. Jasa Pendidikan	4,58	7,91	7,28	3,07	5,56
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,00	7,65	7,15	4,52	5,84
17. Jasa lainnya	4,86	5,29	8,00	5,70	5,76
PDRB	5,47	5,17	4,95	5,05	5,26

Sumber: BPS Provinsi DIY

Keterangan: * Angka Sementara; **Angka Sangat Sementara

Sebagaimana sudah disebutkan di atas, bahwa seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang positif selama tahun 2017. Sebanyak sembilan kategori lapangan usaha mengalami pertumbuhan di atas 5 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha konstruksi yang mencapai 6,94 persen. Delapan kategori lapangan usaha lainnya yang mengalami pertumbuhan di atas 5 persen berturut-turut adalah sebagai berikut: penyediaan akomodasi dan makan minum (6,21%), informasi dan komunikasi (6,14%), jasa perusahaan (5,86%), jasa kesehatan dan kegiatan sosial (5,84%), jasa lainnya (5,76%), industri pengolahan (5,74%), perdagangan besar dan eceran (5,72%), dan jasa pendidikan (5,56%). Selain industri pengolahan, selama 5 tahun terakhir kedelapan kategori lapangan usaha lainnya tersebut juga mempunyai rata-rata pertumbuhan tahunan di atas 5 persen (Tabel 4.1).



Sumber: BPS Provinsi D.I.

Gambar 4.3. Rata-rata Distribusi PDRB D.I. Yogyakarta menurut Pengeluaran, 2013-2017 (persen)

Selain dari sisi produksi, PDRB juga dapat dilihat dari sisi pengeluaran. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, sebagian besar PDRB D.I. Yogyakarta digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Hal ini terlihat dari rata-rata porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga per tahun yang mencapai sebesar 67,78 persen dari total PDRB selama periode 2013-2017. Komponen pengeluaran yang mempunyai proporsi terbesar kedua adalah PMTB dengan *share* mencapai 30,07 persen. Pengeluaran terbesar ketiga terjadi pada komponen konsumsi pemerintah dengan *share* rata-rata sebesar 16,63 persen.

Sementara untuk pengeluaran konsumsi lembaga nonprofit dan perubahan inventori kontribusi rata-rata per tahun sebesar 3,07 persen dan 1,13 persen.

Dari sisi pengeluaran juga diketahui bahwa selama lima tahun terakhir produksi domestik di wilayah D.I. Yogyakarta belum bisa memenuhi total permintaan. Hal ini diketahui dari nilai komponen net ekspor yang masih bertanda negatif. Secara rata-rata, selama periode 2013-2017 porsi komponen net ekspor sebesar minus 18,67 persen (Gambar 4.3). Artinya, nilai ekspor lebih rendah dibandingkan dengan nilai impor. Kondisi ini menunjukkan bahwa produksi barang dan jasa di wilayah D.I. Yogyakarta tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat D.I. Yogyakarta. Dengan kata lain, selama lima tahun terakhir D.I. Yogyakarta mengalami defisit neraca perdagangan. Bagi produsen domestik, kondisi ini bisa dijadikan sebagai peluang usaha untuk meningkatkan produksi maupun menciptakan barang dan jasa yang sebelumnya masih diimpor dari daerah lain mengingat potensi pasar D.I. Yogyakarta yang relatif besar. Namun demikian, dalam pengembangan produk substitusi impor juga harus memperhitungkan penguasaan teknologi dan ketersediaan sumber daya yang diperlukan.

Selama periode 2013-2017, semua komponen pengeluaran mengalami pertumbuhan positif. Komponen perubahan inventori merupakan komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi dengan besaran pertumbuhan per tahun mencapai 6,38 persen. Selanjutnya komponen konsumsi lembaga swasta nirlaba juga mengalami pertumbuhan cukup tinggi per tahunnya, mencapai 5,43 persen.

Selama lima tahun terakhir pertumbuhan konsumsi lembaga swasta nirlaba cenderung berfluktuasi. Sesuai dengan tujuan lembaga swasta nirlaba yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat atau kegiatan sosial termasuk juga dengan kegiatan yang berhubungan dengan partai politik maka pengeluaran untuk konsumsi lembaga swasta nirlaba juga dipengaruhi oleh dinamika sosial dan politik. Pada tahun 2013-2014 pertumbuhan komponen ini relatif cukup tinggi yaitu di atas 10 persen. Hal ini berkaitan dengan momen persiapan dan pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilihan presiden/wakil

presiden. Pada tahun 2015 komponen ini mengalami perlambatan hingga pertumbuhan hanya sebesar 2,90 persen. Sebagai puncaknya pada tahun 2016 komponen konsumsi lembaga swasta nirlaba mengalami kontraksi sebesar minus 0,92 persen. Seiring dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kulon Progo dan Kota Yogyakarta pada awal tahun 2017, konsumsi lembaga swasta nirlaba juga meningkat hingga mencapai 9,61 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun pertumbuhan komponen perubahan inventori dan konsumsi lembaga swasta nirlaba merupakan yang tertinggi namun andil kedua komponen tersebut terhadap perekonomian D.I. Yogyakarta relatif kecil.

Tabel 4.2. Pertumbuhan Ekonomi D.I. Yogyakarta menurut Pengeluaran, 2013-2017 (persen)

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**	Rata-rata 2013-2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Konsumsi Rumah Tangga	4,85	4,94	4,74	4,83	5,54	5,01
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	10,42	10,58	2,90	-0,92	9,61	5,43
3. Konsumsi Pemerintah	5,90	4,35	5,50	2,11	3,06	3,75
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,12	5,78	4,34	5,97	4,97	5,27
5. Perubahan Inventori	3,44	11,78	4,73	7,24	2,02	6,38
6. Ekspor Barang dan Jasa	5,64	6,82	4,71	4,52	5,41	5,36
7. Impor Barang dan Jasa	5,08	6,85	4,26	3,74	5,11	4,98
PDRB	5,47	5,17	4,95	5,05	5,26	5,11

Sumber: BPS Provinsi DIY

Keterangan: * Angka Sementara; ** Angka Sangat Sementara

Jika diamati selama lima tahun terakhir, pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga cenderung meningkat dari 4,85 persen pada tahun 2013 menjadi 5,54 persen pada tahun 2017. Sementara itu, besaran pertumbuhan pengeluaran konsumsi pemerintah cenderung fluktuatif. Demikian pula dengan komponen investasi fisik (PMTB), meskipun fluktuasinya relatif *smooth*. Pada tahun 2013 PMTB tumbuh sebesar 5,12 persen dan cenderung melambat menjadi 4,97 persen pada tahun 2017. Pertumbuhan PMTB merupakan indikator peningkatan investasi di D.I. Yogyakarta. Selanjutnya, volume perdagangan antar wilayah menunjukkan peningkatan baik dari sisi ekspor maupun impor. Nilai ekspor dan impor D.I. Yogyakarta mencapai lebih dari 50 persen dari total

PDRB dan menunjukkan porsi yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa perekonomian D.I. Yogyakarta semakin terbuka terhadap wilayah luar D.I. Yogyakarta.

Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, rata-rata pertumbuhan ekonomi D.I. Yogyakarta merupakan yang terendah. Meskipun demikian, rata-rata pertumbuhan D.I. Yogyakarta tersebut masih di atas angka rata-rata nasional. Semua provinsi di Pulau Jawa secara rata-rata tumbuh di atas 5 persen per tahun atau dengan kata lain lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan nasional. Rata-rata pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Provinsi DKI Jakarta yang mencapai 5,98 persen per tahun, diikuti oleh Provinsi Jawa Timur dengan laju pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 5,58 persen, sementara provinsi lain mempunyai laju pertumbuhan rata-rata di bawah 5,50 persen per tahun.

Tabel 4.3. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi-provinsi di Pulau Jawa, 2013-2017 (persen)

Provinsi	2013	2014	2015	2016*	2017**	Rata-rata 2013-2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
DKI Jakarta	6,07	5,91	5,91	5,88	6,22	5,98
Jawa Barat	6,33	5,09	5,05	5,66	5,29	5,27
Jawa Tengah	5,11	5,27	5,47	5,27	5,27	5,32
DIY	5,47	5,17	4,95	5,05	5,26	5,11
Jawa Timur	6,08	5,86	5,44	5,57	5,45	5,58
Banten	6,67	5,51	5,45	5,28	5,71	5,49
Indonesia	5,56	5,01	4,88	5,03	5,07	5,00

Sumber: BPS (diolah)

Keterangan: * Angka Sementara; ** Angka Sangat Sementara

4.2. Perkembangan Nilai Investasi

Nilai investasi dalam proses produksi ditentukan oleh produktivitas marginalnya. Produktivitas marginal merupakan tambahan output yang diperoleh dari setiap penambahan satu unit kapital dalam proses produksi dengan faktor produksi yang lain dianggap konstan (*ceteris paribus*). Investasi akan dilakukan apabila produktivitas investasi masih lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat

bunga yang diterima seandainya modal tersebut dipinjamkan dan tidak diinvestasikan. Selain tingkat bunga, investasi juga dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas perekonomian, stabilitas politik suatu wilayah serta perubahan dan perkembangan teknologi.

Dalam penyusunan *Incremental Capital Output Ratio* atau ICOR D.I. Yogyakarta, konsep investasi yang digunakan mencakup semua pengeluaran untuk pembentukan modal tetap bruto (PMTB) dan perubahan inventori (Δ inventori). Berdasarkan harga konstan 2010, perkembangan nilai investasi di D.I. Yogyakarta selama periode 2013-2017 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 nilai investasi atas dasar harga konstan mencapai 21,02 triliun rupiah dan terus meningkat hingga menjadi 25,86 triliun rupiah pada tahun 2017 (Tabel 4.4). Rata-rata pertumbuhan investasi di D.I. Yogyakarta selama periode 2013-2017 sebesar 5,31 persen per tahun (Tabel 4.4).

Tabel 4.4. Perkembangan Nilai Investasi D.I. Yogyakarta, 2013-2017 (Juta rupiah)

Tahun	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
	PMTB	Δ Inventori	Jumlah	PMTB	Δ Inventori	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)
2013	24.250.704	967.150	25.217.854	20.190.810	832.540	21.023.350
2014	27.744.794	980.197	28.724.991	21.358.622	930.599	22.289.222
2015	30.798.881	1.151.797	31.950.678	22.286.615	974.645	23.261.260
2016*	33.428.978	1.295.788	34.724.766	23.616.948	1.045.164	24.662.112
2017**	37.147.936	1.368.184	38.516.120	24.791.862	1.066.314	25.858.176

Sumber : BPS Provinsi D.I. Yogyakarta (diolah)

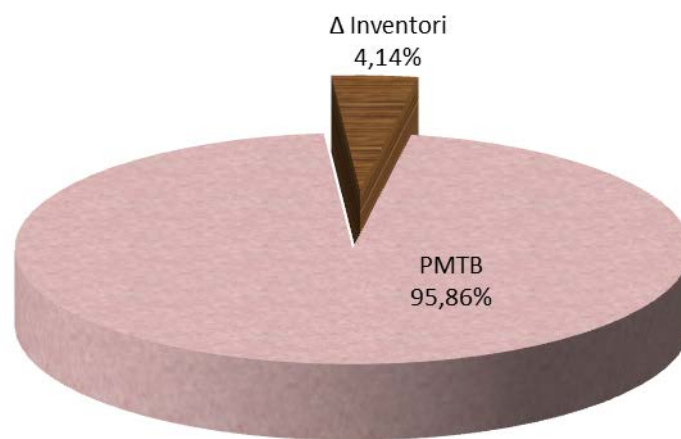
Keterangan: * Angka Sementara; **Angka Sangat Sementara

4.3. Struktur Investasi

Berdasarkan *System of National Accounts* (SNA), nilai investasi merupakan penjumlahan dari pembentukan modal tetap bruto (PMTB) dan perubahan inventori. Kegiatan PMTB tercermin dari investasi fisik domestik dalam bentuk berbagai jenis barang kapital, seperti: bangunan, mesin-mesin, kendaraan atau alat angkut, *cultivated biological resources*, dan peralatan

lainnya. Sementara itu perubahan inventori merupakan selisih stok barang pada posisi akhir tahun dikurangi dengan posisi stok barang pada awal tahun. Perubahan inventori mencakup stok dalam bentuk bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi.

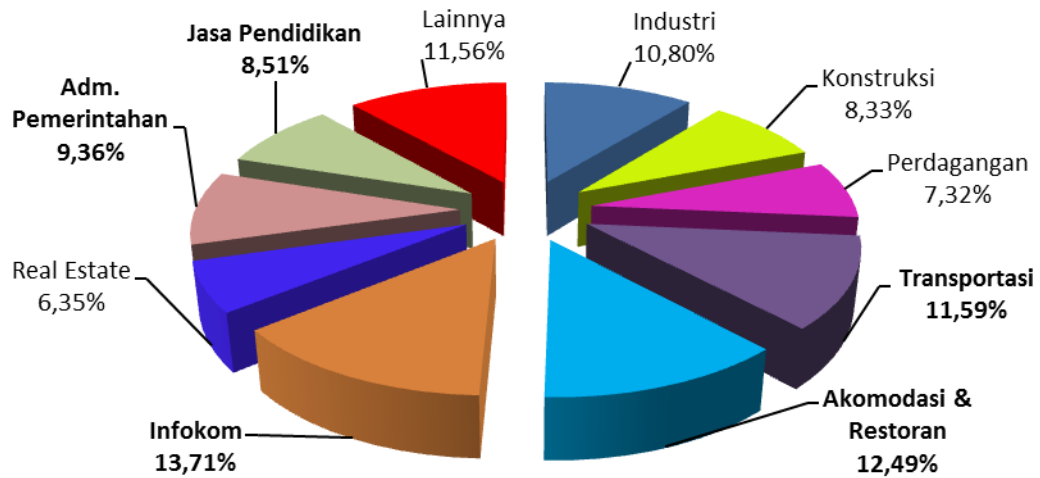
Ditinjau dari unsur penyusunnya, sebagian besar nilai investasi merupakan unsur pembentukan modal tetap bruto. Selama periode 2013-2017, rata-rata proporsi PMTB terhadap total investasi mencapai 95,86 persen sedangkan proporsi perubahan inventori hanya sebesar 4,14 persen (Gambar 4.4).



Sumber: BPS Provinsi D.I.

Gambar 4.4. Proporsi PMTB terhadap Total Investasi D.I. Yogyakarta, 2013-2017

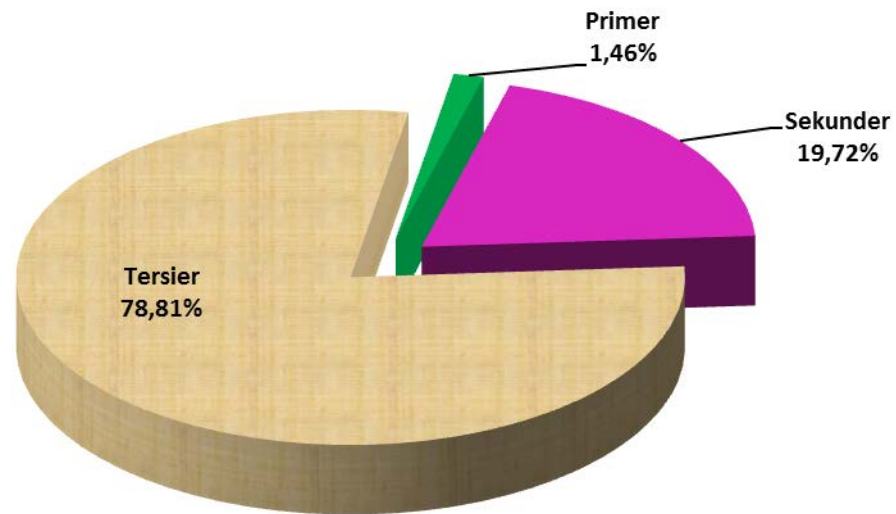
Selama lima tahun terakhir, struktur investasi D.I. Yogyakarta didominasi oleh aktivitas informasi dan komunikasi yang secara rata-rata per tahun porsinya sebesar 13,71 persen. Selain jasa informasi dan komunikasi, investasi yang cukup besar (dengan *share* di atas 10 persen) dilakukan pada lapangan usaha akomodasi dan makan minum sebesar 12,49 persen; transportasi sebesar 11,59 persen; dan industri pengolahan sebesar 10,80 persen. Sementara lapangan usaha lain yang mempunyai andil investasi di atas 6 persen berturut-turut adalah jasa administrasi pemerintahan (9,36%), jasa pendidikan (8,51%), konstruksi (8,33%), perdagangan (7,32%), dan *real estate* (6,35%) (Gambar 4.5).



Sumber: BPS Provinsi DIY

Gambar 4.5. Struktur Investasi D.I. Yogyakarta menurut Lapangan Usaha, 2013-2017

Jika ditinjau menurut kelompok industri selama periode yang sama, rata-rata porsi investasi terbesar terjadi pada kelompok industri tersier yaitu mencapai sebesar 78,81 persen. Kelompok industri sekunder dan kelompok industri primer masing-masing menyumbang sebesar 19,72 persen dan 1,46 persen per tahun (Gambar 4.6). Kelompok industri primer merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam seperti usaha pertanian dan pergalian. Karena sifatnya hanya mengolah sumber daya alam sehingga kelompok primer memiliki kecenderungan investasi yang kecil. Sementara itu kelompok industri sekunder terdiri dari industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air (termasuk pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang), dan konstruksi. Selanjutnya industri tersier yang mendominasi kegiatan investasi di D.I. Yogyakarta juga dikenal sebagai industri jasa merupakan aktivitas ekonomi yang produksinya bukan dalam bentuk fisik melainkan dalam bentuk jasa, seperti perdagangan, transportasi, akomodasi dan makan-minum, informasi dan komunikasi, keuangan dan kegiatan jasa-jasa lainnya.



Sumber: BPS Provinsi DIY

Gambar 4.6. Struktur Investasi di D.I. Yogyakarta menurut Kelompok Industri, 2013-2017 (%)

Secara spasial, rata-rata investasi per tahun menurut kabupaten/kota atas dasar harga berlaku selama periode 2013-2017 tertinggi dicapai oleh Kabupaten Sleman dengan nilai sebesar 13,04 triliun rupiah. Secara rata-rata investasi di wilayah Sleman tersebut menyumbang sekitar 40,89 persen per tahun terhadap total investasi di D.I. Yogyakarta. Selanjutnya rata-rata investasi per tahun untuk Kota Yogyakarta sebesar 7,50 triliun rupiah, Kabupaten Bantul sebesar 4,98 triliun rupiah, Kabupaten Gunungkidul sebesar 3,87 triliun rupiah, dan terendah adalah Kabupaten Kulon Progo sebesar 2,49 triliun rupiah. Sementara itu investasi di kabupaten/kota tersebut memberikan kontribusi rata-rata per tahun terhadap total investasi D.I. Yogyakarta masing-masing berturut-turut sebesar 23,52 persen, 15,63 persen, 12,14 persen, dan 7,82 persen.

Tabel 4.5. Nilai Investasi D.I. Yogyakarta menurut Kabupaten/Kota atas Dasar Harga Berlaku, 2013-2017 (Juta Rupiah)

Kabupaten/ Kota	2013	2014	2015	2016*	2017**	Rata-rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kulon Progo	1.973.552 (7,84)	2.241.009 (7,81)	2.457.921 (7,70)	2.632.749 (7,57)	3.168.852 (8,15)	2.494.817 (7,82)
Bantul	3.918.392 (15,56)	4.464.208 (15,56)	5.042.746 (15,79)	5.461.249 (15,70)	6.035.987 (15,53)	4.984.516 (15,63)
Gunungkidul	3.116.754 (12,38)	3.516.614 (12,26)	3.838.253 (12,02)	4.206.916 (12,10)	4.685.072 (12,05)	3.872.722 (12,14)
Sleman	10.176.525 (40,41)	11.627.272 (40,53)	13.070.196 (40,93)	14.374.488 (41,33)	15.951.790 (41,04)	13.040.054 (40,89)
Yogyakarta	5.999.960 (23,82)	6.840.659 (23,84)	7.527.373 (23,57)	8.103.129 (23,30)	9.030.893 (23,23)	7.500.403 (23,52)
Jumlah	25.185.184 (100,00)	28.689.762 (100,00)	31.936.488 (100,00)	34.778.533 (100,00)	38.872.594 (100,00)	31.892.512 (100,00)

Sumber: BPS Provinsi DIY (Diolah)

Keterangan: * : Angka Sementara; ** : Angka Sangat Sementara
Angka dalam kurung adalah *share* terhadap total

Tabel 4.6. Nilai Investasi D.I. Yogyakarta menurut Kabupaten/Kota atas Dasar Harga Konstan 2010, 2013-2017 (Juta Rupiah)

Kabupaten/ Kota	2013	2014	2015	2016*	2017**	Rata-rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kulonprogo	1.615.213 (7,66)	1.707.632 (7,66)	1.769.537 (7,60)	1.861.487 (7,55)	2.098.402 (8,05)	1.810.454 (7,71)
Bantul	3.290.941 (15,61)	3.474.115 (15,58)	3.639.678 (15,64)	3.858.792 (15,65)	4.044.875 (15,52)	3.661.680 (15,60)
Gunungkidul	2.582.320 (12,25)	2.711.059 (12,16)	2.834.167 (12,18)	2.997.402 (12,16)	3.159.285 (12,12)	2.856.847 (12,17)
Sleman	8.532.740 (40,46)	9.053.826 (40,60)	9.462.039 (40,66)	10.062.766 (40,81)	10.550.942 (40,48)	9.532.463 (40,60)
Yogyakarta	5.066.226 (24,02)	5.353.640 (24,01)	5.566.038 (23,92)	5.877.985 (23,84)	6.212.224 (23,83)	5.615.223 (23,92)
Jumlah	21.087.441 (100,00)	22.300.272 (100,00)	23.271.461 (100,00)	24.658.432 (100,00)	26.065.727 (100,00)	23.476.666 (100,00)

Sumber: Sumber: BPS Provinsi DIY (Diolah)

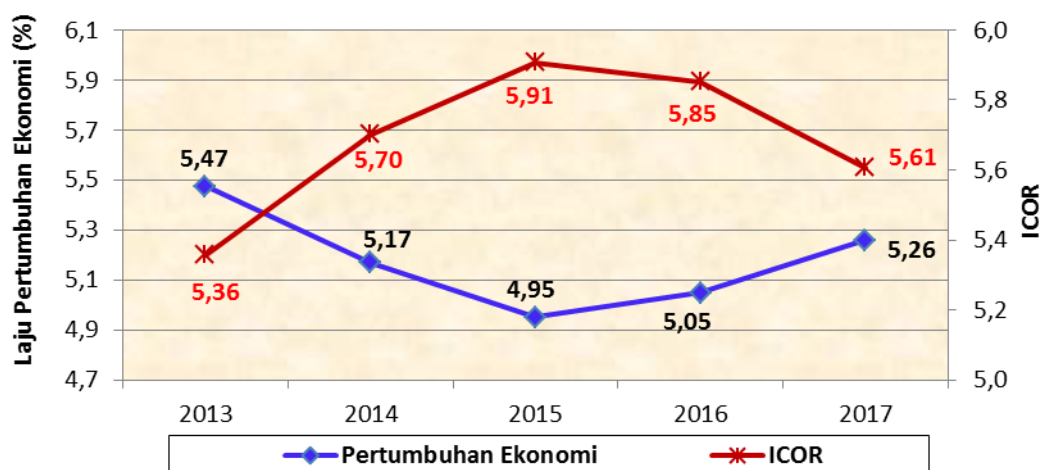
Keterangan: * : Angka Sementara; ** : Angka Sangat Sementara
Angka dalam kurung adalah *share* terhadap total

4.4. Angka ICOR D.I. Yogyakarta

4.4.1. ICOR Total

ICOR merupakan suatu besaran yang menunjukkan besarnya tambahan kapital yang dibutuhkan untuk menaikkan/menambah satu unit output dalam perekonomian suatu wilayah. Jika diketahui ICOR D.I. Yogyakarta pada tahun 2017 adalah sebesar 5,61 berarti bahwa untuk memperoleh tambahan output sebesar 1 unit maka diperlukan tambahan investasi sebesar 5,61 unit. Nilai ICOR bisa menjadi salah satu indikasi tingkat efisiensi perekonomian suatu wilayah. Semakin kecil nilai ICOR menunjukkan bahwa kemampuan investasi untuk menghasilkan output semakin besar. Secara umum angka ICOR yang dianggap ideal (efisien) berada pada kisaran nilai 3-4 (Widodo, 1990).

Selama periode 2013-2017, ICOR D.I. Yogyakarta masih relatif tinggi dengan besaran nilai di atas 5. Level ICOR yang cukup tinggi bisa berarti investasi yang dilakukan kurang efisien, namun tidak menutup kemungkinan bahwa aktivitas ekonomi yang berkembang di D.I. Yogyakarta cenderung bersifat *capital intensive*. Aktivitas ekonomi yang bersifat *capital intensive* memerlukan modal yang sangat besar dalam kegiatan produksinya.



Sumber: BPS Provinsi DIY

Gambar 4.7. Perkembangan ICOR dan Laju Pertumbuhan Ekonomi D.I. Yogyakarta, 2013-2017

Gambar 4.7 menyajikan perkembangan laju pertumbuhan ekonomi dan ICOR di D.I. Yogyakarta selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2017 angka ICOR D.I. Yogyakarta lebih rendah dibandingkan tiga tahun sebelumnya namun lebih tinggi dari ICOR tahun 2013. Pada tahun 2013 ICOR D.I. Yogyakarta sebesar 5,36 kemudian meningkat menjadi 5,91 pada tahun 2015 dan terus menurun hingga menjadi 5,61 pada tahun 2017.

Tabel 4.7. ICOR Kabupaten/Kota se-D.I. Yogyakarta dengan Pendekatan Investasi = PMTB + Perubahan Inventori, 2013-2017

Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016*	2017**	Rata-Rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kulonprogo	6,06	6,50	6,37	6,23	5,34	6,10
Bantul	4,50	4,88	4,94	4,90	4,84	4,81
Gunungkidul	5,36	5,86	5,53	5,50	5,40	5,53
Sleman	6,05	6,73	6,83	6,82	6,67	6,62
Yogyakarta	4,82	5,01	5,13	5,13	5,04	5,03
D.I. Yogyakarta	5,36	5,70	5,91	5,85	5,61	5,68

Sumber: BPS Provinsi DIY (Diolah)

Keterangan: * Angka Sementara; **Angka Sangat Sementara

Selain penghitungan ICOR total D.I. Yogyakarta juga dihitung menurut kabupaten/kota. Pada level kabupaten/kota, ICOR tertinggi pada tahun 2017 terjadi di Kabupaten Sleman yaitu sebesar 6,67. Selanjutnya diikuti oleh Kabupaten Gunungkidul sebesar 5,40; Kabupaten Kulon Progo sebesar 5,34; Kota Yogyakarta sebesar 5,04; dan terendah Kabupaten Bantul sebesar 4,84.

ICOR Kabupaten Sleman yang relatif tinggi antara lain disebabkan oleh jenis investasi yang ditanamkan biasanya bersifat padat modal. Hal ini berkait dengan lapangan usaha yang dominan di Kabupaten Sleman, yaitu industri pengolahan, kontruksi, serta penyediaan akomodasi dan makan minum. Meskipun industri pengolahan di wilayah Sleman masih didominasi oleh industri makanan dan minuman, namun peranan industri tekstil dan pakaian jadi juga cukup besar. Industri tekstil sendiri pada umumnya lebih bersifat *capital intensive*. Selanjutnya pembangunan hotel berbintang juga masih cukup banyak

selama lima tahun terakhir. Selain itu, peranan lapangan usaha transportasi dan pergudangan yang bersifat padat modal di wilayah ini juga cukup besar.

Sebaliknya, ICOR Kabupaten Bantul yang relatif rendah antara lain disebabkan oleh peranan pertanian yang cukup besar di wilayah ini. Seperti diketahui bahwa lapangan usaha pertanian ini mempunyai ICOR yang relatif kecil. Sementara itu industri yang dominan di Kabupaten Bantul adalah industri makanan dan minuman yang sebagian besar merupakan industri kecil atau usaha rumah tangga dengan modal yang relatif kecil. Selanjutnya untuk jasa akomodasi yang berkembang di wilayah ini sebagian besar berupa hotel non-bintang.

Hasil perhitungan rata-rata ICOR menurut kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta selama periode 2013-2017 menunjukkan hasil yang hampir sejalan dengan nilai ICOR kabupaten/kota pada tahun 2017. Selama periode pengamatan, rata-rata ICOR Kabupaten Sleman mempunyai nilai tertinggi yaitu sebesar 6,62; diikuti oleh Kabupaten Kulon Progo sebesar 6,10; Kabupaten Gunungkidul sebesar 5,53; Kota Yogyakarta 5,03; dan terendah adalah Kabupaten Bantul sebesar 4,81 (Tabel 4.7). Tingginya nilai ICOR di Kabupaten Kulon Progo seiring dengan proyek pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di wilayah tersebut sehingga perbaikan infrastruktur berupa jalan semakin ditingkatkan.

Tabel 4.8. ICOR Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta dengan Pendekatan Investasi = PMTB, 2013-2017

Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016*	2017**	Rata-Rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kulonprogo	5,93	6,36	6,24	6,09	5,23	5,97
Bantul	4,34	4,69	4,75	4,70	4,66	4,63
Gunungkidul	5,14	5,60	5,28	5,25	5,16	5,29
Sleman	5,78	6,42	6,52	6,51	6,38	6,32
Yogyakarta	4,63	4,80	4,89	4,89	4,79	4,80
D.I. Yogyakarta	5,14	5,46	5,66	5,60	5,37	5,45

Sumber: BPS Provinsi DIY (Diolah)

Keterangan: * Angka Sementara; **Angka Sangat Sementara

Penghitungan ICOR dengan pendekatan investasi sama dengan PMTB saja menghasilkan angka ICOR dengan urutan yang hampir sama. Dengan metode ini diketahui bahwa selama periode 2013-2017 rata-rata ICOR tertinggi terjadi di Kabupaten Sleman dan ICOR terendah di Kabupaten Bantul.

Selain ICOR menurut kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta, berikut ini juga disajikan ICOR provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa. Dari data tersebut diperoleh gambaran umum pertumbuhan investasi D.I. Yogyakarta dibandingkan provinsi lain di Jawa.

Tabel 4.9. ICOR Provinsi-provinsi di Pulau Jawa (Investasi = PMTB + Δ Inventori), 2013-2017

Provinsi	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
DKI Jakarta	8,39	8,39	8,13	7,88	7,50
Jawa Barat	4,93	6,08	5,90	5,24	5,56
Jawa Tengah	6,58	6,19	5,68	5,92	6,05
DIY	5,36	5,70	5,91	5,85	5,61
Jawa Timur	4,85	5,44	5,75	5,45	5,59
Banten	5,12	5,83	5,79	5,96	5,71
Indonesia	6,47	7,19	7,24	7,02	6,99

Sumber: BPS (data diolah)

Keterangan: * Angka Sementara; **Angka Sangat Sementara

Dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Jawa, ICOR D.I. Yogyakarta pada tahun 2017 termasuk dalam tiga terendah di bawah ICOR Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Timur yang masing-masing sebesar 5,56 dan 5,59. Selain nilai ICOR D.I. Yogyakarta termasuk yang rendah di Pulau Jawa, laju pertumbuhan ekonomi D.I. Yogyakarta merupakan yang terendah dibandingkan provinsi lain di Jawa. Hal ini bisa diindikasikan bahwa ekonomi D.I. Yogyakarta kurang bergairah, disamping juga daya saing pertumbuhan ekonomi dan investasi yang lebih rendah dibandingkan provinsi lain di Jawa. Efisiensi investasi D.I. Yogyakarta belum sebagus provinsi lain baik dari segi nilai, infrastruktur, dan penataan kawasan. Selain itu skala usaha di D.I. Yogyakarta didominasi oleh perusahaan mikro kecil (UMK), di mana tingkat produktivitas/efisiensinya

biasanya lebih rendah daripada perusahaan yang berskala menengah/besar (UMB). Angka ICOR DKI Jakarta merupakan yang tertinggi di Jawa, hal ini bisa disebabkan oleh pengembangan lapangan usaha yang lebih bersifat padat modal.

Dengan menggunakan metode penghitungan pendekatan investasi sama dengan PMTB dan perubahan inventori ($\text{Investasi} = \text{PMTB} + \Delta \text{Inventori}$), ICOR D.I. Yogyakarta berada pada urutan ke-5 pada tahun 2015, urutan ke-4 pada tahun 2013 dan berturut-turut termasuk dalam kelompok tiga terendah pada tahun 2014, 2016, dan 2017 (Tabel 4.9). Jika dibandingkan dengan hasil penghitungan menggunakan metode pendekatan investasi sama dengan PMTB saja ($\text{Investasi} = \text{PMTB}$) menghasilkan urutan besaran ICOR yang relatif sama kecuali pada tahun 2014 yang berada di urutan ke-4 (Tabel 4.10).

Tabel 4.10. ICOR Provinsi di Pulau Jawa (Investasi = PMTB), 2013-2017

Provinsi	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
DKI Jakarta	8,34	8,32	8,06	7,77	7,37
Jawa Barat	4,12	5,16	5,16	4,58	4,94
Jawa Tengah	5,98	5,76	5,56	5,79	5,92
DIY	5,14	5,46	5,66	5,60	5,37
Jawa Timur	4,83	4,93	5,31	5,21	5,36
Banten	4,84	5,65	5,73	5,96	5,70
Indonesia	6,18	6,79	6,97	6,73	6,75

Sumber : BPS (diolah)

Keterangan: * Angka Sementara; **Angka Sangat Sementara

4.4.2. ICOR menurut Lapangan Usaha

a. ICOR menurut Lapangan Usaha Tahunan

Tabel 4.11 menyajikan ICOR tahunan menurut lapangan usaha dengan menggunakan pendekatan investasi sama dengan PMTB ditambah perubahan inventori. ICOR tahunan dihitung dengan lag 0 mengandung arti investasi yang dilakukan pada tahun t akan menghasilkan nilai tambah pada tahun yang sama.

Tabel 4.11. ICOR Lapangan Usaha Tahunan Metode Standar Lag 0 dengan Pendekatan Investasi = PMTB + Perubahan Inventori, 2013-2017

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,95	-0,84	2,36	2,71	2,83
a. Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian	1,94	-0,20	2,32	2,68	2,78
b. Kehutanan dan Penebangan Kayu	4,09	2,95	3,01	3,60	3,89
c. Perikanan	1,52	1,55	1,78	1,65	1,59
2. Pertambangan dan Penggalian	3,06	3,12	3,59	3,33	3,21
3. Industri Pengolahan	5,03	5,52	5,30	5,23	5,02
4. Pengadaan Listrik dan Gas	14,28	14,57	15,23	15,81	14,99
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	5,49	5,59	6,44	5,98	5,75
6. Konstruksi	4,48	4,56	5,25	4,87	4,69
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,21	4,31	4,85	4,58	4,39
8. Transportasi dan Pergudangan	13,29	12,35	13,47	13,75	14,56
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,02	6,39	7,04	6,38	5,94
a. Penyediaan Akomodasi	3,72	3,79	4,37	4,05	3,90
b. Penyediaan Makan Minum	6,67	6,79	7,82	7,26	6,99
10. Informasi dan Komunikasi	5,56	5,67	6,39	6,05	5,82
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,43	2,57	3,11	3,12	3,45
a. Jasa Perantara Keuangan	2,27	2,31	2,66	2,47	2,38
b. Lainnya	4,16	4,35	4,89	4,55	4,39
12. Real Estate	4,46	4,55	4,78	4,84	4,65
13. Jasa Perusahaan	5,14	5,24	6,04	5,60	5,39
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	6,47	6,60	7,60	7,05	6,78
15. Jasa Pendidikan	4,77	4,86	5,60	5,19	5,00
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,13	5,23	6,02	5,59	5,38
17. Jasa lainnya	4,96	5,05	5,82	5,40	5,20
PDRB	5,36	5,70	5,91	5,85	5,61

Sumber: BPS Provinsi DIY (diolah)

Keterangan: * Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan metode tersebut di atas ada beberapa hal yang bisa dicermati, antara lain: Pertama, nilai ICOR tahun 2017 yang lebih kecil dibandingkan ICOR tahun 2016 bisa jadi indikasi perekonomian DIY yang semakin efisien. Kondisi perekonomian yang semakin baik tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi juga mengalami akselerasi dari 5,05 persen pada tahun 2016 menjadi 5,26 persen pada tahun 2017. Jika dicermati pada

kondisi tahun 2015, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi D.I. Yogyakarta berada pada level terendah selama 2013-2017 dan nilai ICOR berada pada level tertinggi yaitu 5,91. Selain kondisi perekonomian nasional dan regional yang semakin kondusif, pemerintah daerah juga melakukan berbagai upaya dalam perencanaan dan implementasi program pembangunan sehingga kondisi perekonomian D.I. Yogyakarta mampu tumbuh dengan baik. Terbukti selama 2016 dan 2017 pertumbuhan ekonomi D.I. Yogyakarta semakin meningkat seiring dengan menurunnya level ICOR.

Kedua, selama lima tahun terakhir, ICOR untuk lapangan usaha pertanian; pertambangan dan penggalan; serta jasa keuangan dan asuransi berada di bawah level 4. Proses produksi yang relatif pendek dan proporsi investasi dibandingkan dengan biaya antara (*intermediate cost*) dalam struktur ongkos usaha tani relatif kecil sehingga nilai ICOR lapangan usaha pertanian relatif rendah. Untuk lapangan usaha pertambangan dan penggalan di D.I. Yogyakarta pada umumnya hanya berupa kegiatan penggalan batu dan pasir. Aktivitas penggalan selain proses produksinya relatif pendek juga tidak memerlukan modal yang besar sehingga tidak membutuhkan banyak investasi. Kegiatan ekonomi pada jasa keuangan dan asuransi juga tidak memerlukan modal yang relatif besar dalam proses produksi atau bisa dikatakan tidak bersifat *capital intensive*.

Ketiga, lapangan usaha pengadaan listrik dan gas serta lapangan usaha pengangkutan dan pergudangan mempunyai nilai ICOR yang relatif tinggi. Hal ini erat kaitannya dengan karakter lapangan usaha tersebut yang bersifat padat modal dan biasanya membutuhkan investasi jangka panjang.

Keempat, nilai ICOR untuk aktivitas ekonomi yang tercakup dalam lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib relatif tinggi. Kondisi ini terjadi karena investasi yang dilakukan oleh pemerintah biasanya dipergunakan untuk pembangunan fasilitas pelayanan publik, seperti jalan, jembatan, dan infrastruktur lain yang tujuan utamanya bukan untuk mencari profit.

Tabel 4.12. ICOR Lapangan Usaha Tahunan Metode Standar Lag 0 dengan Pendekatan Investasi = PMTB, 2013-2017

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,87	-0,81	2,27	2,60	2,71
a. Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian	1,86	-0,19	2,22	2,57	2,66
b. Kehutanan dan Penebangan Kayu	3,93	2,82	2,89	3,45	3,73
c. Perikanan	1,46	1,48	1,71	1,58	1,53
2. Pertambangan dan Penggalian	2,94	2,99	3,44	3,19	3,07
3. Industri Pengolahan	4,83	5,29	5,08	5,01	4,82
4. Pengadaan Listrik dan Gas	13,71	13,96	14,59	15,14	14,37
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	5,27	5,36	6,17	5,72	5,52
6. Konstruksi	4,30	4,37	5,03	4,67	4,50
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,05	4,13	4,65	4,38	4,21
8. Transportasi dan Pergudangan	12,76	11,84	12,91	13,17	13,96
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,78	6,12	6,74	6,11	5,69
a. Penyediaan Akomodasi	3,57	3,63	4,18	3,88	3,74
b. Penyediaan Makan Minum	6,40	6,51	7,50	6,95	6,70
10. Informasi dan Komunikasi	5,34	5,43	6,13	5,79	5,58
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,34	2,47	2,98	2,98	3,31
a. Jasa Perantara Keuangan	2,18	2,21	2,55	2,37	2,28
b. Lainnya	4,00	4,17	4,69	4,36	4,21
12. Real Estate	4,29	4,36	4,58	4,63	4,46
13. Jasa Perusahaan	4,94	5,02	5,78	5,36	5,17
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	6,22	6,32	7,28	6,75	6,50
15. Jasa Pendidikan	4,58	4,66	5,36	4,97	4,79
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,93	5,01	5,77	5,35	5,16
17. Jasa lainnya	4,76	4,84	5,57	5,17	4,98
PDRB	5,14	5,46	5,66	5,60	5,37

Sumber: BPS Provinsi DIY (Diolah)

Keterangan: * Angka Sementara; **Angka Sangat Sementara

Sebagai bahan perbandingan pada Tabel 4.12 disajikan hasil perhitungan angka ICOR lapangan usaha untuk periode 2013-2017 dengan menggunakan metode pendekatan investasi sama dengan komponen PMTB saja. Secara umum, angka ICOR yang dihasilkan dari penghitungan dengan pendekatan ini menghasilkan angka yang lebih rendah.

b. ICOR Lapangan Usaha Metode Akumulasi

Selain menggunakan metode standar, penghitungan ICOR juga bisa dilakukan dengan menggunakan metode akumulasi investasi. Dalam pendekatan metode ini total investasi sepanjang periode referensi (t_1 s.d. t_n) dijumlahkan kemudian dibagi dengan penambahan output pada periode yang sama.

Kelebihan metode akumulasi investasi dibandingkan dengan metode standar adalah pada pengeluaran prinsip rata-rata tertimbang. Dengan metode standar yang dilakukan adalah membagi investasi pada tahun t_1 s.d. t_n dengan tambahan output pada periode terkait kemudian merata-ratakan hasil bagi tersebut selama n tahun, jadi menggunakan rata-rata sederhana. Dengan rata-rata tertimbang akan dapat dihindari fluktuasi yang sangat ekstrim.

Pada metode akumulasi ini nilai investasi dan tambahan output merupakan penjumlahan selama periode 2013 sampai dengan 2017. Dalam penghitungan dengan metode ini juga dilakukan dengan dua pendekatan investasi yaitu **dengan** dan **tanpa** memperhitungkan perubahan inventori, $\text{Investasi} = \text{PMTB} + \Delta \text{ Inventori}$ dan $\text{Investasi} = \text{PMTB}$.

Tabel 4.13 menyajikan hasil penghitungan besaran koefisien ICOR lapangan usaha dengan metode akumulasi pada periode 2013-2017 di D.I. Yogyakarta baik melalui pendekatan investasi dengan atau tanpa perubahan inventori. Besaran koefisien ICOR D.I. Yogyakarta dengan metode akumulasi pada periode ini mencapai 5,68 ($\text{Investasi} = \text{PMTB} + \Delta \text{ Inventori}$) dan 5,45 ($\text{Investasi} = \text{PMTB}$). Hal ini memberikan gambaran bahwa untuk memperoleh penambahan output senilai 1 juta rupiah dalam rentang periode tersebut dibutuhkan tambahan investasi sebanyak 5,68 juta rupiah. Besaran koefisien ICOR mencerminkan produktivitas dari pengeluaran barang modal dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi sesuai target yang diinginkan. Semakin kecil koefisien ICOR menunjukkan bahwa investasi yang dilakukan semakin efisien.

Jenis lapangan usaha dengan koefisien ICOR terkecil adalah jasa keuangan dan asuransi dengan nilai ICOR sebesar 2,83. Hal ini berarti untuk

meningkatkan output kegiatan jasa keuangan dan asuransi sebesar 1 juta rupiah diperlukan tambahan investasi sebesar 2,83 juta rupiah. Lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi juga tidak memerlukan barang modal yang banyak dalam proses produksinya atau bisa dikatakan tidak bersifat *capital intensive*. Selain itu proses produksinya juga relatif cepat.

Setelah jasa keuangan dan asuransi, lapangan usaha yang mempunyai koefisien ICOR terkecil kedua adalah pertambangan dan penggalian dengan nilai ICOR sebesar 3,14; artinya untuk setiap penambahan 1 juta rupiah output memerlukan investasi sebesar 3,14 juta rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas investasi pada lapangan usaha pertambangan dan penggalian relatif cukup tinggi. Kegiatan ekonomi yang termasuk dalam aktivitas pertambangan dan penggalian di D.I. Yogyakarta berupa penggalian batu dan pasir yang merupakan usaha mikro dan kecil dan tidak memerlukan barang modal yang besar.

Aktivitas pertanian, kehutanan, dan perikanan mempunyai nilai ICOR sebesar 3,66. Artinya setiap penambahan 1 juta rupiah output memerlukan investasi sebesar 3,66 juta rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas investasi pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan relatif cukup tinggi. Proses produksi sebagian besar komoditas pertanian kurang dari satu tahun dan sebagian besar inputnya merupakan input primer. Input antara (*intermediate cost*) pada pertanian sebagian besar digunakan untuk pembelian bibit/benih, pupuk, dan pestisida/obat-obatan. Selain itu, sebagian besar petani di D.I. Yogyakarta merupakan petani dengan penguasaan lahan yang relatif sempit. Dengan demikian barang modal yang dimiliki juga relatif kecil.

Secara umum, sebagian besar jenis lapangan usaha di D.I. Yogyakarta mempunyai angka ICOR pada kisaran 4-7. Lapangan usaha yang termasuk dalam kisaran nilai ICOR tersebut adalah perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (4,49); *real estate* (4,67); konstruksi (4,76); jasa pendidikan (5,11); industri pengolahan (5,17); jasa lainnya (5,34); jasa kesehatan dan kegiatan sosial (5,47); jasa perusahaan (5,52); pengadaan air, pengelolaan

sampah, limbah, dan daur ulang (5,88); informasi dan komunikasi (5,90); penyediaan akomodasi dan makan minum (6,33); serta administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (6,92).

Tabel 4.13. ICOR Lapangan Usaha Metode Akumulasi, Lag 0 Dengan Pendekatan Investasi = PMTB dengan dan tanpa Perubahan Inventori, 2013-2017

Lapangan Usaha	PMTB + Δ Inventori	PMTB
(1)	(2)	(3)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,66	3,50
a. Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian	4,14	3,97
b. Kehutanan dan Penebangan Kayu	3,35	3,21
c. Perikanan	1,61	1,54
2. Pertambangan dan Penggalian	3,14	3,01
3. Industri Pengolahan	5,17	4,96
4. Pengadaan Listrik dan Gas	15,17	14,54
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	5,88	5,63
6. Konstruksi	4,76	4,56
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,49	4,30
8. Transportasi dan Pergudangan	13,55	12,99
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,33	6,07
a. Penyediaan Akomodasi	3,97	3,80
b. Penyediaan Makan Minum	7,08	6,79
10. Informasi dan Komunikasi	5,90	5,66
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,83	2,71
a. Jasa Perantara Keuangan	2,41	2,31
b. Lainnya	4,52	4,33
12. Real Estate	4,67	4,47
13. Jasa Perusahaan	5,52	5,29
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	6,92	6,63
15. Jasa Pendidikan	5,11	4,90
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,47	5,25
17. Jasa lainnya	5,34	5,12
PDRB	5,68	5,45

Sumber: BPS Provinsi DIY (diolah)

Sementara itu lapangan usaha transportasi dan pergudangan serta lapangan usaha pengadaan listrik dan gas mempunyai besaran ICOR yang relatif tinggi, masing-masing 13,55 dan 15,17. Nilai ICOR yang tinggi pada lapangan usaha tersebut disebabkan oleh modal besar yang dibutuhkan untuk

menghasilkan setiap output yang diinginkan atau dapat dikatakan kedua lapangan tersebut bersifat padat modal.

c. ICOR Lapangan Usaha Metode Standar

Pada periode 2013-2017 ini hasil penghitungan ICOR dengan menggunakan metode standar menghasilkan angka yang sama dengan penghitungan ICOR dengan menggunakan metode akumulasi, yaitu 5,68 (Investasi = PMTB + Δ Inventori) dan 5,45 (Investasi = PMTB) (Tabel 4.14). Namun jika ditelusuri lebih dalam, penghitungan ICOR dengan metode standar pada beberapa lapangan usaha menghasilkan nilai lebih tinggi dibandingkan dengan hasil penghitungan menggunakan metode akumulasi dan sebagian lapangan usaha lain justru sebaliknya. Namun perbedaan hasil penghitungan nilai ICOR dengan kedua metode tersebut tidak terlalu besar. Pada metode akumulasi pengaruh angka ekstrim pada suatu tahun tertentu akan dihilangkan, sedangkan pada metode standar tidak bisa menghilangkan pengaruh angka sangat ekstrim yang bisa menimbulkan bias. Meskipun demikian, metode standar dapat mengidentifikasi kegiatan lapangan usaha yang kurang efisien atau kapasitas produksi terpasang belum dimanfaatkan secara optimal.

Pemilihan metode penghitungan ICOR tergantung pada asumsi yang digunakan atau prediksi keadaan riil di lapangan, misalnya karakteristik masing-masing lapangan usaha, teknologi yang digunakan, sistem manajemen, kondisi pasar, dan sebagainya. Selain itu, faktor daya tarik masing-masing lapangan usaha di mata para investor dan berbagai kebijakan serta peraturan pemerintah juga mempengaruhi perbedaan koefisien ICOR pada masing-masing lapangan usaha.

Angka ICOR yang disajikan pada Tabel 4.14 merupakan hasil penghitungan dengan menggunakan metode standar lag 0 dan diasumsikan produksi berada pada kondisi *full capacity*. Dengan demikian, investasi yang ditanamkan sepenuhnya akan digunakan untuk menaikkan output.

Tabel 4.14. ICOR Lapangan Usaha Metode Standar, Lag 0 dengan Pendekatan Investasi = PMTB dengan dan tanpa Perubahan Inventori, 2013-2017

Lapangan Usaha	PMTB + Δ Inventori	PMTB
(1)	(2)	(3)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,80	1,73
a. Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian	1,90	1,83
b. Kehutanan dan Penebangan Kayu	3,51	3,36
c. Perikanan	1,62	1,55
2. Pertambangan dan Penggalan	3,26	3,13
3. Industri Pengolahan	5,22	5,00
4. Pengadaan Listrik dan Gas	14,98	14,36
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	5,85	5,61
6. Konstruksi	4,77	4,57
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,47	4,28
8. Transportasi dan Pergudangan	13,48	12,93
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,35	6,09
a. Penyediaan Akomodasi	3,97	3,80
b. Penyediaan Makan Minum	7,11	6,81
10. Informasi dan Komunikasi	5,90	5,65
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,94	2,81
a. Jasa Perantara Keuangan	2,42	2,32
b. Lainnya	4,47	4,28
12. Real Estate	4,66	4,46
13. Jasa Perusahaan	5,48	5,25
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	6,90	6,61
15. Jasa Pendidikan	5,09	4,87
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,47	5,24
17. Jasa lainnya	5,28	5,07
PDRB	5,68	5,45

Sumber: BPS Provinsi DIY (Diolah)

Berdasarkan hasil penghitungan ICOR dengan menggunakan pendekatan investasi sama dengan PMTB ditambah perubahan inventori (Investasi = PMTB + Δ Inventori) diperoleh ICOR D.I. Yogyakarta sebesar 5,68 pada periode 2013-2017. Ditinjau menurut lapangan usaha, ada tiga lapangan usaha yang memiliki ICOR relatif rendah (di bawah 4), yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan; jasa keuangan dan asuransi; serta pertambangan dan penggalan. Ketiga lapangan usaha tersebut lebih bersifat *labor intensive* atau padat karya.

Sementara itu untuk pengadaan listrik dan gas serta transportasi dan pergudangan merupakan lapangan usaha dengan nilai ICOR relatif tinggi. Hal ini karena kedua aktivitas ekonomi tersebut lebih bersifat *capital intensive*.

Koefisien ICOR pertanian, kehutanan, dan perikanan yang relatif kecil kemungkinan bisa disebabkan oleh ketergantungan proses produksi lapangan usaha ini terhadap alam atau dengan kata lain sumber daya alam masih memegang peranan cukup besar dalam menentukan produksi/output. Faktor lainnya adalah penguasaan lahan yang relatif sempit dan mekanisasi pertanian yang terbatas. Sementara itu biaya produksi juga masih didominasi oleh *primary cost* atau nilai tambah bruto, sedangkan porsi *intermediate cost* (input yang habis dalam satu kali produksi) relatif kecil. Demikian pula halnya dengan lapangan usaha pertambangan dan penggalian di D.I. Yogyakarta yang bersifat *labor intensive* karena pada umumnya merupakan usaha mikro/kecil dan tidak memerlukan modal yang besar.

Besaran ICOR untuk lapangan usaha transportasi dan pergudangan serta pengadaan listrik dan gas cukup tinggi karena kegiatan investasi pada aktivitas ekonomi ini biasanya bersifat jangka panjang dan padat modal. Karena bersifat jangka panjang, nilai investasi yang relatif besar tersebut belum tentu bisa langsung diikuti dengan kenaikan nilai tambah dari kedua lapangan usaha tersebut. Pada aktivitas ekonomi pengadaan listrik dan gas, untuk mencapai *break even point* (BEP) terkadang diperlukan waktu yang panjang (bisa mencapai 30 tahun). Sementara untuk aktivitas ekonomi transportasi dan pergudangan cenderung bersifat padat modal karena memerlukan investasi yang besar untuk pembelian mesin, kendaraan, dan peralatan lainnya.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa investasi yang ditanamkan pada suatu tahun bisa memerlukan waktu yang cukup lama untuk dapat menghasilkan output yang diinginkan. Investasi yang ditanamkan pada tahun tertentu bisa jadi baru akan menghasilkan output setelah satu, dua atau sekian tahun kemudian. Tambahan output tersebut sepenuhnya merupakan hasil dari investasi yang ditanamkan pada tahun sebelumnya. Tabel 4.15 dan Tabel 4.16 menyajikan hasil

penghitungan koefisien ICOR dengan menggunakan asumsi bahwa investasi yang dilakukan baru akan menghasilkan tambahan output setelah satu dan dua tahun. Diketahui bahwa secara total koefisien ICOR dengan lag 1 dan lag 2 mengalami penurunan, yaitu 5,68 pada lag 0 menjadi 5,58 pada lag 1 dan menjadi 5,38 pada lag 2. Hal ini mengindikasikan bahwa produktivitas investasi yang semakin meningkat atau semakin efisien dalam kurun waktu satu dan dua tahun setelah penanaman investasi.

Tabel 4.15. ICOR Lapangan Usaha Metode Standar Lag 0, Lag 1, dan Lag 2, dengan Pendekatan Investasi = PMTB + Perubahan Inventori, 2013-2017

Lapangan Usaha	Lag-0	Lag-1	Lag-2
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,80	2,03	2,29
a. Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian	1,90	2,10	2,32
b. Kehutanan dan Penebangan Kayu	3,51	3,77	4,06
c. Perikanan	1,62	1,72	1,84
2. Pertambangan dan Penggalian	3,26	2,95	2,58
3. Industri Pengolahan	5,22	4,56	3,87
4. Pengadaan Listrik dan Gas	14,98	12,79	10,54
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	5,85	4,94	4,04
6. Konstruksi	4,77	4,41	4,01
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,47	4,60	4,73
8. Transportasi dan Pergudangan	13,48	12,60	11,64
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,35	6,88	7,45
a. Penyediaan Akomodasi	3,97	4,28	4,64
b. Penyediaan Makan Minum	7,11	7,72	8,35
10. Informasi dan Komunikasi	5,90	5,27	4,61
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,94	2,86	2,76
a. Jasa Perantara Keuangan	2,42	2,32	2,20
b. Lainnya	4,47	4,38	4,24
12. Real Estate	4,66	4,56	4,42
13. Jasa Perusahaan	5,48	5,37	5,20
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	6,90	7,17	7,43
15. Jasa Pendidikan	5,09	5,34	5,58
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,47	5,75	6,00
17. Jasa lainnya	5,28	5,55	5,80
PDRB	5,68	5,58	5,38

Sumber: BPS Provinsi DIY (Diolah)

Tabel 4.16. ICOR Lapangan Usaha Metode Standar Lag 0, Lag 1, dan Lag 2, dengan Pendekatan Investasi = PMTB, 2013-2017

Lapangan Usaha	Lag-0	Lag-1	Lag-2
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,73	1,92	2,19
a. Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian	1,83	1,97	2,20
b. Kehutanan dan Penebangan Kayu	3,36	3,53	3,92
c. Perikanan	1,55	1,63	1,76
2. Pertambangan dan Penggalian	3,13	2,84	2,48
3. Industri Pengolahan	5,00	4,17	3,54
4. Pengadaan Listrik dan Gas	14,36	12,26	10,10
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	5,61	4,71	3,86
6. Konstruksi	4,57	4,16	3,78
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,28	4,57	4,70
8. Transportasi dan Pergudangan	12,93	11,89	10,99
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,09	6,73	7,29
a. Penyediaan Akomodasi	3,80	4,17	4,52
b. Penyediaan Makan Minum	6,81	7,59	8,21
10. Informasi dan Komunikasi	5,65	5,03	4,39
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,81	2,70	2,61
a. Jasa Perantara Keuangan	2,32	2,17	2,06
b. Lainnya	4,28	4,14	4,01
12. Real Estate	4,46	4,31	4,17
13. Jasa Perusahaan	5,25	5,07	4,91
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	6,61	6,77	7,02
15. Jasa Pendidikan	4,87	5,30	5,54
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,24	5,70	5,96
17. Jasa lainnya	5,07	5,51	5,75
PDRB	5,45	5,32	5,13

Sumber: BPS Provinsi DIY (Diolah)

Jika diteliti lebih lanjut, ada 10 jenis lapangan usaha yang mengalami penurunan angka ICOR pada lag 1 dan lag 2 jika dibandingkan dengan lag 0, yaitu pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang; konstruksi; transportasi dan pergudangan; informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan

asuransi; real estate; dan jasa perusahaan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kesepuluh lapangan usaha tersebut mengalami peningkatan produktivitas kapital setelah satu atau dua tahun.

Selain kesepuluh lapangan usaha tersebut, ada beberapa aktivitas ekonomi yang justru menjadi tidak efisien setelah satu atau dua tahun penanaman modal. Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; penyediaan akomodasi dan makan minum; administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; serta jasa lainnya mengalami inefisiensi setelah satu atau dua tahun penanaman modal ditandai dengan kenaikan koefisien ICOR yang meningkat pada lag 1 dan lag 2.

d. Keterbandingan Angka ICOR

Perbandingan hasil penghitungan ICOR dengan menggunakan metode standar dan metode akumulasi pada periode 2013-2017 tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Perbandingan hasil penghitungan ICOR tersebut disajikan pada Tabel 4.17.

Seperti telah dijabarkan sebelumnya bahwa penghitungan ICOR dengan menggunakan metode standar dan metode akumulasi pada periode ini menghasilkan nilai total ICOR yang sama. Namun demikian jika dilihat lebih lanjut menurut lapangan usaha, masing-masing metode tersebut menghasilkan besaran ICOR yang berbeda ada yang lebih rendah dan sebaliknya ada yang lebih tinggi. Perbedaan hasil penghitungan yang relatif besar hanya terjadi pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Hasil penghitungan ICOR pada lapangan usaha ini dengan menggunakan metode standar lag 0 sebesar 1,80; yang berarti untuk menambah output sebesar 1 juta rupiah diperlukan investasi sebesar 1,80 juta rupiah. Sementara dari hasil penghitungan dengan metode akumulasi menunjukkan investasi yang dibutuhkan sedikit lebih tinggi yaitu sekitar 3,66 juta rupiah.

Tabel 4.17. ICOR Lapangan Usaha Metode Standar dan Akumulasi, Indeks Perkembangan PDRB, dan Laju Pertumbuhan Ekonomi, 2013-2017

Lapangan Usaha	ICOR 2013-2017				Indeks Perkem- bangan PDRB Konstan 2017, (2010=100)	Rata-rata Laju Pertum- buhan Ekonomi 2013-2017
	Standar			Akumu- lasi		
	Lag-0	Lag-1	Lag-2			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,80	2,03	2,29	3,66	109,35	0,84
a. Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian	1,90	2,10	2,32	4,14	108,20	0,52
b. Kehutanan dan Penebangan Kayu	3,51	3,77	4,06	3,35	112,24	2,60
c. Perikanan	1,62	1,72	1,84	1,61	131,78	4,07
2. Pertambangan dan Penggalian	3,26	2,95	2,58	3,14	120,32	1,50
3. Industri Pengolahan	5,22	4,56	3,87	5,17	128,91	4,18
4. Pengadaan Listrik dan Gas	14,98	12,79	10,54	15,17	160,12	6,71
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	5,85	4,94	4,04	5,88	118,63	3,15
6. Konstruksi	4,77	4,41	4,01	4,76	142,69	5,56
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,47	4,60	4,73	4,49	151,34	5,92
8. Transportasi dan Pergudangan	13,48	12,60	11,64	13,55	136,27	4,22
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,35	6,88	7,45	6,33	153,11	6,07
a. Penyediaan Akomodasi	3,97	4,28	4,64	3,97	179,28	7,83
b. Penyediaan Makan Minum	7,11	7,72	8,35	7,08	147,77	5,66
10. Informasi dan Komunikasi	5,90	5,27	4,61	5,90	165,29	6,42
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,94	2,86	2,76	2,83	162,13	6,06
a. Jasa Perantara Keuangan	2,42	2,32	2,20	2,41	167,85	6,27
b. Lainnya	4,47	4,38	4,24	4,52	148,27	5,48
12. Real Estate	4,66	4,56	4,42	4,67	149,20	5,97
13. Jasa Perusahaan	5,48	5,37	5,20	5,52	150,26	6,04
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan , dan Jaminan Sosial Wajib	6,90	7,17	7,43	6,92	145,61	5,39
15. Jasa Pendidikan	5,09	5,34	5,58	5,11	149,21	5,94
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,47	5,75	6,00	5,47	158,78	6,28
17. Jasa lainnya	5,28	5,55	5,80	5,34	148,51	6,18
PDRB	5,68	5,58	5,38	5,68	142,71	5,11

Sumber: BPS Provinsi DIY (Diolah)

Perkembangan nilai tambah menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan 2010 menunjukkan bahwa indeks perkembangan PDRB D.I. Yogyakarta pada tahun 2017 mencapai 142,71. Artinya dalam kurun waktu 2010-2017

peningkatan PDRB D.I. Yogyakarta mencapai 42,71 persen. Apabila dilihat lebih rinci menurut lapangan usaha, menunjukkan bahwa lapangan usaha informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; serta pengadaan listrik dan gas berkembang relatif pesat dibandingkan lapangan usaha lain dengan indeks perkembangan berturut-turut masing-masing 165,29; 162,13; dan 160,12. Selain ketiga jenis lapangan usaha tersebut, ada empat lapangan usaha yang memiliki nilai indeks di atas 150, yaitu jasa kesehatan dan kegiatan sosial (158,78); penyediaan akomodasi dan makan minum (153,11); perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (151,34); serta jasa perusahaan (150,26). Angka indeks perkembangan di atas 150 menunjukkan bahwa selama kurun waktu tujuh tahun nilai tambah lapangan usaha tersebut sudah meningkat lebih dari 50 persen dibandingkan dengan kondisi tahun 2010. Sementara itu lapangan usaha lain memiliki indeks perkembangan dengan kisaran 109 sampai 149, dengan indeks perkembangan terendah adalah lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 109,35. Secara umum dapat dikatakan bahwa perekonomian D.I. Yogyakarta pada tahun 2017 telah meningkat sebesar 42,71 persen dibandingkan dengan kondisi tahun 2010.

4.5. Kebutuhan dan Pilihan Investasi

Kebutuhan investasi selama periode 2018-2022 dihitung berdasarkan angka ICOR dengan metode standard untuk periode 2013-2017 dengan menggunakan pendekatan investasi sama dengan PMTB plus perubahan inventori (Tabel 4.7). Target pertumbuhan ekonomi D.I. Yogyakarta yang dipergunakan diperoleh dari Analisis Makroekonomi D.I. Yogyakarta dan target pertumbuhan kabupaten/kota diperoleh dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017. Hasil penghitungan kebutuhan investasi berdasarkan target pertumbuhan ekonomi di D.I. Yogyakarta dan masing-masing kabupaten/kota disajikan pada Tabel 4.18 sampai dengan Tabel 4.23.

Selama periode 2013-2017, koefisien ICOR D.I. Yogyakarta sebesar 5,61 dan asumsi laju inflasi sebesar 6,17 persen per tahun. Target pertumbuhan ekonomi D.I. Yogyakarta pada tahun 2018 ditetapkan sebesar 5,80 persen. Untuk mencapai target pertumbuhan tersebut diperlukan investasi sebesar 48,13 triliun rupiah. Pada tahun 2019, dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,11 persen maka diperlukan investasi sebesar 56,95 triliun rupiah. Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 6,26 persen dan kebutuhan investasi sekitar 65,73 triliun rupiah. Pada tahun 2021 untuk mencapai target pertumbuhan sebesar 6,38 persen diperlukan investasi sebesar 75,58 triliun rupiah. Terakhir, pada tahun 2022 diperlukan investasi sebesar 87,24 triliun rupiah untuk mencapai target pertumbuhan sebesar 6,52 persen.

Tabel 4.18. Kebutuhan Investasi dan Target Pertumbuhan Ekonomi D.I. Yogyakarta, 2018-2022

Tahun	Target Pertum- buhan (%)	PDRB Konstan (Juta Rupiah)	ΔY (Juta Rupiah)	% Investasi terhadap PDRB Konstan	Kebutuhan Investasi	
					adh konstan (Juta Rupiah)	adh Berlaku (Juta Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2018	5,80	97.654.098	5.353.438	31,16	30.433.308	48.127.758
2019	6,11	103.620.763	5.966.665	32,73	33.919.391	56.950.342
2020	6,26	110.107.423	6.486.660	33,49	36.875.464	65.733.626
2021	6,38	117.132.277	7.024.854	34,09	39.934.996	75.579.770
2022	6,52	124.769.301	7.637.024	34,80	43.415.074	87.235.707

Catatan:

ICOR Standar 2013-2017	:	5,68
Implisit Investasi 2017	:	148,95
PDRB Konstan 2017	:	92.300.660
Asumsi Laju Implisit	:	6,17

ICOR rata-rata untuk Kabupaten Kulon Progo selama periode 2013-2017 adalah sebesar 6,10 dan asumsi laju inflasi sebesar 6,09 persen. Dengan demikian untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 7,00 persen pada tahun 2018 diperlukan investasi sebesar 4,77 triliun rupiah. Selanjutnya, target pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai pada tahun 2019 adalah sebesar 7,90 persen dan investasi yang diperlukan adalah sebesar 6,11 triliun rupiah. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kulon Progo ditargetkan mencapai 7,95

persen dan untuk mencapai target tersebut dibutuhkan investasi sebesar 7,04 triliun rupiah. Sementara itu nilai investasi yang diperlukan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 7,97 persen (2021) dan 8,00 persen (2022) masing-masing adalah sebesar 8,08 triliun rupiah dan 9,30 triliun rupiah.

Tabel 4.19. Kebutuhan Investasi dan Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kulonprogo, 2018-2022

Tahun	Target Pertumbuhan (%)	PDRB Konstan (Juta Rupiah)	ΔY (Juta Rupiah)	% Investasi terhadap PDRB Konstan	Kebutuhan Investasi	
					adh konstan (Juta Rupiah)	adh Berlaku (Juta Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2018	7,00	7.461.779	488.154	39,92	2.978.376	4.771.589
2019	7,90	8.051.260	589.481	44,67	3.596.602	6.112.882
2020	7,95	8.691.335	640.075	44,93	3.905.295	7.041.701
2021	7,97	9.384.034	692.699	45,04	4.226.372	8.084.656
2022	8,00	10.134.757	750.723	45,19	4.580.390	9.295.365

Catatan:

ICOR Standar 2013-2017	:	6,10
Implisit Investasi 2017	:	151,01
PDRB Konstan 2017	:	6.973.626
Asumsi Laju Implisit	:	6,09

Tabel 4.20. Kebutuhan Investasi dan Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul, 2018-2022

Tahun	Target Pertumbuhan (%)	PDRB Konstan (Juta Rupiah)	ΔY (Juta Rupiah)	% Investasi terhadap PDRB Konstan	Kebutuhan Investasi	
					adh konstan (Juta Rupiah)	adh Berlaku (Juta Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2018	5,60	18.175.681	963.862	25,51	4.636.059	7.352.056
2019	5,80	19.229.871	1.054.190	26,37	5.070.524	8.545.339
2020	5,95	20.374.048	1.144.177	27,01	5.503.354	9.856.452
2021	6,10	21.616.865	1.242.817	27,65	5.977.799	11.377.610
2022	6,20	22.957.111	1.340.246	28,08	6.446.419	13.039.019

Catatan:

ICOR Standar 2013-2017	:	4,81
Implisit Investasi 2017	:	149,23
PDRB Konstan 2017	:	17.211.819
Asumsi Laju Implisit	:	6,27

Nilai ICOR rata-rata Kabupaten Bantul selama lima tahun terakhir sebesar 4,81 dan asumsi laju inflasi sebesar 6,27 persen. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,60 persen pada tahun 2018 diperlukan investasi sebesar 7,35 triliun rupiah. Selanjutnya, target pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai pada tahun 2019 di Kabupaten Bantul adalah sebesar 5,80 persen dan investasi yang diperlukan adalah sebesar 8,55 triliun rupiah. Pada tahun 2020-2021 target pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai secara berturut-turut adalah sebesar 5,95 persen; 6,10 persen; dan 6,20 persen. Untuk mencapai target pertumbuhan tersebut maka pemerintah Kabupaten Bantul memerlukan tambahan investasi masing-masing sebesar 9,86 triliun rupiah (2020); 11,38 triliun rupiah (2021); dan 13,04 triliun rupiah (2022).

Tabel 4.21. Kebutuhan Investasi dan Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gunungkidul, 2018-2022

Tahun	Target Pertumbuhan (%)	PDRB Konstan (Juta Rupiah)	ΔY (Juta Rupiah)	% Investasi terhadap PDRB Konstan	Kebutuhan Investasi	
					adh konstan (Juta Rupiah)	adh Berlaku (Juta Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2018	5,25	12.927.325	644.831	27,59	3.566.621	5.601.545
2019	5,50	13.638.327	711.003	28,84	3.932.625	6.541.188
2020	5,70	14.415.712	777.385	29,83	4.299.789	7.574.337
2021	5,80	15.251.823	836.111	30,32	4.624.612	8.627.722
2022	6,05	16.174.559	922.735	31,55	5.103.737	10.083.993

Catatan:

ICOR Standar 2013-2017	:	5,53
Implisit Investasi 2017	:	148,30
PDRB Konstan 2017	:	12.282.494
Asumsi Laju Implisit	:	5,91

Selama periode 2013-2017, rata-rata ICOR di Kabupaten Gunungkidul adalah sebesar 5,53 dan asumsi laju inflasi sebesar 5,91 persen. Pada tahun 2018 target pertumbuhan ekonomi yang diharapkan sebesar 5,25 persen. Dengan demikian, diperlukan investasi sebesar 5,60 triliun rupiah. Selanjutnya untuk mencapai target pertumbuhan sebesar 5,50 pada tahun 2019 maka investasi yang diperlukan sebesar 6,54 triliun rupiah. Untuk periode 2020-2022, pemerintah Kabupaten Gunungkidul menargetkan pertumbuhan ekonomi secara

berturut-turut sebesar 5,70 persen; 5,80 persen; dan 6,05 persen. Untuk mencapai target tersebut diperlukan investasi masing-masing sebesar 7,57 triliun rupiah; 8,63 triliun rupiah; dan 10,08 triliun rupiah.

Di Kabupaten Sleman, ICOR rata-rata lima tahun terakhir sebesar 6,62 dan asumsi laju inflasi sebesar 6,58 persen. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,80 persen pada tahun 2018 diperlukan investasi sebesar 19,28 triliun rupiah. Selanjutnya, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,90 persen pada tahun 2019, investasi yang diperlukan adalah sebesar 22,11 triliun rupiah. Pada tahun 2020, Kabupaten Sleman menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,05 persen. Target pertumbuhan tersebut dapat dicapai dengan menambah investasi sebesar 25,59 triliun rupiah. Sementara itu, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,15 persen dan 6,24 persen pada tahun 2021 dan 2022 diperlukan investasi masing-masing sebesar 29,41 triliun rupiah dan 33,78 triliun rupiah.

Tabel 4.22. Kebutuhan Investasi dan Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sleman, 2018-2022

Tahun	Target Pertumbuhan (%)	PDRB Konstan (Juta Rupiah)	ΔY (Juta Rupiah)	% Investasi terhadap PDRB Konstan	Kebutuhan Investasi	
					adh konstan (Juta Rupiah)	adh Berlaku (Juta Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2018	5,80	32.962.705	1.807.029	36,29	11.962.156	19.276.157
2019	5,90	34.907.504	1.944.800	36,88	12.874.167	22.111.741
2020	6,05	37.019.408	2.111.904	37,76	13.980.363	25.592.639
2021	6,15	39.296.102	2.276.694	38,35	15.071.236	29.406.158
2022	6,24	41.750.120	2.454.018	38,91	16.245.088	33.783.472

Catatan:

ICOR Standar 2013-2017	:	6,62
Implisit Investasi 2017	:	151,19
PDRB Konstan 2017	:	31.155.676
Asumsi Laju Implisit	:	6,58

Selama periode 2013-2017 ICOR rata-rata Kota Yogyakarta sebesar 5,68 dan asumsi laju inflasi sebesar 5,83. Target pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai oleh Kota Yogyakarta pada tahun 2018 adalah sebesar 5,35. Untuk

mencapai target pertumbuhan tersebut, investasi yang dibutuhkan adalah sebesar 10,50 triliun rupiah. Selanjutnya pada tahun 2019, target pertumbuhan sebesar 5,45 persen dan investasi yang dibutuhkan adalah sebesar 11,93 triliun rupiah. Sementara itu dalam periode 2020-2022 ditetapkan target pertumbuhan ekonomi tahunan berturut-turut sebesar 5,65 persen; 5,90 persen; dan 6,10 persen. Untuk mencapai target pertumbuhan tersebut diperlukan investasi masing-masing sebesar 13,80 triliun rupiah (2020); 16,11 triliun rupiah (2021); dan 18,66 triliun rupiah (2022).

Tabel 4.23. Kebutuhan Investasi dan Target Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta, 2018-2022

Tahun	Target Pertumbuhan (%)	PDRB Konstan (Juta Rupiah)	ΔY (Juta Rupiah)	% Investasi terhadap PDRB Konstan	Kebutuhan Investasi	
					adh konstan (Juta Rupiah)	adh Berlaku (Juta Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2018	5,35	26.096.807	1.325.277	25,53	6.661.673	10.500.807
2019	5,45	27.519.083	1.422.276	25,98	7.149.252	11.925.994
2020	5,65	29.073.911	1.554.828	26,88	7.815.542	13.797.099
2021	5,90	30.789.272	1.715.361	28,00	8.622.480	16.108.516
2022	6,10	32.667.417	1.878.146	28,90	9.440.739	18.664.828

Catatan:

ICOR Standar 2013-2017	:	5,03
Implisit Investasi 2017	:	148,95
PDRB Konstan 2017	:	24.771.530
Asumsi Laju Implisit	:	5,83

Keterbatasan anggaran pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota menjadi kendala dalam penyediaan dana investasi. Untuk itu, diperlukan dukungan dari pihak swasta dan rumah tangga untuk turut berperan aktif dalam penanaman modal di wilayah D.I. Yogyakarta. Demi keberhasilan kegiatan investasi, untuk investasi swasta baik dari dalam maupun luar provinsi serta luar negeri, pemerintah perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan untuk melakukan investasi pada suatu sektor ekonomi. Beberapa hal berikut menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan pilihan investasi. Pertama, prioritas untuk

melakukan investasi dilakukan pada lapangan usaha dengan koefisien ICOR kecil. Dari sisi ekonomi, lapangan usaha ini menunjukkan tingkat efisiensi yang lebih tinggi. Kedua, lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja yang besar. Meskipun mempunyai angka ICOR yang relatif tinggi, lapangan usaha ini bisa menjadi prioritas dalam berinvestasi. Investasi pada lapangan usaha ini akan membantu mengatasi masalah pengangguran di wilayah tersebut. Ketiga, lapangan usaha yang mempunyai *backward* dan *forward linkages* yang tinggi. Investasi pada lapangan usaha tersebut akan mempunyai *multiplier effect* yang relatif lebih besar. Investasi pada lapangan usaha ini akan menciptakan pasar bagi komoditi lainnya, sehingga akan menggerakkan perekonomian wilayah. Keempat, lapangan usaha yang mempunyai potensi pasar cukup besar. Selain itu, pilihan investasi juga harus mempertimbangkan kepemilikan sumber daya (*resource endowments*) lokal, kebijakan pemerintah mengenai konservasi sumber daya alam, dan faktor lainnya.

Hasil penghitungan ICOR selama periode 2013-2017 menggambarkan bahwa aktivitas ekonomi pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan; pertambangan dan penggalian; konstruksi perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; jasa keuangan dan asuransi; serta real estate mempunyai besaran ICOR yang relatif rendah (kisaran 2-4). Di sisi lain, penyerapan tenaga kerja pada tahun 2013 dan 2017, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; serta industri pengolahan merupakan lapangan usaha dengan kemampuan menyerap tenaga kerja yang relatif tinggi dengan proporsi di atas 14 persen (Tabel 4.24). Selanjutnya dilihat dari dampak penggandanya (*multiplier effects*), lapangan kerja industri pengolahan mempunyai dampak pengganda yang relatif tinggi (BPS DIY dan BAPPEDA DIY, 2012).

Berdasarkan beberapa indikator di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor bisa dijadikan prioritas utama investasi. Hal ini karena lapangan usaha tersebut mempunyai ICOR yang relatif rendah, penyerapan tenaga kerja cukup tinggi, serta perkembangannya relatif pesat. Prioritas investasi berikutnya adalah

pertanian, kehutanan, dan perikanan karena mempunyai ICOR yang relatif rendah, kemampuan menyerap tenaga kerja tinggi, serta ketersediaan sumber daya lahan dan air yang relatif memadai di D.I. Yogyakarta. Selanjutnya, lapangan usaha industri pengolahan bisa menjadi prioritas investasi berikutnya. Meskipun angka ICOR industri pengolahan relatif agak tinggi namun mempunyai serapan tenaga kerja yang cukup tinggi, yaitu sebesar 14,12 persen pada tahun 2013 dan 16,57 persen pada tahun 2017. Selain itu berdasarkan penghitungan Tabel Input Output D.I. Yogyakarta 2010, industri pengolahan mempunyai *forward linkages* dan *backward linkages* yang relatif tinggi.

Tabel 4.24. Penyerapan Tenaga Kerja D.I. Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha, 2013 dan 2017

Lapangan Usaha	Tenaga Kerja		Penyerapan Tenaga Kerja (%)	
	2013	2017	2013	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	531.559	451.861	28,18	22,01
2. Pertambangan dan Penggalan	9.075	14.413	0,48	0,70
3. Industri Pengolahan	266.369	340.258	14,12	16,57
4. Pengadaan Listrik dan Gas	4.873	3.633	0,26	0,18
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	1.314	4.507	0,07	0,22
6. Konstruksi	104.506	153.306	5,54	7,47
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	383.404	383.976	20,33	18,70
8. Transportasi dan Pergudangan	50.772	56.809	2,69	2,77
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	124.959	187.079	6,63	9,11
10. Informasi dan Komunikasi	10.762	16.642	0,57	0,81
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	30.375	30.290	1,61	1,48
12. Real Estate	2.715	3.700	0,14	0,18
13. Jasa Perusahaan	25.752	47.342	1,37	2,31
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	75.732	73.129	4,02	3,56
15. Jasa Pendidikan	108.633	113.198	5,76	5,51
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	38.574	35.632	2,05	1,74
17. Jasa lainnya	116.697	137.393	6,19	6,69
Total	1.886.071	2.053.168	100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi DIY (Diolah dari Sakernas)

Lapangan usaha jasa pendidikan juga bisa menjadi prioritas investasi lainnya, karena mempunyai serapan tenaga kerja yang cukup tinggi meskipun

dengan besaran ICOR yang relatif tinggi (sekitar 5). Apalagi Yogyakarta memang terkenal sebagai salah satu daerah tujuan untuk menuntut ilmu. Selanjutnya jika pertimbangan utama hanya nilai ICOR, lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi; real estate; dan konstruksi bisa dijadikan pilihan dalam melakukan investasi di D.I. Yogyakarta. Sebaliknya, jika penyerapan lapangan usaha merupakan pertimbangan utama maka lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum dapat menjadi alternatif pemilihan investasi. Alternatif investasi lain adalah konstruksi karena mempunyai serapan tenaga kerja yang relatif tinggi dan besaran ICOR relatif rendah.

Di sisi lain, lapangan usaha pertambangan dan penggalian meskipun mempunyai nilai ICOR yang relatif rendah tidak direkomendasikan untuk menjadi pilihan prioritas investasi karena potensi sumber daya alam tambang dan mineral relatif kecil. Potensi lapangan usaha ini sebagian besar berupa bahan galian batu dan pasir. Selain potensi yang relatif kecil, isu kerusakan lingkungan menjadi salah satu alasan untuk tidak terlalu mengembangkan kegiatan penggalian. Seperti diketahui bahwa kegiatan penggalian ini bisa mengganggu keseimbangan alam sehingga diperlukan upaya untuk melindungi daerah aliran sungai (DAS).

Pertimbangan lain untuk melakukan investasi selain dari nilai ICOR dan serapan tenaga kerja adalah potensi ekonomi wilayah tersebut. Salah satu indikator untuk melihat potensi ekonomi suatu wilayah dengan melihat jumlah kegiatan usaha di wilayah itu. Berdasarkan hasil Sensus Ekonomi 2016 (SE2016) ada tiga kategori kegiatan ekonomi yang cukup dominan di D.I. Yogyakarta. Ketiga kategori tersebut adalah kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (35,32%); kategori industri pengolahan (27,44%); dan kategori penyediaan akomodasi dan makan minum (17,43%). Tenaga kerja yang terserap dalam kegiatan usaha tersebut masing-masing sebesar 25,69 persen, 28,38 persen, dan 13,87 persen. Konsep tenaga kerja di sini adalah jumlah orang yang bekerja pada lapangan usaha di D.I. Yogyakarta, baik penduduk D.I. Yogyakarta maupun luar D.I. Yogyakarta. Data Sensus Ekonomi 2016 mencakup semua lapangan usaha selain pertanian.

Tabel 4.25. Jumlah Usaha/Perusahaan dan Jumlah Tenaga Kerja menurut Kategori di D.I. Yogyakarta, 2016

Kategori	Usaha/Perusahaan		Tenaga Kerja	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	188.517	35,32	339.810	25,69
Industri pengolahan	146.440	27,44	375.475	28,39
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	93.012	17,43	183.410	13,87
Lainnya	105.701	19,81	423.847	32,05
Jumlah	533.670	100,00	1.322.542	100,00

Sumber: BPS Provinsi DIY (Diolah dari hasil Sensus Ekonomi 2016)

Berdasarkan skala usaha, investasi sebaiknya diprioritaskan pada skala usaha mikro dan kecil (UMK). Hasil SE2016 menunjukkan bahwa UMK mendominasi perekonomian D.I. Yogyakarta dengan *share* mencapai 98,36 persen, sedangkan usaha menengah dan besar (UMB) porsinya kurang dari dua persen dari jumlah seluruh usaha. Dari sisi ketenagakerjaan, UMK mempunyai keunggulan dalam menyerap tenaga kerja dalam jumlah melimpah dan tidak banyak memerlukan spesifikasi keahlian. Kondisi ini bisa menjadi peluang bagi stakeholder untuk memberikan pembinaan ketrampilan teknis usaha.

Tabel 4.26. Sebaran Perusahaan/Usaha non-Pertanian di D.I. Yogyakarta menurut Skala Usaha, 2016

Skala Usaha	Perusahaan/Usaha		Tenaga Kerja	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Usaha Mikro-Kecil (UMK)	524.935	98,36	1.044.498	78,98
Usaha Menengah-Besar (UMB)	8.735	1,64	278.044	21,02
Jumlah	533.670	100,00	1.322.542	100,00

Sumber: BPS Provinsi DIY (Diolah dari hasil Sensus Ekonomi 2016)

Secara spasial, jumlah perusahaan/usaha masih terkonsentrasi di Kabupaten Sleman, Bantul, dan Gunungkidul (Gambar 4.8). Total perusahaan/usaha non-pertanian di D.I. Yogyakarta ada sebanyak 533.670 unit. Sekitar 27,25 persen diantaranya berada di Kabupaten Sleman, sebesar 26,49 persen berlokasi di Kabupaten Bantul, dan sebesar 21,06 persen berada di Kabupaten

Gunungkidul. Sementara itu sisanya tersebar di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo masing-masing sebesar 13,08 persen. Terkait dengan kegiatan investasi, sudah semestinya kegiatan investasi diarahkan ke seluruh wilayah D.I. Yogyakarta sehingga pemerataan kegiatan ekonomi antarwilayah sesuai dengan potensi masing-masing dapat dicapai. Dengan pemerataan tersebut diharapkan mampu mendorong roda perekonomian D.I. Yogyakarta agar dapat menguat di seluruh penjuru wilayah sehingga akan berdampak positif untuk mengurangi kesenjangan pendapatan.



Sumber: BPS Provinsi DIY (Diolah dari hasil Sensus Ekonomi 2016)

Gambar 4.8. Distribusi Usaha/Perusahaan Non-Pertanian di D.I. Yogyakarta menurut Kabupaten/Kota, 2016 (persen)

4.6. Hubungan ICOR, GDI, GDS, Laju Pertumbuhan Ekonomi, dan Inflasi

Hubungan ICOR, Investasi Bruto (*Gross Domestic Investment*) dan Tabungan Bruto (*Gross Domestic Saving*) dapat diturunkan dari persamaan identitas model makro ekonomi berikut:

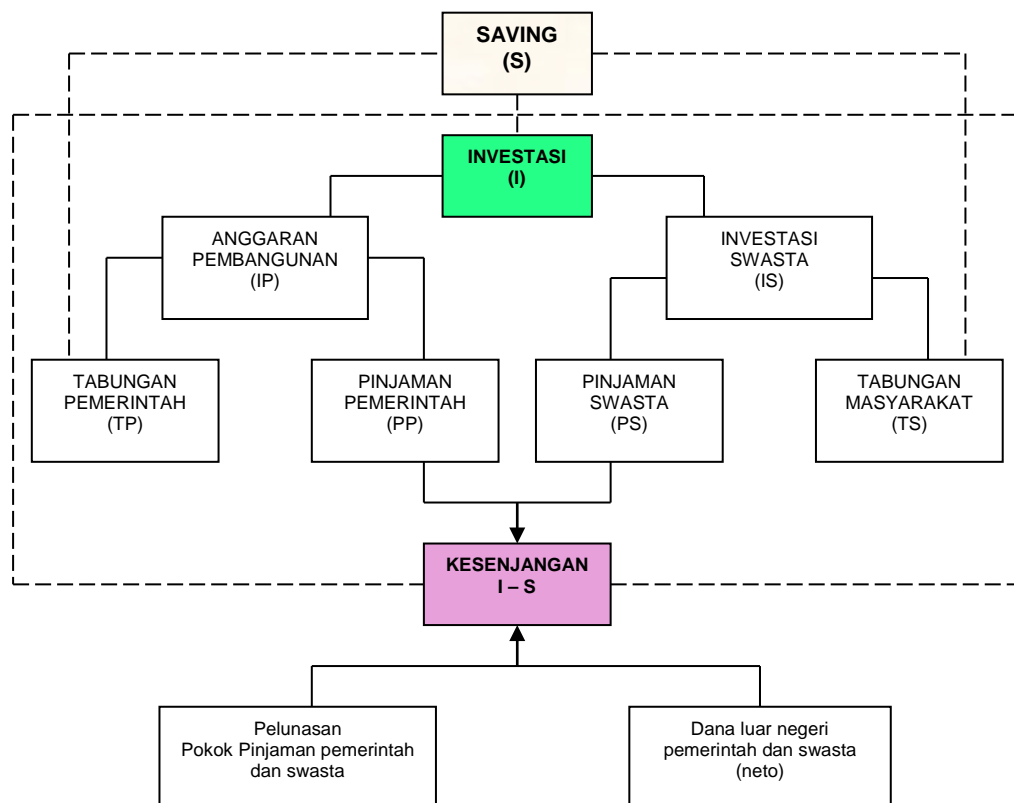
$$Y = C + G + I + (X - M)$$

keterangan:

- Y = Pendapatan Nasional atau Produk Domestik Regional Bruto (PDB/PDRB)
- C = Konsumsi Rumah Tangga
- G = Konsumsi Pemerintah
- I = Investasi

X = Ekspor
M = Impor

Berdasarkan persamaan di atas dapat dikatakan bahwa Pendapatan Nasional (PDB) suatu negara atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah dipergunakan untuk konsumsi rumah tangga (C), konsumsi pemerintah (G), investasi (I), dan ekspor neto (X-M). Rasio investasi (I) terhadap PD(R)B (Y) mencerminkan porsi investasi domestik bruto atau *Gross Domestic Investment* (GDI); sedangkan rasio tabungan (S) terhadap PD(R)B (Y) akan mencerminkan porsi tabungan domestik bruto atau *Gross Domestic Saving* (GDS), di mana tabungan sama dengan investasi ditambah ekspor neto $\{S = I + (X-M)\}$.



Sumber: Widodo (1990)

Gambar 4.9. Kesenjangan Investasi dan Tabungan

Untuk mengetahui gambaran mengenai kebutuhan investasi dan sumber pembiayaan dapat dilihat pada Gambar 4.9. Teori *Two Gap Model*

menunjukkan adanya **defisit** terhadap sumber pembiayaan pembangunan karena tabungan lebih kecil dari kebutuhan investasi ($I-S = \text{Resource Gap}$) (Widodo, 1990).

Dari Gambar 4.9, secara ringkas dapat diuraikan bahwa investasi diperlukan untuk memenuhi anggaran pembangunan seperti yang tercantum dalam APBN(D) dan kebutuhan investasi oleh swasta. Kebutuhan ini dibiayai dengan tabungan pemerintah dalam APBN(D), jika belum mencukupi maka dipenuhi melalui pinjaman atau bantuan luar negeri. Selain itu juga dipenuhi dari tabungan masyarakat dan pinjaman swasta. Pinjaman pemerintah bersama-sama dengan pinjaman swasta inilah merupakan kesenjangan antara investasi dengan tabungan.

Tabel 4.27 menyajikan perkembangan ICOR, GDI, GDS, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi di D.I. Yogyakarta selama periode 2013-2017. Ada beberapa kecenderungan utama dari perkembangan beberapa indikator tersebut. Pertama, selama periode 2013-2015 proses produksi cenderung kurang efisien terlihat dari besaran ICOR yang terus meningkat. Namun demikian selama dua tahun terakhir besaran ICOR mengalami kecenderungan yang menurun.

Kedua, nilai GDI selama periode pengamatan cenderung meningkat. Hal ini menjadi sinyal yang cukup baik karena menunjukkan porsi PDRB yang diinvestasikan cenderung meningkat selama lima tahun terakhir. Di sisi lain, perkembangan GDS menunjukkan kecenderungan menurun yang berarti bahwa porsi PDRB yang ditabung juga cenderung menurun. Kondisi GDI yang semakin meningkat dan GDS yang cenderung menurun mengakibatkan gap antara GDI dan GDS ($I-S \text{ Gap}$) semakin besar. Dalam keadaan seperti ini dapat diinterpretasikan bahwa porsi pembiayaan investasi dari luar wilayah D.I. Yogyakarta cenderung semakin meningkat. Semakin besar $I-S$ gap akan semakin besar pula porsi nilai tambah yang akan masuk dari luar wilayah D.I. Yogyakarta. Sebagai contoh, investasi yang digunakan untuk membangun hotel-hotel besar dan mall atau supermall di D.I. Yogyakarta kemungkinan berasal dari luar wilayah ini.

Ketiga, ada kecenderungan perlambatan laju pertumbuhan ekonomi selama periode 2013-2015 dari 5,47 persen di tahun 2013 menjadi 4,95 persen pada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2016 dan 2017 perekonomian D.I. Yogyakarta mengalami akselerasi dengan laju pertumbuhan berturut-turut sebesar 5,05 persen dan 5,26 persen. Keempat, tingkat inflasi cenderung berada pada level di bawah ambang psikologis dengan besaran di bawah 10 persen selama lima tahun terakhir.

Tabel 4.27. Perkembangan ICOR, GDI, GDS, Laju Pertumbuhan Ekonomi, dan Inflasi di D.I. Yogyakarta, 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ICOR	5,36	5,70	5,91	5,85	5,61
GDI	29,69	30,94	31,50	31,57	32,32
GDS	13,82	12,57	12,15	12,65	11,47
LPE	5,47	5,17	4,95	5,05	5,26
IS-Gap(%)	15,88	18,37	19,35	18,92	20,85
Nominal IS-Gap (miliar Rp.)	13.482	17.054	19.626	20.812	24.851
INFLASI	7,32	6,59	3,09	2,29	4,20

Sumber: BPS Provinsi DIY (Diolah)

Keterangan: *Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

ICOR : *Incremental Capital Output Ratio*

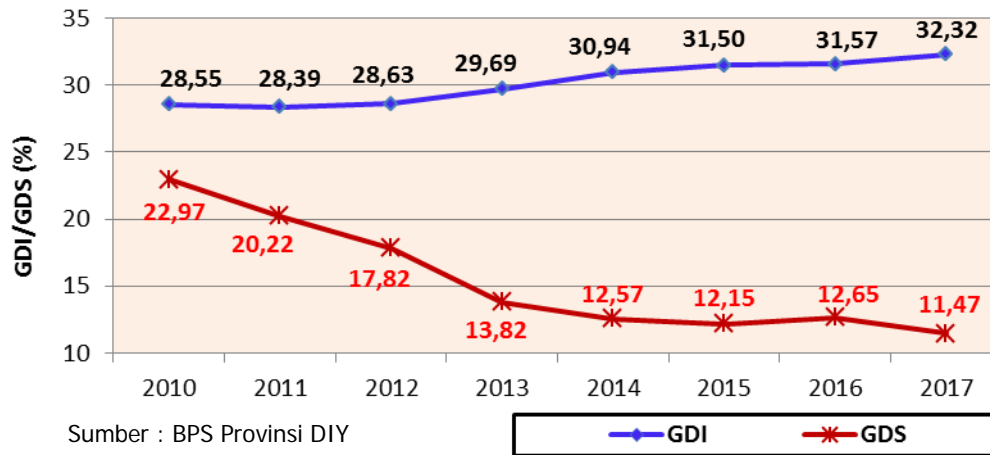
GDI : *Gross Domestic Investment*

GDS : *Gross Domestic Saving*

LPE : Laju Pertumbuhan Ekonomi

Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa gap antara GDI dan GDS di D.I. Yogyakarta mempunyai kecenderungan semakin melebar. Kondisi ini bisa menjadi sinyal penurunan dari kemampuan investasi dari dalam wilayah D.I. Yogyakarta sendiri. Dengan demikian, untuk mengatasi kebutuhan modal bagi proses produksi kegiatan ekonomi di D.I. Yogyakarta maka diperlukan investasi dari luar D.I. Yogyakarta, baik dari luar wilayah maupun luar negeri. Demi mendorong masuknya investasi dari luar tersebut diperlukan iklim investasi yang kondusif. Selain mengandalkan investor luar, perlu juga dipacu jiwa kewirausahaan dari masyarakat D.I. Yogyakarta sehingga mampu menumbuhkan keberanian untuk melakukan investasi yang pada gilirannya akan mampu

menciptakan lapangan kerja dan aktif berperan terhadap pergerakan roda perekonomian daerah.



Gambar 4.10. Perkembangan GDI dan GDS di D.I.Yogyakarta, 2010-2017

Daya saing daerah merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan masuknya investasi ke daerah yang bersangkutan. Daya saing daerah berkaitan dengan kemampuan menarik investor luar tidak terjadi secara instan. Pembentukan daya saing investasi berlangsung secara terus menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Oleh karena itu, perlu dikaji faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing investasi suatu daerah.

Beberapa faktor yang mempengaruhi daya saing investasi antara lain: ekonomi, sosial, politik, budaya, dan kelembagaan, serta infrastruktur diyakini merupakan beberapa faktor pembentuk daya saing investasi suatu negara atau daerah. Secara umum investasi atau penanaman modal, baik dalam bentuk penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) membutuhkan adanya iklim usaha yang kondusif, kemudahan akses serta kejelasan prosedur perijinan dalam kegiatan investasi. Kondisi makro ekonomi daerah yang bersangkutan seperti tingkat bunga, aturan perpajakan, dan laju inflasi juga mempengaruhi iklim investasi daerah (Mankiw, 2007).

Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan daerah dalam meningkatkan daya saing investasi, adalah kemampuan daerah tersebut dalam merumuskan

kebijakan yang berkaitan dengan investasi dan dunia usaha, serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Hal lainnya yang juga penting untuk diperhatikan dalam upaya menarik investor, selain makro ekonomi yang kondusif juga adanya pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur dalam arti luas. Kondisi inilah yang mampu menggerakkan lapangan usaha swasta untuk ikut serta dalam menggerakkan roda ekonomi.

Investasi membutuhkan iklim yang kondusif dan transparansi dalam hal legalitas pelayanan dan prosedur investasi. Daerah harus mampu membuat *business planning map* tentang peluang investasi daerahnya berdasarkan *feasibility-study* yang matang. Perlu dibentuk kawasan-kawasan investasi berdasarkan peruntukannya. Selain itu, juga diperlukan pembenahan kualitas dan kuantitas infrastruktur.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

5.2. Rekomendasi

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian tentang penghitungan ICOR di D.I. Yogyakarta selama periode 2013-2017 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Selama periode 2013-2017 pertumbuhan ekonomi D.I. Yogyakarta rata-rata mencapai 5,11 persen per tahun. Lapangan usaha dengan laju pertumbuhan rata-rata di atas 6 persen per tahun adalah listrik dan gas yang tumbuh sebesar 6,71 persen; disusul oleh informasi dan komunikasi sebesar 6,42 persen; jasa kesehatan sebesar 6,28 persen; jasa lainnya sebesar 6,18 persen; akomodasi dan makan/minum sebesar 6,07 persen; jasa keuangan sebesar 6,06 persen; dan jasa perusahaan sebesar 6,04 persen.
2. Investasi di D.I. Yogyakarta selama periode pengamatan terus meningkat. Pada tahun 2013 nilai investasi tercatat sebesar 25,22 triliun rupiah atas dasar harga berlaku dan 21,02 triliun rupiah atas dasar harga konstan 2010, kemudian pada tahun 2017 meningkat menjadi 38,52 triliun rupiah atas dasar harga berlaku dan 25,86 triliun rupiah atas dasar harga konstan 2010. Ditinjau menurut lapangan usaha, 6 (enam) aktivitas ekonomi yang memberikan sumbangan terbesar selama periode 2013-2017 secara berturut-turut adalah lapangan usaha informasi dan komunikasi sekitar 13,71 persen; kemudian diikuti oleh penyediaan akomodasi dan makan minum sekitar 12,49 persen; transportasi dan pergudangan sebesar 11,59 persen; administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 9,36 persen; jasa pendidikan sebesar 8,51 persen; dan konstruksi sebesar 8,33 persen. Sementara lapangan usaha yang lain sumbangannya kurang dari 8 persen. Sedangkan jika ditinjau dari sisi spasial, investasi terbesar terjadi di Kabupaten Sleman dengan kontribusi sekitar 40,89 persen kemudian diikuti oleh Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Kulon Progo dengan kontribusi masing-masing 23,52 persen, 15,63 persen, 12,14 persen, dan 7,82 persen.

3. Hasil penghitungan ICOR total D.I. Yogyakarta pada tahun 2017 sebesar 5,61. Angka ICOR ini relatif lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,85. Di sisi lain, laju pertumbuhan ekonomi tahun 2017 mencapai 5,26 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 5,05 persen. Jika dibandingkan dengan ICOR provinsi di Pulau Jawa, D.I. Yogyakarta termasuk dalam tiga terendah di atas ICOR Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Timur yang masing-masing sebesar 5,56 dan 5,59.
4. Hasil penghitungan ICOR baik dengan metode standar maupun akumulasi, dengan dan tanpa memperhitungkan perubahan inventori menghasilkan angka yang tidak jauh berbeda. Lapangan usaha dengan ICOR di bawah 5 yaitu: pertanian, kehutanan, dan perikanan; jasa keuangan dan asuransi; pertambangan dan penggalian; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; jasa lainnya; jasa pendidikan; real estate; serta konstruksi. Sementara lapangan usaha dengan ICOR di atas 10 adalah pengadaan listrik dan gas serta transportasi dan pergudangan.
5. Dalam periode 2013-2017, rata-rata ICOR Kabupaten Sleman mempunyai nilai tertinggi yaitu sebesar 6,62; diikuti oleh Kabupaten Kulon Progo sebesar 6,10; Kabupaten Gunungkidul sebesar 5,53; Kota Yogyakarta 5,03; dan terendah adalah Kabupaten Bantul sebesar 4,81.
6. Kebutuhan investasi semakin meningkat dengan meningkatnya target pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi. Dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,80 persen pada tahun 2018, 6,26 persen pada tahun 2020, dan 6,52 persen pada tahun 2022, D.I. Yogyakarta membutuhkan investasi masing-masing sebesar 48,13 triliun rupiah, 65,73 triliun rupiah, dan 87,24 triliun rupiah. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo sebesar 7,00 persen (2018), 7,95 persen (2020), dan 8,00 persen (2022) diperlukan tambahan investasi masing-masing sebesar 4,77 triliun rupiah, 7,04 triliun rupiah, dan 9,30 triliun rupiah. Dengan target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul sebesar 5,60 persen (2018), 5,95 persen (2020), dan 6,20 persen (2022), diperlukan tambahan investasi sebesar 7,35 triliun rupiah (2018), 9,86 triliun rupiah (2020), dan 13,04 triliun rupiah (2022). Dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar

5,25 persen (2018), 5,70 persen (2020), dan 6,05 persen (2022), Kabupaten Gunungkidul membutuhkan investasi masing-masing sebesar 5,60 triliun rupiah, 7,57 triliun rupiah, dan 10,08 triliun rupiah. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman sebesar 5,80 persen (2018), 6,05 persen (2020), dan 6,24 persen (2022) diperlukan tambahan investasi masing-masing sebesar 19,28 triliun rupiah, 25,59 triliun rupiah, dan 33,78 triliun rupiah. Target pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta sebesar 5,35 persen (2018), 5,65 persen (2020), dan 6,10 persen (2022). Untuk mencapai target tersebut diperlukan tambahan investasi sebesar 10,50 triliun (2018), 13,80 triliun rupiah (2020) dan 18,66 triliun rupiah (2022).

7. *Gross Domestic Investment* (GDI) selama periode 2013-2017 cenderung meningkat dan *Gross Domestic Saving* (GDS) cenderung menurun, sehingga gap antara GDI dan GDS (*I-S Gap*) cenderung meningkat.

5.2. Rekomendasi

1. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan beberapa pertimbangan dalam menentukan keputusan investasi yang akan dilakukan antara lain tingkat efisiensi investasi, penyerapan tenaga kerja, keterkaitan ke hulu dan ke hilir (*backward* dan *forward linkages*), dan kepemilikan sumber daya dari daerah setempat (*resource endowment*).
2. Dengan mempertimbangkan beberapa indikator tersebut di atas, maka lapangan usaha perdagangan bisa dijadikan prioritas utama investasi. Hal ini karena lapangan usaha tersebut mempunyai ICOR relatif rendah dan serapan tenaga kerja yang cukup tinggi. Prioritas investasi berikutnya adalah kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan karena mempunyai ICOR yang relatif rendah, serapan tenaga kerja yang tinggi, dan kepemilikan sumber daya lahan dan air yang cukup tersedia di DIY. Mengingat lahan dan air merupakan faktor produksi utama dalam pengembangan sektor pertanian, maka diperlukan kebijakan Pemerintah Daerah yang tegas untuk mengendalikan laju konversi lahan pertanian terutama lahan pertanian yang produktif. Sektor pertanian diharapkan tetap dijaga pertumbuhan

dan kontribusinya guna menekan inflasi dan menjaga stabilitas di masyarakat, serta tersedianya input bagi lapangan usaha lainnya. Prioritas investasi selanjutnya adalah kategori industri pengolahan. Meskipun angka ICOR-nya relatif agak tinggi namun mampu menyerap tenaga kerja yang relatif tinggi, dan berdasarkan hasil analisis Tabel *Input Output* DIY 2010 mempunyai *backward* dan *forward linkages* yang relatif tinggi. Prioritas investasi bisa dilakukan pada kategori jasa keuangan dan asuransi yang mempunyai nilai ICOR relatif rendah serta laju pertumbuhan yang relatif tinggi selama lima tahun terakhir. Kategori Informasi dan komunikasi meskipun mempunyai nilai ICOR relatif tinggi, namun perkembangannya cukup pesat sehingga bisa dijadikan pilihan berikutnya untuk melakukan investasi.

3. DIY mempunyai potensi yang cukup besar untuk pengembangan sektor pariwisata. Untuk mendorong pertumbuhan sektor ini, investasi bisa diarahkan untuk memperbaiki infrastruktur dan sarana penunjang kegiatan pariwisata serta meningkatkan promosi obyek wisata dan *event* pariwisata di DIY.
4. Mengingat nilai ICOR yang masih relatif tinggi dan dominasi usaha mikro kecil pada struktur usaha di DIY maka perlu rekayasa teknologi tepat guna yang efisien dan efektif yang bisa diadopsi oleh kalangan pengusaha mikro kecil sehingga proses produksi mereka menjadi semakin efisien. Selain itu diperlukan pembinaan manajerial dalam pembiayaan, pengelolaan usaha, dan informasi pasar. Perlu dibangun semangat kewirausahaan bagi masyarakat DIY.
5. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa gap antara investasi dan tabungan di DIY semakin melebar dari tahun ke tahun. Sementara itu peran pemerintah dalam pembentukan investasi tidak cukup besar. Dengan demikian, untuk memenuhi kebutuhan investasi dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi yang diharapkan, diperlukan investasi dari luar DIY. Pemerintah DIY perlu meningkatkan pelayanan, promosi, deregulasi, dan kebijakan-kebijakan yang kondusif seperti: transparansi, kemudahan, serta percepatan dalam hal pelayanan dan prosedur perijinan, penghapusan *high cost economy*; jaminan situasi politik, sosial, keamanan yang lebih stabil; serta promosi investasi yang lebih intensif.



DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. 1988. Ekonomi Pembangunan. Edisi Pertama. Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN. Yogyakarta.
- BPS. 2004. Incremental Capital Output Ratio Sektor Industri Pengolahan Tahun 1990-2002. Jakarta
- BPS DIY. 2007. Analisis Profil Perusahaan/Usaha Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2006. Hasil Listing Sensus Ekonomi 2006. Yogyakarta
- BPS DIY. 2016. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi DIY Menurut Lapangan Usaha 2011-2015. Yogyakarta.
- BPS DIY. 2016. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi DIY Menurut Pengeluaran 2011-2015. Yogyakarta.
- BPS DIY dan Bappeda DIY. 2003. ICOR Sektoral Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 1998-2002. Yogyakarta
- BPS DIY dan Bappeda DIY. 2009. ICOR Sektoral Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2004-2008. Yogyakarta
- BPS DIY dan Bappeda DIY. 2010. ICOR Sektoral Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2005-2009. Yogyakarta
- BPS DIY dan Bappeda DIY. 2011. Analisis Pembentukan Investasi Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2010. Yogyakarta
- BPS DIY dan Bappeda DIY. 2011. ICOR Sektoral Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2006-2010. Yogyakarta
- BPS DIY dan Bappeda DIY. 2012. Analisis ICOR Sektoral Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2007-2011. Yogyakarta
- BPS DIY dan Bappeda DIY. 2012. Tabel Input-Output Daerah Istimewa Yogyakarta 2010. Yogyakarta.
- BPS DIY dan Bappeda DIY. 2013. Analisis ICOR Sektoral Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2008-2012. Yogyakarta
- BPS DIY dan Bappeda DIY. 2014. Analisis ICOR Sektoral Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2009-2013. Yogyakarta
- BPS DIY dan Bappeda DIY. 2015. Analisis ICOR Sektoral Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2010-2014. Yogyakarta
- BPS DIY dan Bappeda DIY. 2016. Analisis ICOR Sektoral Provinsi D.I. Yogyakarta

Tahun 2011-2015. Yogyakarta

BPS DIY dan Bappeda DIY. 2017. Analisis ICOR Sektoral Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2012-2016. Yogyakarta

Effendi, D.P. 1992. ICOR. Stok Kapital. dan ILOR. BPS. Jakarta

Glassburner, B dan A. Chandra. 1979. Teori dan Kebijakan Ekonomi Makro. LP3ES. Jakarta

Hess, P. and C. Ross. 1997. Economic Development; Theories. Evidence. and Policies. The Dryden Press. Orlando.

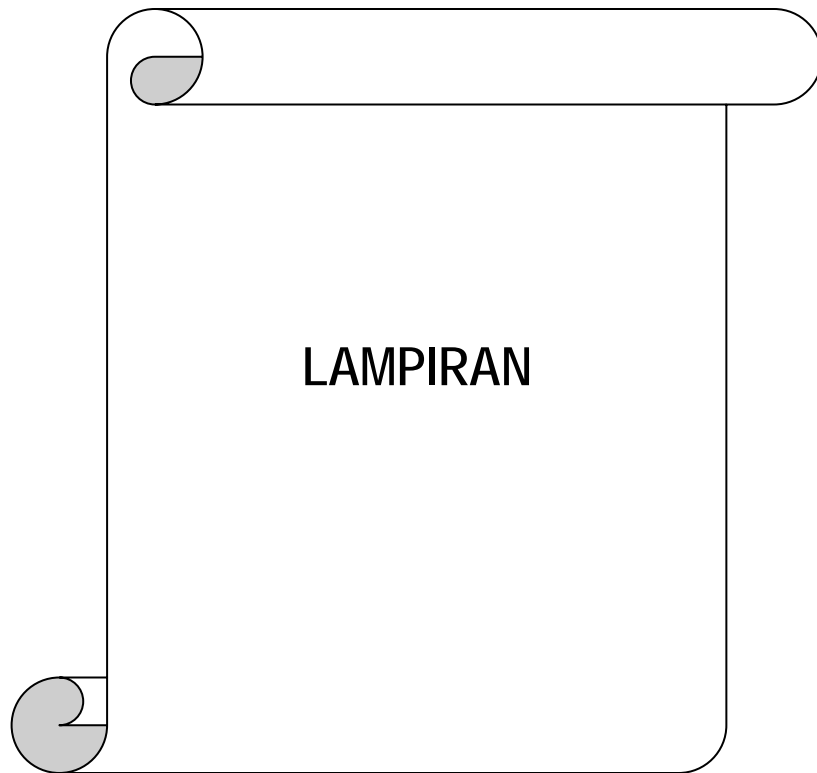
Mankiw, N.G. 2007. Macroeconomics. Sixth Edition. Terjemahan. Penerbit Erlangga. Jakarta.

Salim, A. 2010. Pengembangan Investasi Daerah: Agenda Pemerintah Daerah. diakses dari <http://agusjero.blogspot.com/2010/09/pengembangan-investasi-daerah-agenda.html>

Sutomo, S. 2015. Sistem Data dan Perangkat Analisis Ekonomi Makro. Corleone Books – Publishing House of Litera Media. Bandung.

Todaro, M.P. 2003. Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga. Alih Bahasa: Aminuddin dan Mursid. Jakarta: Ghalia Indonesia

Widodo, Hg.S.T. 1990. Indikator Ekonomi Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia. Kanisius. Yogyakarta



Lampiran 1. PDRB D.I. Yogyakarta Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha, 2013-2017 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016*)	2017**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	9.449.020	9.769.112	10.793.840	11.456.173	11.933.401
a. Pertanian, Peternakan, Perburuan & Jasa Pertanian	8.347.274	8.545.055	9.442.590	10.036.121	10.424.091
b. Kehutanan & Penebangan Kayu	750.208	816.386	902.903	955.185	1.004.945
c. Perikanan	351.538	407.671	448.346	464.867	504.365
2. Pertambangan & Penggalian	495.039	537.599	573.133	593.156	615.943
3. Industri Pengolahan	11.563.734	12.614.921	13.303.468	14.547.753	15.636.603
4. Pengadaan Listrik & Gas	86.394	101.944	118.012	141.794	173.689
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	89.645	102.670	109.697	114.765	121.272
6. Konstruksi	8.060.750	8.722.682	9.499.917	10.286.734	11.303.630
7. Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	6.938.421	7.681.035	8.342.646	9.332.038	10.241.621
8. Transportasi & Pergudangan	4.783.127	5.313.233	5.763.846	6.251.304	6.783.681
9. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	8.284.061	9.324.121	10.383.402	11.255.100	12.304.099
a. Penyediaan Akomodasi	1.665.470	1.814.460	2.050.489	2.273.996	2.596.088
b. Penyediaan Makan Minum	6.618.590	7.509.661	8.332.913	8.981.104	9.708.011
10. Informasi & Komunikasi	7.572.219	7.897.507	8.244.242	8.957.494	9.789.586
11. Jasa Keuangan & Asuransi	3.170.933	3.602.561	4.022.438	4.334.288	4.640.943
a. Jasa Perantara Keuangan	2.342.862	2.702.048	3.052.521	3.273.041	3.474.376
b. Lainnya	828.071	900.513	969.917	1.061.247	1.166.567
12. Real Estate	5.815.245	6.497.271	7.116.820	7.808.289	8.382.668
13. Jasa Perusahaan	855.439	956.391	1.048.359	1.115.194	1.207.970
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	6.702.819	7.492.246	8.379.232	9.217.108	10.213.350
15. Jasa Pendidikan	6.816.002	7.600.855	8.598.744	9.013.442	9.711.308
16. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	2.094.674	2.276.361	2.553.551	2.759.865	3.004.112
17. Jasa lainnya	2.147.020	2.351.975	2.589.171	2.824.990	3.109.029
PDRB	84.924.543	92.842.484	101.440.518	110.009.487	119.172.906

Sumber : BPS Provinsi D.I. Yogyakarta

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Lampiran 2. Distribusi PDRB D.I. Yogyakarta Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha, 2013-2017 (persen)

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016*)	2017**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	11,13	10,52	10,64	10,41	10,01
a. Pertanian, Peternakan, Perburuan & Jasa Pertanian	9,83	9,20	9,31	9,12	8,75
b. Kehutanan & Penebangan Kayu	0,88	0,88	0,89	0,87	0,84
c. Perikanan	0,41	0,44	0,44	0,42	0,42
2. Pertambangan & Penggalian	0,58	0,58	0,56	0,54	0,52
3. Industri Pengolahan	13,62	13,59	13,11	13,22	13,12
4. Pengadaan Listrik & Gas	0,10	0,11	0,12	0,13	0,15
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10
6. Konstruksi	9,49	9,40	9,37	9,35	9,49
7. Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	8,17	8,27	8,22	8,48	8,59
8. Transportasi & Pergudangan	5,63	5,72	5,68	5,68	5,69
9. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	9,75	10,04	10,24	10,23	10,32
a. Penyediaan Akomodasi	1,96	1,95	2,02	2,07	2,18
b. Penyediaan Makan Minum	7,79	8,09	8,21	8,16	8,15
10. Informasi & Komunikasi	8,92	8,51	8,13	8,14	8,21
11. Jasa Keuangan & Asuransi	3,73	3,88	3,97	3,94	3,89
a. Jasa Perantara Keuangan	2,76	2,91	3,01	2,98	2,92
b. Lainnya	0,98	0,97	0,96	0,96	0,98
12. Real Estate	6,85	7,00	7,02	7,10	7,03
13. Jasa Perusahaan	1,01	1,03	1,03	1,01	1,01
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	7,89	8,07	8,26	8,38	8,57
15. Jasa Pendidikan	8,03	8,19	8,48	8,19	8,15
16. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	2,47	2,45	2,52	2,51	2,52
17. Jasa lainnya	2,53	2,53	2,55	2,57	2,61
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Provinsi D.I. Yogyakarta

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Lampiran 3. PDRB D.I. Yogyakarta atas dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha, 2013-2017 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016*)	2017**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	7.670.026	7.508.980	7.667.602	7.779.801	7.930.647
a. Pertanian, Peternakan, Perburuan & Jasa Pertanian	6.741.415	6.539.528	6.666.703	6.766.495	6.884.010
b. Kehutanan & Penebangan Kayu	657.700	680.933	700.237	708.450	728.827
c. Perikanan	270.911	288.519	300.662	304.857	317.809
2. Pertambangan & Penggalan	461.014	470.735	471.323	473.299	489.349
3. Industri Pengolahan	10.084.213	10.469.749	10.693.036	11.234.804	11.879.550
4. Pengadaan Listrik & Gas	116.969	124.960	127.701	145.910	151.681
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	79.740	82.855	85.260	87.268	90.289
6. Konstruksi	7.106.855	7.508.543	7.826.701	8.250.608	8.822.979
7. Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	6.187.855	6.540.108	6.944.903	7.367.624	7.788.856
8. Transportasi & Pergudangan	4.217.507	4.377.850	4.541.309	4.750.834	4.976.167
9. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	6.942.541	7.414.021	7.842.143	8.274.501	8.788.711
a. Penyediaan Akomodasi	1.289.747	1.353.394	1.450.436	1.568.774	1.743.404
b. Penyediaan Makan Minum	5.652.794	6.060.627	6.391.707	6.705.728	7.045.307
10. Informasi & Komunikasi	7.969.970	8.458.713	8.891.145	9.630.639	10.222.383
11. Jasa Keuangan & Asuransi	2.610.919	2.826.934	3.060.733	3.213.222	3.303.212
a. Jasa Perantara Keuangan	1.898.022	2.086.229	2.273.369	2.378.617	2.420.775
b. Lainnya	712.897	740.705	787.363	834.605	882.437
12. Real Estate	5.322.004	5.735.457	6.082.489	6.395.209	6.711.295
13. Jasa Perusahaan	858.734	924.042	991.564	1.025.558	1.085.626
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	5.639.412	5.971.986	6.304.911	6.656.183	6.956.541
15. Jasa Pendidikan	6.430.386	6.938.845	7.444.277	7.672.850	8.099.104
16. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	1.916.374	2.062.979	2.210.406	2.310.356	2.445.389
17. Jasa lainnya	2.012.931	2.119.326	2.288.950	2.419.533	2.558.882
PDRB	75.627.450	79.536.082	83.474.452	87.688.200	92.300.660

Sumber : BPS Provinsi D.I. Yogyakarta

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Lampiran 4. Distribusi PDRB D.I. Yogyakarta atas dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha, 2013-2017 (persen)

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016*)	2017**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	10,14	9,44	9,19	8,87	8,59
a. Pertanian, Peternakan, Perburuan & Jasa Pertanian	8,91	8,22	7,99	7,72	7,46
b. Kehutanan & Penebangan Kayu	0,87	0,86	0,84	0,81	0,79
c. Perikanan	0,36	0,36	0,36	0,35	0,34
2. Pertambangan & Penggalian	0,61	0,59	0,56	0,54	0,53
3. Industri Pengolahan	13,33	13,16	12,81	12,81	12,87
4. Pengadaan Listrik & Gas	0,15	0,16	0,15	0,17	0,16
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10
6. Konstruksi	9,40	9,44	9,38	9,41	9,56
7. Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	8,18	8,22	8,32	8,40	8,44
8. Transportasi & Pergudangan	5,58	5,50	5,44	5,42	5,39
9. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	9,18	9,32	9,39	9,44	9,52
a. Penyediaan Akomodasi	1,71	1,70	1,74	1,79	1,89
b. Penyediaan Makan Minum	7,47	7,62	7,66	7,65	7,63
10. Informasi & Komunikasi	10,54	10,64	10,65	10,98	11,08
11. Jasa Keuangan & Asuransi	3,45	3,55	3,67	3,66	3,58
a. Jasa Perantara Keuangan	2,51	2,62	2,72	2,71	2,62
b. Lainnya	0,94	0,93	0,94	0,95	0,96
12. Real Estate	7,04	7,21	7,29	7,29	7,27
13. Jasa Perusahaan	1,14	1,16	1,19	1,17	1,18
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	7,46	7,51	7,55	7,59	7,54
15. Jasa Pendidikan	8,50	8,72	8,92	8,75	8,77
16. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	2,53	2,59	2,65	2,63	2,65
17. Jasa lainnya	2,66	2,66	2,74	2,76	2,77
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Provinsi D.I. Yogyakarta

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Lampiran 5. PDRB D.I. Yogyakarta Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran, 2013-2017 (Juta Rupiah)

Komponen	2013	2014	2015	2016*)	2017**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	57.101.887	62.875.141	68.730.528	74.429.796	81.688.214
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	2.457.182	2.948.427	3.171.193	3.225.070	3.756.395
3. Konsumsi Pemerintah	13.629.834	15.347.428	17.214.154	18.441.761	20.063.072
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	24.250.704	27.744.794	30.798.881	33.428.978	37.147.936
5. Perubahan Inventori/Stok	967.150	980.197	1.151.797	1.295.788	1.368.184
Investasi (4 + 5)	25.217.854	28.724.991	31.950.678	34.724.766	38.516.120
6. Ekspor Barang dan Jasa	44.738.868	52.453.603	58.504.294	64.690.398	69.474.836
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	58.221.083	69.507.107	78.130.328	85.502.305	94.325.732
PDRB	84.924.543	92.842.484	101.440.518	110.009.487	119.172.906

Sumber : BPS Provinsi D.I. Yogyakarta

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Lampiran 6. Distribusi PDRB D.I. Yogyakarta atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran, 2013-2017 (persen)

Komponen	2013	2014	2015	2016*)	2017**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	67,24	67,72	67,75	67,66	68,55
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	2,89	3,18	3,13	2,93	3,15
3. Konsumsi Pemerintah	16,05	16,53	16,97	16,76	16,84
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	28,56	29,88	30,36	30,39	31,17
5. Perubahan Inventori/Stok	1,14	1,06	1,14	1,18	1,15
Investasi (4 + 5)	29,69	30,94	31,50	31,57	32,32
6. Ekspor Barang dan Jasa	52,68	56,50	57,67	58,80	58,30
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	68,56	74,87	77,02	77,72	79,15
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Provinsi D.I. Yogyakarta

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Lampiran 7. PDRB D.I. Yogyakarta atas dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran, 2013-2017 (Juta Rupiah)

Komponen	2013	2014	2015	2016*)	2017**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	45.670.009	47.923.893	50.193.386	52.619.164	55.533.017
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	2.095.397	2.317.123	2.384.374	2.362.344	2.589.250
3. Konsumsi Pemerintah	11.553.432	12.056.063	12.719.134	12.987.746	13.384.559
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	20.190.810	21.358.622	22.286.615	23.616.948	24.791.862
5. Perubahan Inventori/Stok	832.540	930.599	974.645	1.045.164	1.066.314
Investasi (4 + 5)	21.023.350	22.289.222	23.261.260	24.662.112	25.858.176
6. Ekspor Barang dan Jasa	37.531.260	40.089.136	41.978.121	43.877.316	46.253.068
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	42.245.998	45.139.355	47.061.823	48.820.482	51.317.410
PDRB	75.627.450	79.536.082	83.474.452	87.688.200	92.300.660

Sumber : BPS Provinsi D.I. Yogyakarta

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Lampiran 8. Distribusi PDRB D.I. Yogyakarta atas dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran, 2013-2017 (persen)

Komponen	2013	2014	2015	2016*)	2017**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	60,39	60,25	60,13	60,01	60,17
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	2,77	2,91	2,86	2,69	2,81
3. Konsumsi Pemerintah	15,28	15,16	15,24	14,81	14,50
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	26,70	26,85	26,70	26,93	26,86
5. Perubahan Inventori/Stok	1,10	1,17	1,17	1,19	1,16
Investasi (4 + 5)	27,80	28,02	27,87	28,12	28,02
6. Ekspor Barang dan Jasa	49,63	50,40	50,29	50,04	50,11
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	55,86	56,75	56,38	55,68	55,60
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Provinsi D.I. Yogyakarta

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Lampiran 9. PMTB + Perubahan Inventori, ICOR, dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Pulau Jawa, 2017

Provinsi	ADHK 2010 (Miliar Rp.)		% thd PDRB		ICOR		LPE (%)
	PMTB	PMTB + Δ Inventori	PMTB	PMTB + Δ Inv.	PMTB	PMTB + Δ Inv.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
DKI Jakarta	705.985	718.181	43,16	43,90	7,37	7,50	6,22
Jawa Barat	332.751	375.055	24,78	27,93	4,94	5,56	5,29
Jawa Tengah	264.716	270.669	29,61	30,27	5,92	6,05	5,27
D.I. Yogyakarta	24.792	25.858	26,86	28,02	5,37	5,61	5,26
Jawa Timur	410.313	428.337	27,68	28,90	5,36	5,59	5,45
Banten	126.199	126.335	30,78	30,82	5,70	5,71	5,71
Indonesia	3.228.748	3.344.144	32,57	33,74	6,75	6,99	5,07

Sumber: BPS (Diolah)

Keterangan : LPE = Laju Pertumbuhan Ekonomi

Lampiran 10. PDRB Kabupaten/Kota se-D.I. Yogyakarta Atas Dasar Harga Berlaku, 2013-2017 (juta rupiah)

Kabupaten/Kota/ Provinsi	2013	2014	2015	2016*)	2017**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kulonprogo	6.489.594	7.056.572	7.671.548	8.312.455	9.063.335
Bantul	16.138.755	17.682.925	19.325.203	20.919.336	23.114.037
Gunungkidul	11.530.341	12.557.371	13.798.657	14.982.055	16.207.042
Sleman	28.295.363	30.912.239	33.826.505	36.939.696	40.087.445
Kota Yogyakarta	22.537.792	24.664.285	26.791.936	28.895.813	31.308.655
D.I. Yogyakarta	84.924.543	92.842.484	101.440.518	110.009.487	119.172.906

Sumber : BPS Provinsi D.I.Yogyakarta

Lampiran 11. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se-D.I. Yogyakarta, 2013-2017 (persen)

Kabupaten/Kota/ Provinsi	2013	2014	2015	2016*)	2017**)	Rata-rata 2013-2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Kulonprogo	4,87	4,57	4,62	4,76	5,97	4,98
2. Bantul	5,46	5,04	4,97	5,06	5,14	5,05
3. Gunungkidul	4,97	4,54	4,82	4,89	5,00	4,81
4. Sleman	5,89	5,30	5,18	5,25	5,35	5,27
5. Yogyakarta	5,47	5,28	5,09	5,11	5,24	5,18
D.I. Yogyakarta	5,47	5,17	4,95	5,05	5,26	5,11

Sumber : BPS Provinsi D.I.Yogyakarta

Ket: * angka sementara; ** angka sangat sementara

Lampiran 12. PDRB Kabupaten/Kota menurut Lapangan Usaha se-D.I. Yogyakarta Atas Dasar Harga Berlaku, 2017 (juta rupiah)

Lapangan Usaha	Kulonprogo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Yogyakarta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.715.661	3.166.789	3.968.200	3.085.181	1.715.661
2. Pertambangan dan Penggalan	132.102	128.676	201.918	154.658	132.102
3. Industri Pengolahan	1.122.792	3.593.671	1.535.319	5.319.570	1.122.792
4. Pengadaan Listrik dan Gas	8.345	28.593	15.436	47.254	8.345
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11.966	18.146	26.248	19.091	11.966
6. Konstruksi	825.886	2.180.975	1.563.747	4.376.659	825.886
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	1.271.959	1.975.840	1.519.918	3.160.225	1.271.959
8. Transportasi dan Pergudangan	708.680	1.083.507	805.655	2.973.830	708.680
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	350.565	2.725.392	958.922	4.144.322	350.565
10. Informasi dan Komunikasi	451.136	1.701.177	1.156.955	3.244.700	451.136
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	286.018	626.655	361.954	1.280.250	286.018
12. Real Estate	310.732	1.516.180	578.583	3.142.737	310.732
13. Jasa Perusahaan	25.128	109.585	70.298	670.737	25.128
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	846.924	1.766.873	1.564.517	2.782.811	846.924
15. Jasa Pendidikan	532.473	1.602.314	997.909	3.815.059	532.473
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	130.305	428.494	324.943	947.352	130.305
17. Jasa lainnya	332.663	461.170	556.518	923.008	332.663
PDRB	9.063.335	23.114.037	16.207.042	40.087.445	9.063.335

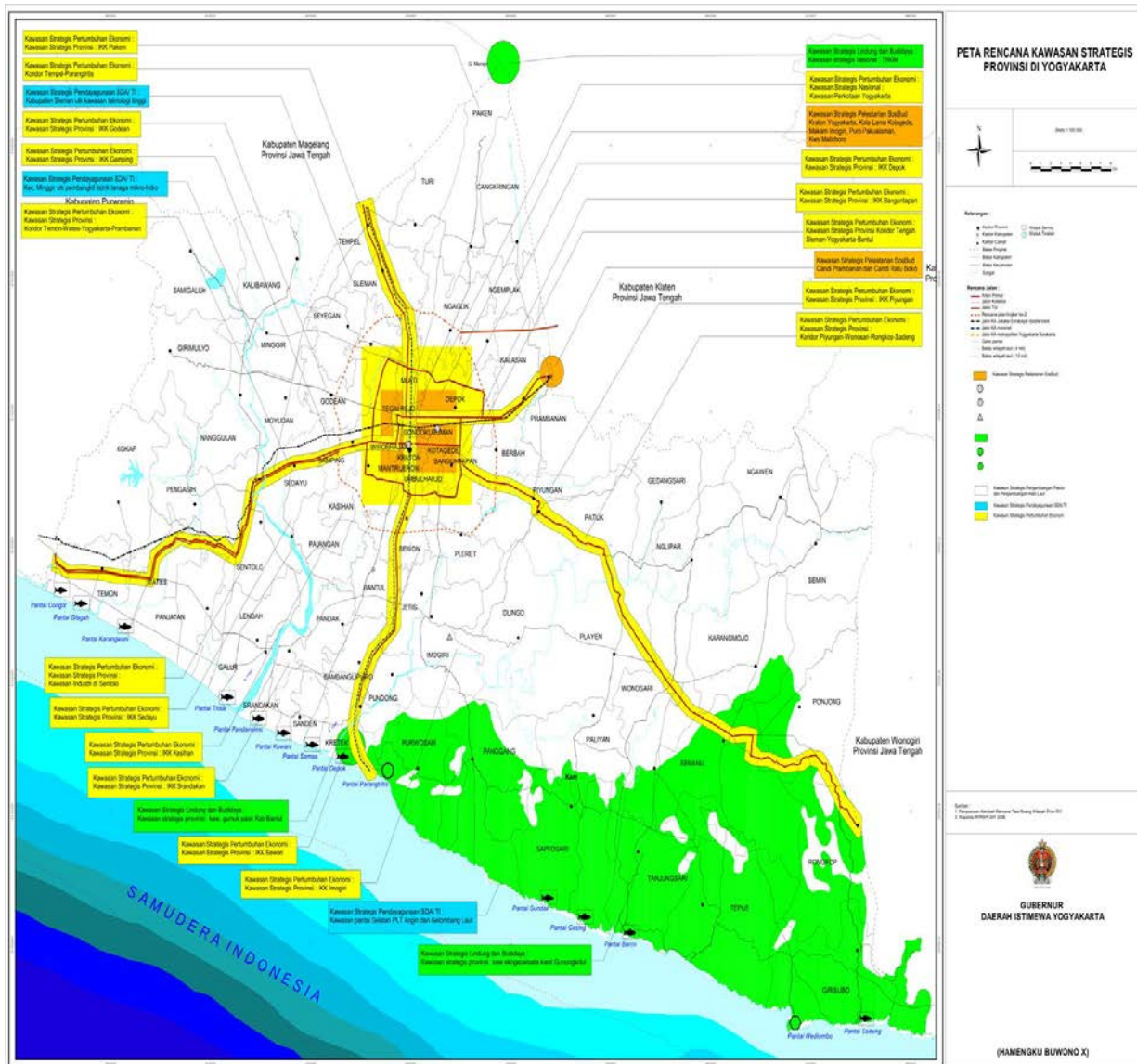
Sumber : BPS Provinsi D.I.Yogyakarta

Lampiran 13. Kontribusi Lapangan Usaha Dominan menurut Kabupaten/Kota se-D.I. Yogyakarta, 2013-2017 (persen)

Kabupaten/ Kota	Lapangan Usaha	Kontribusi (persen)		
		2013	2015	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kulonprogo	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	21,17	20,42	18,93
	2. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	13,00	13,15	14,03
	3. Industri Pengolahan	12,03	12,07	12,39
Bantul	1. Industri Pengolahan	15,44	15,06	15,55
	2. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15,34	14,60	13,70
	3. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,97	11,59	11,79
Gunungkidul	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	26,43	25,62	24,48
	2. Konstruksi	9,62	9,41	9,65
	3. Industri Pengolahan	9,42	9,31	9,47
Sleman	1. Industri Pengolahan	14,21	13,43	13,27
	2. Konstruksi	10,99	10,85	10,92
	3. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,88	10,20	10,34
Yogyakarta	1. Industri Pengolahan	14,03	13,66	13,47
	2. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12,61	13,22	13,55
	3. Informasi dan Komunikasi	11,80	10,33	10,44

Sumber : BPS Provinsi D.I. Yogyakarta

Lampiran 14. Peta Rencana Kawasan Strategis di Provinsi D.I. Yogyakarta



Lampiran 15. Peta Pengembangan Kawasan Sentra Produksi D.I. Yogyakarta

